



BUPATI SUMENEP



**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI
SUMENEP
TAHUN 2023**

KEPADA :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyampaian LKPj ini adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional selaku Kepala Daerah kepada DPRD, sebagaimana diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 menyebutkan :

- (1) Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023 adalah gambaran hasil penyelenggaraan urusan pembangunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Efektivitas pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah dapat diukur berdasar capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) Pemda, indikator Program Pemda, dan indikator kinerja utama terhadap pelaksanaan urusan yang mejadi kewenangan daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) selalu menjadi komitmen Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Sumenep dalam memandang bahwa setiap proses pembangunan harus dapat dilihat dari tingkat keberhasilannya, obyektif, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah serta berbagai prestasi yang telah dicapai pada tahun 2023 merupakan hasil kerja bersama dari seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, aparat keamanan, termasuk jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan. Catatan strategis hasil rekomendasi dari DPRD Kabupaten Sumenep terhadap LKPJ merupakan masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sumenep pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terimakasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep serta kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas segala dukungan/partisipasi, kolaborasi, dan sinergitas, serta nasihat, kritik dan saran kepada kami beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam proses penyusunan LKPj ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar selalu ikhlas dan amanah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep demi pembangunan di Kabupaten Sumenep. Amiiin...

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sumenep, 7 Maret 2024



H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Dasar Hukum I-1

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah..... I-2

1.2.1 Visi I-2

1.2.2 Misi I-4

1.2.3 Tujuan dan Sasaran I-8

1.3 Data Umum Daerah I-10

1.3.1 Data Geografis Wilayah I-10

1.3.2 Jumlah Penduduk I-13

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk I-15

1.3.4 Jumlah ASN I-16

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis

Pendapatan..... I-19

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja..... I-20

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis

Pembiayaan I-21

1.3.8 Realisasi Belanja masing-masing SKPD I-23

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

KABUPATEN SUMENEP II-1

2.1 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah	II-2
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	II-4
2.1.2 Pendapatan Transfer	II-4
2.1.3 Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II-5
2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah	II-5
2.2.1 Belanja Operasi	II-6
2.2.2 Belanja Modal.....	II-7
2.2.3 Belanja Tidak Terduga.....	II-8
2.2.4 Belanja Transfer	II-8
2.3 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah.....	II-9
2.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah	II-9
2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah	II-10

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH..... III-1

3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	III-2
3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-3
3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	III-4
3.1.3 Persentase Penduduk Miskin	III-5
3.1.4 Indeks Reformasi Birokrasi	III-6
3.1.5 Indeks Kesalehan Sosial	III-7

3.1.6 Indeks Infrastruktur	III-8
3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III-9
3.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	III-179
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	III-184

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN DAN PENUGASAN IV-1

4.1 Urusan Pemerintah yang Ditugas Pembantuan..... IV-2

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan

Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah

Tingkat di atasnya IV-4

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan

Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan

Pemerintahan dibawahnya..... IV-6

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas

Pembantuan dan Upaya Penyelesaian IV-36

BAB V PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten	
Sumenep	I-11
Tabel 1.2 Topografi Kabupaten Sumenep.....	I-12
Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten	
Sumenep	I-14
Tabel 1.4 Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep	
Tahun 2019-2023	I-15
Tabel 1.5 Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin	I-17
Tabel 1.6 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Usia	I-17
Tabel 1.7 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan	I-18
Tabel 1.8 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang	
Pendidikan	I-18
Tabel 1.9 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Eselon.....	I-18
Tabel 1.10 Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023	I-19
Tabel 1.11 Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-21
Tabel 1.12 Tabel Realisasi Pembiayaan	I-22
Tabel 1.13 Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022	I-23
Tabel 2.1 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah	
Tahun 2023	II-3
Tabel 2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah	
Tahun 2023.....	II-8
Tabel 2.3 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah	

Tahun 2023.....	II-10
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah	
Daerah	III-2
Tabel 3.2 Indeks Pembangunan Manusia	III-4
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep.....	III-4
Tabel 3.4 Persentase Penduduk Miskin	III-5
Tabel 3.5 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep	III-6
Tabel 3.6 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep	III-7
Tabel 3.7 Indeks Infrastruktur Kabupaten Sumenep	III-8
Tabel 3.8 Capaian Program Dan Kegiatan Kabupaten	
Sumenep Tahun 2023	III-11
Tabel 3.9 Kebijakan Strategi Pelaksanaan Pembangunan	
Tahun 2023	III-179
Tabel 3.10 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran	
2022	III-185
Tabel 4.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan	
Program urusan Kelautan dan Perikanan	
Tahun 2023.....	IV-5
Tabel 4.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan	
Program Urusan Pertanian Tahun 2023	IV-6
Tabel 4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana	
Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2023	IV-8
Tabel 4.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa	
di Kabupaten Sumenep Tahun 2023	IV-23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam negara kesatuan Republik Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura sekitar 153 km ke arah timur Surabaya yang terdiri dari 27 kecamatan, 330 desa dan 4 kelurahan dan Kabupaten Sumenep memiliki pulau yang cukup banyak yaitu 126 pulau, terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni dengan Luas wilayah laut kurang lebih 50.000 km² sedangkan luas daratan (wilayah daratan dan kepulauan) sebesar 2.093,458 km dengan ketinggian wilayah daratan antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut sehingga dapat ditanami beranekaragam tanaman pangan dan perkebunan potensial.

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja terhadap kewenangan yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan Laporan keterangan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan serta penugasan, meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai kewajiban, “menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LEPPD).

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2023 Bupati berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Sumenep Tahun 2023 kepada DPRD. LKPJ dimaksud disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Sumenep dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025.

LKPJ Bupati Sumenep Tahun 2023, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD dan hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumenep, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan diwaktu yang akan datang.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sumenep yang sudah dilaksanakan selama ini, harus terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan, sebagai modal dasar untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik pada masa mendatang.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama dengan DPRD telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, untuk mendorong perkembangan usaha masyarakat yang

makin mandiri, kesejahteraan rakyat, dan mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan dengan didukung berbagai fasilitas layanan publik yang sesuai dengan standart pelayanan minimal (SPM), serta kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Visi adalah rumusan general berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Berangkat dari tinjauan filosofis, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep, serta memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat Sumenep, maka penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah

“ Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera ”

Visi Kabupaten Sumenep dimaksud memiliki 3 makna penting yang perlu dipahami bersama yaitu : Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera.

1. UNGGUL

Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.

2. MANDIRI

Memiliki makna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

3. SEJAHTERA

Memiliki arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih mandiri merefleksikan sikap dan komitmen untuk mencetak masyarakat yang lebih unggul, mandiri dan sejahtera, maka dirumuskan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut:

1.2.2. Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan

memperhatikan faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang strategis dan berpengaruh, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebagai upaya untuk menjabarkan setiap misi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2021-2026. Setiap misi memaknai target pencapaian daerah sebagai berikut :

1. Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing

Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan. Pada misi Pertama berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Konstruksi pendidikan dalam konteks ini bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan maksimal dan jaminan mutu pendidikan. Komitmen peningkatan mutu pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama untuk memajukan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Peningkatan pendidikan dalam misi melalui program peningkatan kompetensi pendidik, kesejahteraan guru honorer, guru ngaji dan guru madrasah diniyah serta support bantuan sarana dan prasarana serta stimulus program beasiswa berprestasi bagi siswa dan tenaga pendidik baik dilingkungan sekolah umum maupun diniyah.

Kesehatan sebagai salah satu hak dasar rakyat yang dilindungi undang-undang saat ini terus dibangun dan ditingkatkan. Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pandangan diatas bisa terwujud bila diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sisi yang lain

ikhtiar peningkatan status akreditasi BLUD puskesmas dan membangun Rumah Sakit Tipe D di tiap eks pembantu bupati. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep tergolong rendah di Jawa Timur, namun kesejahteraan masih tergolong rendah. Oleh karena itu kualitas Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan daya saing SDM.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi

Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir. Misi ini dalam rangka memperkuat kemajuan ekonomi masyarakat lokal dengan menggerakkan sektor unggulan daerah (desa/kecamatan); yaitu sektor pertanian pangan, dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti peningkatan/pembangunan irigasi atau sumber mata air dengan kelengkapan peralatan yang didukung sarana produksi, bibit unggul, pupuk berimbang serta alat produksi modern yang ramah lingkungan. Sektor pertanian ini dapat ditingkatkan lagi dengan mencobakan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan efisiensi produksi yang dikerjakan dengan pola budidaya terpadu serta pengembangan sistem budidaya produksi dari hulu-hilir yang terkendali dalam tata organisasi yang terpadu dan terkendali dengan baik untuk mencapai nilai tambah yang optimal, meningkatnya swasembada beras, swasembada pangan menuju ketahanan pangan; Bidang peternakan, usaha untuk menguatkan populasi ternak yang ada di Sumenep yang kian hari semakin sedikit. Oleh sebab itu penting dilakukan terobosan yang efektif dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholders melalui sistem peternakan yang modern yaitu inseminasi bibit ternak. Demikian pula sektor kelautan dan perikanan, melalui konsep budaya bahari dengan melibatkan masyarakat secara holistic dan pengembangan yang terintegrasi dengan pusat pelelangan ikan, cold storage dari hulu ke hilir. Sumenep banyak potensi pariwisata yang harus dimaksimalkan sehingga berdampak pada penguatan sektor ekonomi masyarakat. Konsepnya adalah pemerintah daerah bersama masyarakat serta melibatkan swasta dalam pengembangan pariwisata di Sumenep tanpa

mencerabut nilai-nilai local wisdom. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Sumenep.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat.

Proses pembangunan wajib didukung oleh semangat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan peningkatan implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sisi lainnya adalah keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan peningkatan implementasi open government secara terpadu pada seluruh instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.

4. Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal.

Masalah sosial senantiasa hadir di berbagai negara, dengan kompleksitas masalah sosial seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, kenakalan remaja dan seks bebas, kekurangan gizi dan penyakit menular. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Pengentasan masalah sosial tidak semata-mata menjadi kewajiban negara (pemerintah daerah), namun semangat gotong royong yang merupakan watak, karakter dan kepribadian masyarakat kita yang harus diperkuat.

5. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan. Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk wilayah kepulauan, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas dengan pembangunan di wilayah daratan. Oleh sebab itu, penting dilakukan percepatan pembangunan jalan-jalan strategis, irigasi untuk menambah produktivitas hasil pertanian dan perdagangan hasil bumi serta sarana telekomunikasi dan listrik 24 jam.

1.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2021-2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi 1 adalah :
 - Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing;
2. Tujuan dari misi 2 adalah :
 - Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
3. Tujuan dari misi 3 adalah :
 - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif;
4. Tujuan dari misi 4 adalah :
 - Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal;
5. Tujuan dari misi 5 adalah :

- Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan;

Tujuan pembangunan diatas kemudian perlu dijelaskan ke dalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Misi 1 adalah :

- a. Meningkatnya Kualiltas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan;
- b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
- c. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah;

2. Sasaran Misi 2 adalah :

- a. Menurunkan Kesenjangan;
- b. Meningkatnya Pendapatan Perkapita;
- c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
- d. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;

3. Sasaran Misi 3 adalah :

- a. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-goverment;
- b. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- c. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan;

4. Sasaran Misi 4 adalah :

- a. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat;
- b. Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat;
- c. Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat;

5. Sasaran Misi 5 adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata;
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

1. Letak Wilayah

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara 113^o 32' 54" – 116^o 16' 48" Bujur Timur dan 4^o 55' – 7^o 24' Lintang Selatan dengan dengan batas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa/Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan

2. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep, wilayah administrasi Kabupaten Sumenep seluas 2.093,458 km, yang terbagi menjadi 27 wilayah Kecamatan, 330 Desa dan 4 Kelurahan, 1,564 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Daratan dan Kepulauan;

- Wilayah Daratan dengan luas 1.146,93 Km² (54,79%) terdiri dari 18 Kecamatan.
- Wilayah kepulauan dengan luas 946,54 Km² (45,21%) terdiri dari 9 Kecamatan.

Berdasarkan gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep, pulau terjauh/paling utara adalah pulau Karamian Kecamatan Masalembu, dengan jarak tempuk lebih kurang 151 mil dari Pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan pulau yang paling timur adalah pulau Sakala Kecamatan Sapeken dengan jarak tempuh lebih kurang 165 mil dari pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.

Tabel 1.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	12/4	43	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batu Putih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	62	201,89
JUMLAH		334	1.564	2.093,47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023

3. Topografi

Topografi Kabupaten Sumenep umumnya tergolong **dataran rendah** dengan **sedikit berbukit** di sebagian wilayahnya, mempunyai ketinggian tempat **sedang** dan kemiringan tanah *landai*, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Topografi Kabupaten Sumenep

No	Kategori	Uraian	Luas (Ha)
A.	Wilayah Ketinggian		
	1. Ketinggian	0 – 500 m dpl	208.697,40
	2. Ketinggian	500 – 1000 m dpl	578,42
B.	Wilayah Kemiringan		
	1. Kemiringan	0 – 2 %	128.121,43
	2. Kemiringan	2 – 5 %	34.733,40
	3. Kemiringan	5 – 15 %	33.460,10
	4. Kemiringan	15 – 30 %	9403,12
	5. Kemiringan	> 30 %	3786,21

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2045

4. Geologi

Kondisi geologi lahan adalah kandungan isi bumi (tanah) yang terkait dengan bahan-bahan pertambangan. Kondisi Geologi di Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya dominasi pada alluvium sebanyak 19% kemudian batuan Pistosewn Fasies Sedimen serta Antiklinnya sebanyak 29%, bahan-bahan tersebut berpotensi sebagai bahan tambang.

5. Klimatologi

Secara umum kondisi geografi kabupaten Sumenep dilihat dari curah hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Pengamatan curah hujan di Stasiun Meteorologi Trunojoyo menggunakan alat Penakar Hujan Observasi (obs) dan Penakar Hujan Otomastis type Heliman. Penakar Hujan Observasi (obs) adalah alat pengukur jumlag curah hujan tipe biasa, sedangkan Penakar Hujan type Heliman adalah alat pengukur intensitas hujan atau jumlah hujan persatuan waktu. Curah Hujan diukur dalam satuan mm (milimeter). Curah hujan sampai dengan bulan desember sebesar 94,2 mm/11 hari hujan.

Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan september dan bulan oktober memancarkan sinarnya sebesar 100 %. Sebaliknya sinar matahari

agak terganggu sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan desember. Meskipun matahari memancarkan sinarnya dengan persentase relative tinggi, bukan berarti pada bulan-bulan itu suhu udara berada pada titik paling tinggi. Sebab menurut catatan yang ada, suhu udara tertinggi sebesar 35,4 derajat celcius pada bulan november, dan suhu udara menunjukkan titik terendah yakni 24,2 derajat celcius.

Data geografi lain adalah kecepatan angin terbanyak bertiup dari arah Tenggara. Kecepatan angin rata-rata sebesar 4,9 Knots . Kecepatan angin rata-rata tertinggi sebesar 7,7 Knots , sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah sebesar 2,7 Knots. Sedangkan kecepatan angin maksimum tercatat sebesar 24,0 Knots terjadi pada bulan november 2023.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKB Semester II Tahun 2023) sebanyak 1.142.210 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 551.366 jiwa (48,27%) dan perempuan 590.844 jiwa (51,73%) dengan sex ratio sebesar 93,32%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Sedangkan berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 yang sekitar 1,15 Juta jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 93,97%.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan suku mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.

Tabel 1.3**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep**

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Kota Sumenep	Pamolokan	76.409	25.983	27,84	2.745
2	Kalianget	Kalianget Timur	42.791	15.652	30,19	1.417
3	Manding	Manding Laok	30.467	10.158	68,88	442
4	Talango	Talango	38.743	14.263	50,27	771
5	Bluto	Bunbungan	49.319	16.614	51,25	962
6	Saronggi	Tanamerah	38.607	14.048	67,71	570
7	Lenteng	Ellak Laok	62.574	21.008	71,41	876
8	Giligenting	Aenganyar	24.534	8.874	30,32	809
9	Guluk-guluk	Guluk-guluk	50.357	15.885	59,57	845
10	Ganding	Ketawang Larangan	36.989	11.908	53,97	685
11	Pragaan	Pragaan Laok	67.193	22.548	57,84	1.162
12	Ambunten	Ambunten Timur	40.894	14.930	50,54	809
13	Pasongsongan	Panaongan	51.945	16.560	119,03	436
14	Dasuk	Kerta Timur	31.102	10.912	64,50	482
15	Rubaru	Rubaru	40.343	12.688	84,46	478
16	Batang-batang	Batang-batang Daya	55.690	20.018	80,36	693
17	Batuputih	Batuputih Laok	44.894	16.082	112,31	400
18	Dungkek	Dungkek	36.637	14.375	63,35	578
19	Gapura	Gapura Barat	38.751	13.765	65,78	589
20	Gayam	Pancor	32.020	13.403	88,40	362
21	Nonggunong	Sokarame Paseser	13.479	5.680	40,08	336
22	Raas	Brakas	32.165	11.976	38,90	827
23	Masalembu	Sukajeruk	26.002	9.437	40,85	637
24	Arjasa	Kalikatak	84.729	31.636	241,99	350
25	Sapeken	Sapeken	55.011	17.802	201,89	272
26	Batuan	Batuan	13.591	4.752	27,10	502
27	Kangayan	Kangayan	26.974	10.713	204,68	132
TAHUN 2023			1.142.210	401.672	2.093,47	546,00
TAHUN 2022			1.135.903	396.795	2.093,47	542,59
TAHUN 2021			1.134.810	388.876	2.093,47	542,00
TAHUN 2020			1.138.168	383.973	2.093,47	544,00
TAHUN 2019			1.126.724	360.701	2.093,47	539,89

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Pada tabel diatas, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tahun 2023 adalah Kecamatan Arjasa sebanyak 84.729 jiwa atau sekitar 7,52% dari total jumlah penduduk, sedangkan Kecamatan Gayam memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 13.020 jiwa atau 1,17 % dari total jumlah penduduk. Dengan luas wilayah $\pm 2.093,47 \text{ km}^2$, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 adalah 546 jiwa/km².

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan/pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sedangkan dalam demografi dikenal istilah penambahan penduduk alami dan penambahan penduduk total. Dimana penambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan penambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).

Berikut tabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumenep berdasarkan BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Tabel 1.4

Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023

URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk :						
- B P S	jiwa	1.088.910	1.124.436	1.133.224	1.136.632	1.142.210
- Dispenduk & Capil	jiwa	1.134.129	1.138.168	1.134.810	1.135.903	1.142.210
Pertumbuhan penduduk:						
- B P S	%	0,339	3,26	0,78	1,08	1,58
- Dispenduk & Capil	%	0,31	0,36	0,29	0,10	0,56
Kepadatan penduduk :						
- BPS	jiwa/ km ²	520,15	537,11	537,11	542,94	546,00
- Dispenduk & Capil	jiwa/ km ²	542	544	542	542	546,00

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 0,78 %, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 1,08 %, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 1,58%.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 0,78 %, pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,10%, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,56%.

1.3.4. Jumlah ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS dan PPPK juga memiliki hak sebagai aparatur sipil negara. PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK dan PNS diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”, dan ayat (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Golongan, jenjang Pendidikan dan eselon sejak tahun 2019 s/d 2023 dapat diuraikan pada table berikut ini :

Tabel 1.5
Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki – Laki	5.876	5.746	5.477	5.967	5.381
Wanita	3.123	3.191	3.269	3.645	3.655
Total	8.999	8.937	8.746	9342	9.036

Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 1.6
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Usia

Usia	2019	2020	2021	2022	2023
Usia >55	1.505	1.662	1.524	1.372	1.299
Usia 45-55	3.864	3.631	3.747	3.802	3.691
Usia 36-45	2.652	2.637	2.696	3.232	3.159
Usia 25-35	937	949	755	922	884
Usia <25	41	58	24	14	3
Total	8.999	8.937	8.746	9.342	9.036

Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 1.7
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan

Golongan	2019	2020	2021	2022	2023
Golongan I	142	135	110	104	69
Golongan II	1.980	1.836	1.671	1.590	1.377
Golongan III	4.405	4.659	4.672	5.607	5.773
Golongan IV	2.472	2.307	2.293	2.014	1.817
Total	8.999	8.937	8.746	9.342	9.036

Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 1.8
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
S-3	2	2	4	5	6
S-2	497	476	488	561	620
S-1	4768	4.947	5.272	6.082	6.031
D-III	1025	1.050	1.027	1.017	976
D-II	440	352	187	134	93
D-I	21	25	14	12	11
SLTA	2022	1887	1.590	1.367	1.181
SLTP	102	91	108	105	80
SD	122	107	56	59	38
Total	8.999	8.937	8.746	9.342	9.036

Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 1.9
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Eselon

Eselon	2019	2020	2021	2022	2023
Eselon II	32	28	27	30	24
Eselon III	202	194	170	162	177
Eselon IV	683	669	604	277	225
Eselon V	-	-	-	-	-
Fungsional	5.579	5.387	4.288	4.861	4.893
Pelaksana/Staf	2.503	2.659	3.657	4.012	3.717
Total	8.999	8.937	8.746	9.342	9.036

Sumber : BKPSDM, 2023

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk dapat peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.469.863.466.720,00. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah dan (b) Pendapatan Transfer yang didalamnya ada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan serta (c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.10
Tabel Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp.	Rp	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.469.863.466.720	2.585.188.972.667,12	104,67
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	264.091.553.099	298.570.634.143,12	113,06
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	38.098.700.000,00	47.892.151.015,27	125,71
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	11.305.830.859	12.527.936.745,53	110,81
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.240.000.000	15.357.366.398,77	100,77
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	199.447.022.240,00	222.793.179.983,55	80,80

KODE	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp.	Rp	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.188.363.978.521,00	2.272.552.604.425,00	103,85
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.078.777.432.332	2.089.196.389.025	100,50
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.586.546.189	183.356.215.400	167,32
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.407.935.100	14.065.734.099	80,80
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.407.835.100	14.065.734.099	80,80
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.000	0	0

Sumber : BPPKAD 2023 (unaudited)

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik dari tahun ke tahun. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.11**Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

KODE	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
5	BELANJA DAERAH	2.892.381.009.858,00	2.597.264.241.457,00	89,80%
5.1	BELANJA OPERASI	2.036.318.079.977,00	1.781.509.676.442,00	87,49%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.089.833.197.912,00	920.527.630.299,00	84,47%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.061.908.078,00	664.048.845.789,00	89,85%
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	2.620.000.000,00	2.223.523.266,00	84,87%
5.1.05	Belanja Hibah	197.292.812.987,00	187.735.604.288,00	95,16%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.510.161.000,00	6.974.072.800,00	92,86%
5.2	BELANJA MODAL	272.119.840.966,00	237.156.786.533,00	87,15%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.161.366.125,00	2.417.117.050,00	39,23%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.996.211.561,00	70.521.348.525,00	90,42%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.977.935.954,00	73.376.055.202,00	83,40%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.597.760.326,00	82.674.854.181,00	90,26%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.386.567.000,00	8.167.411.575,00	97,39%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.103.089.265,00	1.417.263.048,00	23,22%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.103.089.265,00	1.417.263.048,00	23,22%
5.4	BELANJA TRANSFER	577.839.999.650,00	577.180.515.434,00	99,89%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pendapatan	5.641.802.220,00	5.618.663.220,00	99,59%
5..02	Transfer/Bantuan Keuangan	572.198.197.430,00	571.561.852.214,00	99,89%

Sumber : BPPKAD 2023 (unaudited)

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

- b. Transfer dari Dana Cadangan
- c. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
- d. Penerimaan dana dari transfer deposito

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Transfer ke Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah yang disajikan merupakan informasi mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang pada Tabel berikut:

TABEL 1.12
Tabel Realisasi Pembiayaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Pembiayaan	422.517.543.138,00	423.617.292.585,41	100,26
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	453.817.543.138,00	453.917.292.585,41	100,02
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	416.217.543.138,00	416.217.543.138,41	100,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	99.749.447,00	0,00
6.1.06	Pencairan Dana Cadangan	37.600.000.000,00	37.600.000.000,00	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31.300.000.000,00	30.300.000.000,00	96,81
6.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
6.2.3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerir	6.300.000.000,00	5.300.000.000,00	84,13
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00
6.2.5	Transfer de Dana Deposito	0	0	0,00

Sumber : BPPKAD 2023 (unaudited)

1.3.8. Realisasi Belanja masing-masing SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan.

Sebagai dasar pertanggungjawaban atas kewenangan yang mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan, SKPD diminta untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai wujud pertanggungjawaban kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.13

Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI	%
1	1	1	DINAS PENDIDIKAN	802.876.855.075,00	694.110.397.253,00	86,45%
1	2	1	DINAS KESEHATAN	404.618.393.865,00	354.605.190.985,00	87,64%
1	2	2	RSUD. H.MOH ANWAR	170.583.231.938,00	143.749.800.090,00	84,27%
1	3	1	DINAS PU BINA MARGA	187.737.107.607,00	162.900.939.401,00	86,77%
1	3	3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	60.009.361.300,00	51.909.393.102,00	86,50%
1	5	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.577.353.047,00	12.856.775.876,00	88,20%
1	5	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.463.237.569,00	4.903.637.264,00	89,76%
1	6	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	31.294.422.433,00	26.927.596.056,00	86,05%
2	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	11.793.774.369,00	10.661.078.538,00	90,40%
2	3	1	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	117.389.323.381,00	108.292.852.377,00	92,25%
2	5	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.791.574.495,00	26.373.031.399,00	91,60%
2	6	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.727.828.485,00	9.802.343.950,00	91,37%
2	7	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.511.233.538,00	15.923.162.692,00	86,02%
2	10	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.538.789.033,00	17.040.160.987,00	91,92%
2	11	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27.077.526.494,00	22.998.136.965,00	84,93%
2	13	1	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	19.559.747.065,00	19.128.038.582,00	97,79%
2	17	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.140.887.154,00	4.896.337.981,00	95,24%

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI	%
3	1	1	DINAS PERIKANAN	17.390.000.373,00	15.116.272.784,00	86,93%
4	1	3	SEKRETARIAT DAERAH	53.467.807.720,00	50.716.816.582,00	94,85%
4	1	4	SEKRETARIAT DPRD	69.707.022.658,00	66.483.925.868,00	95,38%
4	1	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	47.423.816.864,00	45.653.793.024,00	96,27%
4	1	6	KECAMATAN KOTA SUMENEP	8.437.609.725,00	8.145.781.909,00	96,54%
4	1	7	KECAMATAN KALIANGET	2.702.337.210,00	2.146.644.864,00	79,44%
4	1	8	KECAMATAN TALANGO	2.794.240.515,00	2.266.733.771,00	81,12%
4	1	9	KECAMATAN MANDING	3.122.842.668,00	2.820.473.411,00	90,32%
4	1	10	KECAMATAN BLUTO	2.896.407.246,00	2.519.973.338,00	87,00%
4	1	11	KECAMATAN SARONGGI	3.003.117.431,00	2.654.475.397,00	88,39%
4	1	12	KECAMATAN LENTENG	2.280.313.546,00	2.130.651.574,00	93,44%
4	1	13	KECAMATAN GILIGENTENG	2.132.935.649,00	1.887.236.749,00	88,48%
4	1	14	KECAMATAN GULUK_GULUK	2.230.565.118,00	2.090.932.210,00	93,74%
4	1	15	KECAMATAN GANDING	2.426.812.519,00	2.296.711.019,00	94,64%
4	1	16	KECAMATAN PRAGAAN	2.438.563.592,00	2.259.639.675,00	92,66%
4	1	17	KECAMATAN RUBARU	2.399.711.153,00	2.109.873.893,00	87,92%
4	1	18	KECAMATAN AMBUNTEN	2.674.009.596,00	2.278.203.038,00	85,20%
4	1	19	KECAMATAN PASONGSONGAN	2.330.050.747,00	2.029.974.860,00	87,12%
4	1	20	KECAMATAN DASUK	2.402.364.716,00	1.911.914.491,00	79,58%
4	1	21	KECAMATAN BATANG_BATANG	3.088.328.946,00	3.015.390.600,00	97,64%
4	1	22	KECAMATAN BATUPUTIH	2.619.140.274,00	2.222.059.403,00	84,84%
4	1	23	KECAMATAN GAPURA	2.815.552.918,00	2.695.407.907,00	95,73%
4	1	24	KECAMATAN DUNGKEK	2.575.516.352,00	1.934.377.351,00	75,11%
4	1	25	KECAMATAN GAYAM	2.950.118.417,00	2.258.778.512,00	76,57%
4	1	26	KECAMATAN NONGGUNONG	2.643.658.072,00	1.952.342.195,00	73,85%
4	1	27	KECAMATAN RAAS	1.996.268.113,00	1.557.293.155,00	78,01%
4	1	28	KECAMATAN MASALEMBU	2.132.994.313,00	1.655.744.549,00	77,63%
4	1	29	KECAMATAN ARJASA	3.582.694.642,00	2.829.811.995,00	78,99%
4	1	30	KECAMATAN SAPEKEN	2.504.067.781,00	2.062.564.476,00	82,37%
4	1	31	KECAMATAN BATUAN	2.693.149.706,00	2.350.625.955,00	87,28%
4	1	32	KECAMATAN KANGAYAN	2.263.329.191,00	1.610.966.559,00	71,18%
4	2	1	INSPEKTORAT DAERAH	15.488.571.012,00	14.218.061.768,00	91,80%
4	3	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.347.680.173,00	10.459.893.086,00	92,18%
4	4	1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	652.302.458.746,00	630.317.226.500,00	96,63%
4	5	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.426.305.308,00	11.524.795.491,00	79,89%
TOTAL BELANJA DAERAH				2.892.381.009.858,00	2.597.264.241.457,00	87,61%

Sumber : BPPKAD 2023 (unaudited)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai pendanaan program pembangunan yang bertujuan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dipedomani dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan memperhatikan asumsi makro maupun acuan lain sebagai pedoman penyusunan APBD. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: 1) Pendapatan Daerah, 2) Belanja Daerah, dan 3) Pembiayaan Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD, apabila memenuhi ketentuan Pasal 161 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. keadaan darurat; dan/atau 5. keadaan luar biasa.

Seiring dengan berkembang dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2023 melalui pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar

kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja. Hal tersebut diantaranya untuk mengakomodir hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 yang mengalokasikan anggaran untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, serta program – program yang mendukung capaian kinerja bidang layanan dasar pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Penyesuaian terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ terkait Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023;
3. Penyesuaian terhadap Surat Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/ Kota Pada APBD Propinsi Jawa Timur TA 2023;
4. Penyesuaian terhadap Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440/807/102.1/2023 perihal Pagu Anggaran Definitif belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Kabupaten/ Kota Pada APBD Propinsi Jawa Timur TA 2023;
5. Penyesuaian terhadap Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 412.2/304/112.3/2023 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/ Kota Pada APBD Prov. Jawa Timur TA 2023;
6. Program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2023.

2.1. Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep antara lain : Meningkatkan tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan

Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara *online system* dan pembayaran dilakukan secara non tunai; Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah; Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep; Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep; Mengoptimalkan pengelolaan dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kegiatan pemutakhiran data base, perluasan kanal-kanal pembayaran serta pemberian insentif berupa penghapusan sanksi administrative PBB-P2.

Perubahan postur pendapatan daerah tahun 2023 didasarkan pada regulasi pusat maupun provinsi, diantaranya terkait Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), DBH CHT, Pajak Rokok. Selain itu terdapat penyesuaian pada sisi Pendapatan Asli Daerah. Secara garis besar perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel : 2.1

Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2023

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
		Rp.	Rp.	Rp.
4	PENDAPATAN DAERAH	2.420.643.286.694,00	2.469.863.466.720,00	49.220.180.026,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	243.711.344.026,00	264.091.553.099,00	20.380.209.073,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	37.584.478.999,00	38.098.700.000,00	514.221.001,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9.510.190.730,00	11.305.830.859,00	1.795.640.129,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.632.750.000,00	15.240.000.000,00	(392.750.000,00)
4.1.04	Lain-lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	180.983.924.297,00	199.447.022.240,00	18.463.097.943,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
		Rp.	Rp.	Rp.
				0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.163.718.107.568,00	2.188.363.978.521,00	24.645.870.953,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.057.125.428.334,00	2.078.777.432.332,00	21.652.003.998,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.592.679.234,00	109.586.546.189,00	2.993.866.955,00
				0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.213.835.100,00	17.407.935.100,00	4.194.100.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.213.835.100,00	17.407.835.100,00	4.194.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	100.000,00	100.000,00

Sumber : BPPKAD 2023 (unaudited)

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dan Transfer Pusat ke Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 243.711.344.026,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 264.091.553.099,- atau bertambah sebesar Rp. 20.380.209.073,- atau naik 8,36 persen.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas: (i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan (ii) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer pemerintah pusat ke

Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Target Pendapatan Transfer Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan sebesar 2.163.718.107.568,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.188.363.978.521,- bertambah sebesar Rp. 24.645.870.953,- atau naik 1,14 persen.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 13.213.835.100,- dan pada perubahan 2023 meningkat sebesar Rp 4.194.100.000,- sehingga menjadi Rp 17.407.935.100,-

2.2. Perubahan Penjabaran Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yaitu : 1) Urusan wajib pelayanan dasar, 2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar, serta 3) Urusan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah disusun oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional. Secara umum APBD Kabupaten Sumenep diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik.

Pada APBD tahun 2023 Pemerintah Daerah telah menetapkan target capaian kinerja yang harus tercapai pada akhir tahun anggaran, baik dari sisi program, kegiatan hingga sub kegiatan yang terbagi atas urusan dan SKPD pengampu masing-masing urusan.

Arah Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap nomenklatur kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK fisik dan non fisik) dan DBHC HT;
2. Penganggaran belanja yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi dan silpa DBH CHT;
3. Penganggaran terhadap hutang pihak III dan retensi;
4. Penganggaran Kembali silpa DAK fisik dan non fisik tahun 2021;
5. Penganggaran belanja dana khusus lainnya seperti Sisa Tunjangan Sertifikasi, Sisa Tunjangan non sertifikasi, Sisa Tunjangan khusus guru, Sisa Pajak Rokok, Sisa BLUD RSUD, serta Sisa dana BOS;
6. Penganggaran belanja prioritas daerah.

Pada perubahan APBD tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan penyesuaian sub kegiatan, kegiatan dan program sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2023 yang diarahkan untuk pencapaian kinerja layanan dasar pada bidang Pendidikan, Kesehatan serta Pekerjaan Umum beserta pendukungnya.

2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan pada semua OPD yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang dan Jasa, (iii) Belanja Subsidi, (iv) Belanja Hibah, (v) Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun 2023 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.858.953.430.512,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.036.318.079.977,- bertambah sebesar Rp. 177.364.649.465,- atau naik 9,54 persen.

Adapun Belanja Operasi, pada perubahan APBD tahun 2023 yang mengalami kenaikan/penurunan terdiri dari :

- Belanja Pegawai mengalami penyesuaian sebesar Rp. 30.263.917.859,-
- Belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp. 90.922.458.848,-
- Belanja Subsidi mengalami penurunan sebesar Rp. 3.380.000.000,-
- Belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar Rp. 64.546.360.758,-
- Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp. 4.988.088.000,-

2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran Belanja Modal Tahun 2023 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 216.270.677.950,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 272.119.840.966,- bertambah sebesar Rp. 55.849.163.016,- atau naik 25,82 persen.

Perubahan Belanja Modal pada pelaksanaan APBD tahun 2023 terdiri dari :

- Belanja modal tanah sebesar Rp. 6.161.366.125,-
- Belanja modal peralatan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.623.895.966,-
- Belanja modal Gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.709.109.319,-
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.508.138.606,-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.846.653.000,-

2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan sebagai pengeluaran atas beban APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sumenep pada Tahun 2023 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 6.103.089.265,- berkurang sebesar Rp. 8.896.910.735,- atau 59,31 persen.

2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp. 541.912.348.430,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 577.839.999.650,- bertambah sebesar Rp. 35.927.651.220,- atau naik 6,63 persen.

Secara umum belanja pada Perubahan APBD Kabupaten Sumenep tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel : 2.2

Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Tahun 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
		Rp.	Rp.	Rp.
5	BELANJA DAERAH	2.632.136.456.892,00	2.892.381.009.858,00	260.244.552.966,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.858.953.430.512,00	2.036.318.079.977,00	177.364.649.465,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.059.569.280.053,00	1.089.833.197.912,00	30.263.917.859,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.139.449.230,00	739.061.908.078,00	90.922.458.848,00
5.1.03	Belanja Bunga	0	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	2.620.000.000,00	(3.380.000.000,00)
5.1.05	Belanja Hibah	132.746.452.229,00	197.292.812.987,00	64.546.360.758,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.498.249.000,00	7.510.161.000,00	(4.988.088.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	216.270.677.950,00	272.119.840.966,00	55.849.163.016,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	6.161.366.125,00	6.161.366.125,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
		Rp.	Rp.	Rp.
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.372.315.595,00	77.996.211.561,00	20.623.895.966,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.268.826.635,00	87.977.935.954,00	9.709.109.319,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.089.621.720,00	91.597.760.326,00	14.508.138.606,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.539.914.000,00	8.386.567.000,00	4.846.653.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	6.103.089.265,00	(8.896.910.735,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	6.103.089.265,00	(8.896.910.735,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	541.912.348.430,00	577.839.999.650,00	35.927.651.220,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pendapatan	4.877.597.000,00	5.641.802.220,00	764.205.220,00
5.4.02	Transfer/Bantuan Keuangan	537.034.751.430,00	572.198.197.430,00	35.163.446.000,00

Sumber : BPPKAD 2023 (unaudited)

2.3. Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 terdiri dari Silpa DAU, DBH CHT, DID, DAK, Pajak Rokok, BLUD, BOS, BK Provinsi, Hutang pihak ketiga, serta hutang retensi. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan

daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 242.793.170.198,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 453.817.543.138,- bertambah sebesar Rp. 211.024.372.940,- atau naik 99,78 persen.

2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 31.300.000.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 31.300.000.000,- sehingga tidak terdapat penambahan maupun pengurangan pembiayaan.

Perubahan penjabaran pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 2.3

Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
		Rp.	Rp.	Rp.
6	Pembiayaan	242.761.870.198,00	422.517.543.138,00	179.755.672.940,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	242.793.170.198,00	453.817.543.138,00	211.024.372.940,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	242.793.170.198,00	416.217.543.138,00	173.424.372.940,00
6.1.06	Pencairan Dana Cadangan	-	37.600.000.000,00	37.600.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31.300.000.000,00	31.300.000.000,00	0,00
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
6.2.3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00

Sumber : BPPKAD 2023 (unaudited)

Secara umum Pembiayaan daerah pada APBD perubahan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 179.755.672.940 atau 74,05 persen dibandingkan sebelum perubahan.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni; Urusan Pemerintahan Absolut; Urusan Pemerintahan Konkuren; dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren atau Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Kewenangan diberikan kepada daerah agar dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan sesuai kewenangan daerah pada tahun anggaran 2023 dapat digambarkan dalam capaian kinerja Utama daerah, prioritas pembangunan daerah, kinerja utama perangkat daerah, serta hasil capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka pemerintah daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan dalam mewujudkan Visi dan Misi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu : 1) memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan 2) mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah berhasil dicapai atau belum, dan bahan evaluasi untuk menentukan langkah yang tepat dalam mempertahankan atau memperbaiki kinerja instansi pemerintah pada tahun mendatang.

Tabel. 3.1, Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

NO	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	68,49	69,13
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,11	5,35
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	18,76	18,70
4	Indeks Reformasi Birokrasi	62,45	70,15
5	Indeks Kesalehan Sosial	82,30	83,36

NO	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023
6	Indeks Infrastruktur	72,01	73,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023; KemenPAN dan RB, 2023;

Bappeda Kabupaten Sumenep, 2023

Dari tabel di atas terlihat capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumenep tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022 seluruhnya mengalami peningkatan. Uraian pencapaian dari masing-masing indikator kinerja utama pembangunan daerah Kabupaten Sumenep, dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk melihat kualitas penduduk yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar kehidupan layak (*decent standard of living*). Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel. 3.2, Indeks Pembangunan Manusia

No	Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39
2	Provinsi Jawa Timur	71,50	71,71	73,48	74,05	74,65
3	Kabupaten Sumenep	66,22	67,15	67,74	68,49	69,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Dari tabel di atas diperoleh data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebesar 69,13 dengan Komponen terdiri atas Angka Harapan Hidup sebesar 73,69; Rata-rata Lama Sekolah sebesar 5,94; Harapan Lama Sekolah sebesar 13,58, dengan Pengeluaran Perkapita sebesar 9.807.000,00. IPM Kabupaten Sumenep meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 68,49 atau naik sebesar 0,64 poin. Pengukuran IPM sejak tahun 2020 mengalami perubahan pada sisi usia harapan hidup yang sejak tahun 2020 berdasar pada hasil *Long Form* SP 2020 (SP2020-LF).

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kabupaten Sumenep terus mengalami pertumbuhan positif pasca Pandemi Covid-19, yang sebelumnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Dari hasil publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep sebesar 3,11% dan di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep meningkat menjadi 5,35%.

Tabel. 3.3, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nasional	5,02	2,97	3,69	5,31	5,05
2.	Provinsi Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
3.	Kabupaten Sumenep	3,80	-1,13	2,61	3,11	5,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Dari tabel diatas perkembangan ekonomi pasca pandemic Covid-19 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep terus tumbuh positif, hal ini tidak terlepas dukungan program pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat maupun daerah. Untuk tahun 2023, 5 (lima) besar sector pendukung utama PDRB adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (11,47%); jasa lainnya (10,83%); Transportasi dan pergudangan (10,30%); konstruksi (9,97%); pertambangan dan penggalian (7,16%).

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi hal serius yang perlu segera ditangani. Oleh sebab itu, pemerintah selalu melihat perkembangan data penduduk miskin di daerah setiap tahunnya. Pendataan tersebut terus dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk miskin yang berada diambang kemiskinan. Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel. 3.4, Persentase Penduduk Miskin

No	Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36
2.	Provinsi Jawa Timur	10,37	11,09	11,40	10,38	10,35
3.	Kabupaten Sumenep	19,48	20,18	20,51	18,76	18,70

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep menunjukkan kondisi fluktuatif selama periode 2019-2023, di tahun 2023 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Sumenep mampu menekan angka kemiskinan hingga mencapai 18,70% atau mengalami penurunan sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 18,76%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 206.100 jiwa, berkurang jika

dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 206.200 jiwa. Jika dilihat dari persentase dan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi, walaupun di dua tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini tentunya akan senantiasa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor.

3.1.4. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyongsong tantangan dimasa yang akan datang, Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta menyesuaikan tugas dan fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Berikut disajikan capaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep :

Tabel. 3.5. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep

No.	Indikator	Nilai	
		2022	2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	62,45	70,15

Sumber : KemenPAN dan RB, 2023

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 adalah **70,15** dengan kategori “**BB**” yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki kinerja yang **sangat baik** dalam hal tata kelola, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja aparatur, serta pengelolaan keuangan, serta menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

3.1.5. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks Kesalehan Sosial dihitung berdasarkan atas 3 (tiga) dimensi kesalehan sosial yaitu: (1) Nilai stabilitas sosial yang terdiri atas indikator ketentraman sosial dan penanganan konflik; (2) Nilai Solidaritas Sosial yang terdiri atas indikator pemberdayaan sosial, kepedulian, interaksi sosial, penanganan anak, perlindungan terhadap perempuan; (3) Nilai Gotong royong yang terdiri atas kontribusi dan toleransi. Dari hasil survey dan perhitungan indeks kesalehan sosial Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 - 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.6. Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep

No.	Aspek Nilai Indeks Kesalehan Sosial	Skor Indeks		
		2021	2022	2023
1.	Nilai Stabilitas Sosial	83,60	84,12	84,71
2.	Nilai Solidaritas Sosial	70,13	75,97	78,01
3.	Nilai Gotong royong	86,27	86,81	87,35
Skor Total		80,46	82,30	83,36

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumenep, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan. Meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga menciptakan suasana dan kondisi lebih aman dan kondusif yang merupakan salah satu modal penting pembangunan di Kabupaten Sumenep.

3.1.6. Indeks Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan pengalokasian

anggaran untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Besarnya anggaran yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang digunakan untuk menjalankan program pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan permukiman serta program pembangunan infrastruktur lainnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pelayanan infrastruktur terhadap peningkatan aktivitas perekonomian, ketimpangan wilayah serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, digunakan tiga strategi pendekatan, yaitu membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) sebagai nahkoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah, serta memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Tabel. 3.7. Indeks Infrastruktur Kabupaten Sumenep.

No.	Aspek Pengukuran Indeks Infrastruktur	Nilai		
		2021	2022	2023
1.	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	76,30%	76,79%	78,09%
2.	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	47,92%	48,63%	51,45%
3.	Indeks Infrastruktur Air Limbah	43,31%	43,68%	47,89%
4.	Indeks Infrastruktur Air Minum	4,20%	4,25%	4,81%
5.	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	69,95%	71,50%	71,96%
6.	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	28,00%	52,93%	58,00%
7.	Indeks Infrastruktur Drainase	67,90%	68,35%	89,02%
8.	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	22,53%	22,86%	28,57%
Indeks Infrastruktur		68,23%	72,01%	73,23%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2023

Dari hasil perhitungan Indeks infrastruktur Kabupaten Sumenep sebagaimana tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 mencapai 73,23 persen, sedangkan tahun 2022 yang mencapai 72,01 persen.

Kontribusi terbesar komponen penyusun indeks infrastruktur adalah indeks infrastruktur drainase sebesar 89,02 persen dan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 78,09 persen. Infrastruktur drainase dibangun untuk mengatasi genangan air dan banjir khususnya di perkotaan. Sedangkan infrastruktur jalan dan jembatan didukung melalui peningkatan jalan di kepulauan dan daratan untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas masyarakat terhadap ruang pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Sumenep akan terus berkomitmen meningkatkan pembangunan bidang infrastruktur setiap tahunnya, demi peningkatan akses bagi masyarakat.

3.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengukur keberhasilan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian setiap tahunnya, dengan menetapkan beberapa variable sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tersebut, sehingga capaian dari masing-masing tahapan dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian target kinerja yang ditetapkan oleh SKPD.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi dasar dalam penyusunan pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah yang dibagi dalam : 1) Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 2) Pelaksanaan Urususan Wajib yang

Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Pelaksanaan Urusan Pilihan dan 4) Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan gambaran pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dipilah berdasarkan bidang urusan pemerintah diantaranya : urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Program Dan Kegiatan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	92,28	92,28	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	34	34	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	17	17	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	17	17	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	28	28	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	Orang	4.455	4.455	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Laporan	14	14	-	-	-
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	kegiatan	6	6	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5	5	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang di penuhi	Item	3.641	3.641	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	13	13	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	43	43	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	300	300	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	100	100	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	-	-	-
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	2.022	2.022	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.100	2.100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	108	108	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	90	90	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga yang berakreditasi A	%	10,4	10,4	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio siswa dengan rombel SD	Rasio	16:01	16:01	-	-	-
					APK SD/MI/PAKET A	%	103,7	103,7	-	-	-
					APM SD/MI/PAKET A	%	92,75	92,75	-	-	-
					Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS	%	106,02	106,02	-	-	-
					Rasio siswa dengan guru SD	Rasio	11:01	11:01	-	-	-
					Persentase Angka Putus Sekolah SD	%	0,36	0,36	-	-	-
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Ruang	7	7	-	-	-
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	Ruang	7	7	-	-	-
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	25	25	-	-	-
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Unit	34	34	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	74	74	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	25	25	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	25	25	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	60	60	-	-	-
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	2	2	-	-	-
				Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa SD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	579	579	-	-	Perlu adanya pengawasan dan pertibatan serta Tindakan tegas terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan liar (pungli) pada saat penerimaan siswa baru dimulai dari Tingkat Sekolah Dasar
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	100	100	-	-	Segera lakukan regrouping sekolah yang jumlah siswanya tidak memenuhi standar minimal jumlah siswa. Sebagai contoh kecil hasil investigasi riil di lapangan ada sekolah yang terletak di Desa Batu Putih Desa Bun Barat dan Desa Basoka yang ternyata jumlah siswanya masih sangat minim sekali
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	30	30	-	-	-
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	5581	5581	-	-	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	70	70	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	650	650			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	650	650	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	650	650	-	-	-
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTS/PAKET B	%	105,05	105,04	-	-	-
					APM SMP/MTS/PAKET B	%	76,45	76,44	-	-	-
					Persentase Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA	%	94,36	94,35	-	-	-
					Persentase Angka Putus Sekolah SMP	%	0,36	0,36	-	-	-
					Rasio siswa dengan guru SMP	Rasio	11:01	11:01	-	-	-
				Rasio siswa dengan rombel SMP	Rasio	24:01:00	24:01:00	-	-	-	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	60	60	-	-	-
				Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	70	70	-	-	-
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	1	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	40	40	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	16	16	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	8	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	15	15	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	11	11	-	-	-
				Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	43	43	-	-	-
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	43	43	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	50	50	-	-	-
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1138	1138	-	-	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	270	270	-	-	-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	201	201	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	201	201	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	201	201	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Angka partisipasi kasar PAUD Formal	%	71,92	61,03	-	-	-
					Persentase Rasio ketersediaan lembaga terhadap anak PAUD usia 5-6 tahun	%	18,11	18,11	-	-	-
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	5	5	-	-	-
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	1	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	3	3	-	-	-
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	1700	1700	-	-	-
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	27271	27271	-	-	-
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	180	180	-	-	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	65	65	-	-	-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	991	991	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	991	991	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Orang	845.597	845.596	-	-	-
					Jumlah Lembaga PNF berizin	Lembaga	74	74	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	16	16	-	-	-
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	6899	6899	-	-	-
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	110	110	-	-	-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	90	90	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	540	540	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum paradigma baru jenjang SD dan SMP	Satuan Pendidikan	SD : 50, SMP : 60	SD : 50, SMP : 60	-	-	-
							Persentase satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum paradigma baru jenjang SD	Satuan Pendidikan	50	50	-
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum paradigma baru jenjang SMP	Satuan Pendidikan	60	60	-	-	-
				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	4	4	-	-	-
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Ketersediaan PTK di Semua Jenjang Pendidikan secara merata di kab. Sumenep	%	98,15	98,15	-	-	-
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Ketersediaan PTK di Semua Jenjang Pendidikan secara merata di kab. Sumenep	%	98,1	98,09	-	-	-
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki ijin Pendidikan	%	90,2	90,2	-	-	-
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang memenuhi ijin operasional	%	90	90	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	50	50	-	-	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	91,30	95	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	12	12	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	17	17	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	laporan	3	3	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	2	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	laporan	10	15	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1367	1303	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	laporan	3	3	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	171	171	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	jenis	7	7	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	6	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	19	19	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	36	36	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7	7	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	170	170	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	560	560	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	10.000	10.000	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	bulan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4800	4800	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	47	47	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	unit	8	8	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	46	46	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	4	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	/ 100.000 KH	91,3	70	<ul style="list-style-type: none"> > Penyediaan operasional untuk Puskesmas Pagerungan Besar, tidak terealisasi karena ijin operasional masih berproses. > Mobilitas masyarakat Kabupaten Sumenep yang tinggi, hamil di perantauan dan melahirkan di kampung halaman (Kab. Sumenep. > Kabupaten Sumenep sudah mengaktifkan UHC untuk masyarakat sumenep termasuk ibu hamil, bersalin, nifas dan BBL, sehingga penggunaan Jampersal beralih menjadi UHC pada saat UHC Kab. Sumenep sudah bisa digunakan. > Beberapa syarat paripurna tidak terpenuhi diantaranya berkunjung ke posyandu kurang dari 8x setahun (karena banyak balita di Kabupaten Sumenep ikut merantau bersama orangtuanya). > Anggaran pengadaan catride TCM dibekukan sesuai dengan Surat Dari Kementerian Kesehatan tanggal 21 Maret 2023 Nomor : PR01.06/A/20648/2023. 	<ul style="list-style-type: none"> > Tahun 2024 akan dilakukan pemeliharaan prasarana dan pendukung Puskesmas Pagerungan Besar. > Memberikan edukasi kepada ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin atau usia kehamilan di bawah 12 minggu sehingga K1 Murni tercapai dengan demikian K4 pun tercapai. > Ibu bersalin yang belum memiliki jaminan kesehatan, langsung didaftarkan PBID. > Memberikan edukasi kepada orangtua balita akan pentingnya datang ke posyandu dimanapun balita tersebut berada, karena selain untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan balitanya juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya seperti imunisasi dan pemberian vitamin A dan obat cacing sesuai jadwal. > Mendapatkan alokasi Catride TCM dari Kemenkes RI berupa barang. 	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar	%	60	70,16	-	-	-
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	526	526	-	-	-
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	48	48	-	-	-
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	3	3	-	-	-
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	2	2	-	-	-
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	unit	5	0	-	-	-
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	12	12 Paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna	%	10	97	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ibu hamil	14.194	13.156	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	ibu bersalin	13.549	13.475	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	bayi	13.458	13.026	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	balita	52.943	50.670	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	749.542	668.401	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	184.276	167.154	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	302.736	252.344	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	11.998	11.698	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	orang	14.338	14.338	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	18.782	21.289	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	10	10	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	4	4	-	-	-
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	dokumen	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	12	12	-	-	-
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	dokumen	12	12	-	-	-
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Puskesmas	30	30	-	-	-
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	dokumen	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	12	12	-	-	-
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	0	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	311.657	23.936	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melakukan pelaporan SIK	%	80	80	-	-	-
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	12	12	-	-	-
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi paripurna	RS	4	5	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	RS	5	5	-	-	-
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	30	30	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan	rasio	1:690	1:408	-	-	-
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	%	75	60	-	-	-
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	-	-	-
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	-	-	-
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	40	40	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	2	2	-	-	-
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	%	100	60	-	-	-
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	10	10	-	-	-
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi	%	80	82,03	-	-	-
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	rekomendasi	10	12	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan Stiker Lisensi Laik Higiene	%	30	30	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokumen	12	12	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga PURI	%	4,94	4,94	-	-	-
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	kegiatan	4	4	-	-	-
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	8	8	-	-	-
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Posyandu	/jumlah penduduk	21	21	-	-	-
				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	unit	1491	1492	-	-	-
		RSUD Dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	%	97	97	-	-	-
				Peningkatan Pelayanan BLUD	1. BOR 2. TOI 3. ALOS 4. CRR	% Hari Hari %	60- 85 1 - 3 3 - 6 0,8	65 2,08 3,88 1,14	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	10	10	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	401	401	-	-	-
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BOR	%	60- 85	65	-	-	-
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar	%	60	60	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	32	32	-	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	12	12	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	Dokumen	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	-	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	20	-	-	-
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	20	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	92	92	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	6	4	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pengelolaan Sumber Daya Air	%	51,36	51,45	-	-	-
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kabupaten/kota	Optimalisasi Penyediaan Air Baku dan mengurangi Dampak Negatif Daya Rusak Air	%	44,28 dan 34,94	44,28 dan 34,94	-	-	-
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman pantai lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	1	1	-	-	-
				Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1	0,96	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Embung	10	8	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	3	2,8	-	-	-
				Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	60,10	60,10	-	-	-
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0,5	0,5	-	-	-
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Paket	1	1	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	daerah irigasi	27	27	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%	5,63	4,81	-	-	-
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%	5,63	4,81	-	-	-
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Unit	100	35	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase jumlah sampah yang tertampung	%	43,04	43,04	-	-	-
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertampung (ton/hari)	%	43,04	43,04	-	-	-
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	100	74	-	-	-
				Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	1	6	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah domestik	%	57,41	47,89	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi rumah tinggal memiliki sistem Air Limbah domestik	%	57,41	47,89	-	-	-
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Unit	1	1	-	-	-
				Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Unit	1	1	-	-	-
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Unit	150	150	-	-	-
				Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	92	92	-	-	-
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	92	92	-	-	-
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Meter	500	500	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	500	500	-	-	-
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Gedung Negara Berkondisi Baik	%	74,76	71,96	-	-	-
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Berizin	%	92,62 %	92,62	-	-	-
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	-	-	-
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Gedung	5	5	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten/Kota	%	66,51	66,51	-	-	-
					Persentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten/Kota	%	88,92	88,92	-	-	-
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten/Kota	%	66,51	66,51	-	-	-
					Persentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten/Kota	%	88,92	88,92	-	-	-
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	4	4	-	-	Lakukan pemetaan kondisi jalan yang perlu diperbaiki antara yang rusak ringan, sedang maupun berat. Sehingga setelah diketahui kondisinya untuk segera dilakukan perencanaan perbaikan/pemeliharaan jalan tersebut
				Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	5	5	-	-	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	1	1	-	-	Bahwa untuk menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan yang baik dan untuk meningkatkan kualitas serta pelayanan perbaikan jalan keulauan di Kabupaten Sumenep. Maka Pansus merekomendasikan penggunaan Teknologi Aspal Buton (Asbuton)
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	10	10	-	-	-
				Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Meter	25	25	-	-	-
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meter	50	50	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase tertib jasa konstruksi	%	58.25	58.25	-	-	-
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil bersertifikat	%	12,76	12,76	-	-	-
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	25	25	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan informasi jakon	%	12,76	12,76	-	-	-
				Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Orang	25	25	-	-	-
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Ratio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	12,76	12,76	-	-	-
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang	%	28.57	28.57	-	-	-
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang	%	28.57	28.57	-	-	-
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RT RW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	DOKUMEN	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	%	28.57	28.57	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	DOKUMEN	1	1	-	-	-
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar di kab/kota yang ditangani	%	67,5	65	Ada beberapa target penerima bantuan yang tidak lulus saat dilakukan verifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan kesanggupan dalam berswadaya	Sisa anggaran akan dikembalikan ke kas daerah	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	50	50	-	-	-
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luas lahan yang dilakukan Peningkatan Kualitas pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Ha	1,6	1,6	-	-	-
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	240	224	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	15,44	15,44	-	-	-
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah luasan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	M2	10000	10000	-	-	-
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1	1	-	-	-
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	1	1	-	-	-
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	90	90	-	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	7	7	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	4	4	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun sesuai ketentuan	Laporan	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	Laporan	4	4	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	4	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Perangkat Yang Dipenuhi	Jenis	8	8	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/peneranganbangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan kantor yang disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	5	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	4	3	Untuk indikator jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 4 jenis tetapi terealisasi 3 jenis karena satpol pp hanya berlangganan 3 jenis koran	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	90	90	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Jenis	6	6	-	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor beroda dua	Unit	6	6	-	-	-
			Jumlah kendaraan bermotor khusus		Unit	1	1	-	-	-	-
			Jumlah Mebel yang diadakan		Paket	1	1	-	-	-	-
			Jumlah PC Desktop yang diadakan		Unit	3	3	-	-	-	-
				Jumlah Pengadaan Peralatan Komputer	Unit	4	4	-	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	Jenis	2	1	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	10	5	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik,Air, Telephon dan Internet	Rekening	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	95	49	Untuk indikator jumlah barang milik daerah dari target 95 unit dan terealisasi sebanyak 49 unit karena sudah sesuai dengan anggaran yang ada	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikelola	Unit	18	27	-	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	20	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	2	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	2	-	-	-
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas	%	90	90	-	-	-
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kegiatan	7	7	-	-	-
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	100	100	-	-	-
				Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	50	45	-	Untuk indikator jumlah pengamanan unjuk rasa dengan target 50 kali tetapi terealisasi sebanyak 45 kali karena kegiatan unjuk rasa yang terjadi di tahun 2023 hanya 45 kali dan honor dari tenaga kontrak	-
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	-	-	-
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Perda yang tegakkan	%	90	91	-	-	-
				Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/kelempok masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	24	24	-	-	-
				Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan yang dilakukan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Kali	48	0	-	Karena kegiatannya merupakan pelaksanaan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal yang bersumber dari Dana Pajak Rokok, sedangkan kegiatan dimaksud merupakan duplikasi dengan kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal yang bersumber Dana dari DBHCHT, sehingga sub kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	12	-	-	-
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Program Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	Indeks	180	146,4	Ada peserta yang berhalangan untuk hadir	Penambahan peserta sosialisasi untuk tahun yang akan datang	-
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	200	180	-	-	-
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan	Jenis	3	3	-	-	-
				Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Org	270	270	-	-	-
				Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten / kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Dokumen	15	15	-	-	-
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personel TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	Org	88	88	-	-	-
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	-	-	-
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran yang dilakukan.	%	80	80	-	-	-
				Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya	Persentase upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran yang dilakukan.	%	80	80	-	-	-
				Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	36	36	-	-	-
				Sub kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap Tahunnya	Dokumen	20	20	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana prasarana Kantor	%	100	88	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7	7	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	55	55	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	Orang	55	55	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	10	10	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan PSKS yang Dibina	%	4	4	-	-	-
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	%	73	81	Jumlah PSKS 67 Orang, sedangkan yang dibina sebanyak 64 Orang dikarenakan belum adanya anggaran untuk pembinaan	Adanya penambahan anggaran pendukung untuk melakukan pelatihan kepada PSKS yang belum mendapatkan pelatihan/pembinaan	-
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	39	22	Usulan hanya untuk 27 orang, namun cair 22 orang, 5 orang tidak muncul di perbup alamatnya	Diharapkan untuk kedepannya semuanya sesuai dengan BNBA dan tertuang di dlm perbup	-
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat rehabilitasi	%	2	4,30	-	-	-
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi	%	1	0,04	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar 1,447 dibantu 170, Anak Terlantar jumlah 1,446 dibantu 0, Lanjut Usia Terlantar jumlah 4554 dibantu 150, serta Gelandangan jumlah 14 dibantu 14, Pengemis jumlah 19 dibantu 19 dikarenakan <u>minimnya anggaran yang disediakan</u>	Diharapkan untuk kedepannya anggaran yang disediakan dapat meningkat	-
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kewenangan kabupaten / kota	Orang	200	105	Jumlah 35 pemberian bimbingan sosial kepada anak, 20 pemberian bimbingan fisik kepada disabilitas, 25 pemberian bimbingan fisik kepada disabilitas sebanyak 20 orang dan 5 orang kepada orang tua cota sesuai dengan anggaran yang ada	Diharapkan untuk kedepannya anggaran yang disediakan dapat meningkat	-
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi	%	1	0,80	Total jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis untuk tahun 2023 sebanyak 7.510 Orang. Pemberian bimbingan 300 orang, 41 bimbingan monitoring bimbingan lanjutan, 6000 orang penguatan kepada wanita lansia sehingga diperlukan tambahan dana untuk mencukupi masyarakat yang membutuhkan bantuan	Diharapkan untuk kedepannya anggaran yang disediakan dapat meningkat	-
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi	%	1	1	-	-	-
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	375	Jumlah peserta desa bersinar 300 orang, razia 15 orang, pencegahan narkoba 50 orang dan razia ke - II, 10 orang. Diharapkan tahun depan ada penambahan anggaran untuk <u>memaksimalkan kegiatan</u>	Diharapkan untuk kedepannya anggaran	-
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kab/kota	Orang	100	100	jumlah orang yang terlayani PMKS	-	-
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan kab/kota	Orang	400	297	190 mahasiswa yg mendapat bantuan I dan 107 bantuan ke 2	Diharapkan untuk kedepannya anggaran yang disediakan dapat meningkat	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang terlindungi dari resiko kerentanan sosial	%	85	99,92	Untuk bantuan ekonomi masyarakat yang sumbernya dari PKH (APBN) tahun 2023 sebanyak 46.921 dan bantuan keluarga yang berasal dari dana cukai sebanyak 3.150 Keluarga. Sedangkan masyarakat yang perlu bantuan masih di atas jumlah tersebut	Diharapkan untuk kedepannya anggaran yang disediakan dapat meningkat	-
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase meningkatnya akurasi ketepatan sasaran KPM	%	88	99,92	-	-	-
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.740	50.071	Untuk bantuan ekonomi masyarakat yang sumbernya dari PKH (APBN) tahun 2023 sebanyak 46.921 dan bantuan keluarga yang berasal dari dana cukai sebanyak 3.150 Keluarga. Sedangkan masyarakat yang perlu bantuan masih di atas jumlah tersebut	Diharapkan untuk kedepannya anggaran yang disediakan dapat meningkat	-
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Terhadap Total Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial	%	100	95	-	-	-
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota	%	100	96	-	-	-
				Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota	Orang	200	125	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Ketersediaan Makam yang Layak bagi Perintis Kemerdekaan dan Veteran	%	100	99,50	-	-	-
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	99,50	-	-	-
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	38	38	-	-	-
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	4,94	4,94	Terdapat beberapa pengembalian (STS) belanja langsung pada sub kegiatan tertentu karena kode rekening belanja tidak sesuai dengan peruntukannya	Dilakukan pengembalian ke KAS Daerah akibat hal tersebut dan akan dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran terhadap beberapa kode rekening belanja	-
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat	Org	85	80	-	-	-
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	Org	80	80	-	-	-
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi	%	85	97,19	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Keg	42	42	-	-	-
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	%	3,5	100	-	-	-
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Keg	82	82	-	-	-
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	75,51	20	Anggaran di gunakan dalam rangka money kegiatan BK Khusus Desa (AP)	Anggaran selanjutnya akan dilakukan rasionalisasi pada beberapa sub belanja sesuai kebutuhan Money	
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja	%	41,26	20	-	-	
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Org	30	30	-	-	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan	%	100	100	-	-	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB	Perusahaan	27	27	-	-	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	27	27	-	-	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan	%	84	84	-	-	
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Keg	22	22	-	-	
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Org	2274	2274	-	-	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender	%	1	1	Anggarannya hanya untuk OPD saja sebanyak 24 OPD. Tidak termasuk kecamatan	Diharapkan adanya tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	-
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja APBD	%	20	20	-	-	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	51	24	Anggarannya hanya untuk OPD saja sebanyak 24 OPD. Tidak termasuk kecamatan	Diharapkan adanya tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok dan organisasi perempuan yang diberdayakan	%	70	70	-	-	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	3	3	-	-	-
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase rasio kekerasan perempuan termasuk TPPO	%	3,39	0,43	Tahun 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 23 kasus. Untuk tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 10 kasus. Terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 13 kasus	Adanya penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat	-
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan	%	3,39	0,43	Tahun 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 23 kasus. Untuk tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 10 kasus. Terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 13 kasus	Adanya penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	untuk anggaran bersifat disediakan, sehingga pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan di lapangan	Adanya penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	10	2	Anggaran terkena recofusing sehingga target yang dicapai hanya 2 desa / OPD	Diharapkan adanya tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	-
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja APBD	%	13	0,20	Anggaran yang disediakan masih belum mencerminkan responsif gender	Diharapkan adanya tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	untuk anggaran bersifat disediakan, sehingga pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan di lapangan	Anggaran harus selalu disediakan setiap tahunnya guna mengantisipasi kasus yang akan ada	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi	%	1	1	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	20	40	Dalam bentuk Diskusi panel dengan pak bupati tentang upaya pencegahan degradasi moral yang diikuti oleh Lembaga. Wartawan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Namun jumlah peserta masih terbatas	Diharapkan adanya tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	25	10	Untuk anggaran bersifat disediakan, sehingga pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan di lapangan	Diharapkan adanya tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	-
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase menurunnya kasus KDRT	%	0,005	0,43	Tahun 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 23 kasus. Untuk tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 10 kasus. Terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 13 kasus	Adanya penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat	-
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus KDRT yang tertangani	%	100	100	-	-	-
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	-	-	-
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Strata Kabupaten Layak Anak	madya	madya	madya	-	-	-
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Layak Anak	%	19,16	19,16	-	-	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	20	20	-	-	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah pelapor dan pelopor	%	0,24	0,24	-	-	-
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	75	-	-	-
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif	%	100	100	terdapat Kekerasan terhadap anak tahun 2022 sebanyak 17 kasus. Tahun 2023 meningkat menjadi 23 Kasus	Perlu adanya sosialisasi yang intens agar kasus kekerasan terhadap anak menjadi berkurang	-
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap anak	%	5,86	5,86	-	-	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	3	20	Jumlah peserta dari unsur kepala desa, pkk, unsur aparata desa, tokoh masya, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, perwakilan anak. Diharapkan adanya penambahan anggaran agar kegiatan dapat berjalan dengan lebih maksimal	Diharapkan adanya penurunan korban kekerasan terhadap anak	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Layanan yang Tersedia	%	83,33	83,33	-	-	-
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	23	korban yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 23 orang	Diharapkan adanya penurunan korban kekerasan terhadap anak	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	20	23	Jumlah korban yang mendapatkan pendampingan sebanyak 23 orang	Diharapkan adanya penurunan korban kekerasan terhadap anak dan adanya tempat khusus layanan yang representatif	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan khusus anak yang terstandarisasi	Lembaga	3	1	Hanya ada 1 lembaga yang menyediakan layanan yaitu UPT. Dinas sosial	Diharapkan ada penambahan lembaga khusus untuk penyediaan layanan khususnya di kecamatan atau desa	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	-	-	-
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah	%	100	100	Pengelolaan lumbung pangan tidak berjalan optimal	Peningkatan movev dan pendampingan pengelolaan lumbung	-
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pendukung kemandirian pangan yang tersedia	unit	3	3	-	-	-
				Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	Unit	1	1	-	-	-
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Unit	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan	skor	72,18	72,2	Berkurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal (umbi-umbian)	Inovasi pengolahan pangan lokal menjadi jajanan kekinian	-
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Data penyediaan dan penyaluran pangan kabupaten	dokumen	12	12	-	-	-
				Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	Laporan	4	4	-	-	-
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan gizi masyarakat per kapita per tahun yang dicapai	kkal/kapita/ tahun	1.850	2.770	-	-	-
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%	100	100	Rendahnya intervensi di daerah rawan pangan	Penguatan koordinasi lintas sector untuk pengentasan daerah rawan pangan	-
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun	dokumen	1	1	-	-	-
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	87	95	Pemahaman pentingnya mengkonsumsi pangan yang aman masih kurang	Peningkatan edukasi keamanan pangan untuk produsen dan konsumen	-
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Dokumen	2	2	-	-	-
				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	-	-	-
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	100	100	-	-	-
				Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kasus yang ditangani	Kasus	1	1	-	-	-
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan	%	90	45	Pengadaan tanah (Bundaran Pintu Masuk Kota di Kec. Pragaan) tidak terealisasi karena tidak ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya	-
				Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masalah ganti rugi yang diselesaikan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	5	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong Pemerintah yang Dikelola	%	40	40	-	-	-
				Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang Diinventarisasi dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	1	1	-	-	-
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	2	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	4	Adanya PMK Nomor 212, sehingga ada perubahan sub kegiatan	Dilakukan perubahan sub kegiatan disaat mendahului PAK	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	3	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	laporan	12	14	Adanya gaji bulan ke-13 dan bulan ke-14	Dilakukan penambahan laporan keuangan gaji bulan ke-13 dan bulan ke-14	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	115	105	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	laporan	12	4	Adanya laporan teptra per Triwulan	Dilakukan pelaporan Teptra per Triwulan	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	-	-	-
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pendapatan yang disusun	laporan	1	1	-	-	-
				Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	laporan	1	1	-	-	-
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	1	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	147	165	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dpenuhi	Jenis	100	100	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	50	48	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	100	100	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	100	100	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	paket	100	100	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	15	15	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	85	Belanja perdin bersifat penyediaan	Dilakukan perdin sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	50	50	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang direncanakan	%	90	90	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang direncanakan	%	90	90	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	48	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	20	20	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	%	90	90	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Air	%	77,1	77,1	-	-	-
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%	83,25	90	Adanya peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Dilakukan penambahan realisasi terhadap pelayanan	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen	38	38	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Sampel	400	450	Adanya penambahan pelayanan pengujian kualitas lingkungan terhadap usaha/kegiatan	Dilakukan penambahan layanan pengujian laboratorium lingkungan	-
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase dokumen penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	71,2	71	Adanya pengurangan penanggulangan pencemaran	Dilakukan penyesuaian realisasi penanggulangan pencemaran	-
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kab/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	2	2	-	-	-
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	12	12	-	-	-
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	72,8	75	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan / atau Provinsi dan / atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	25	25	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kehati yang terkelola	%	30	30	-	-	-
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Kehati yang masih lestari	Lokasi	7	7	-	-	-
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kab / Kota	Ha	4	4	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang dikelola	%	37,5	37	Adanya pengurangan persentase pengendalian Limbah B3	Dilakukan penyesuaian realisasi pengendalian Limbah B3	-
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	75	75	-	-	-
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	10	10	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kader lingkungan yang berasal dari kesadaran mandiri	Kader	15	20	Adanya penambahan kader yang dilatih	Kader yang dilatih melakukan swadaya secara mandiri	-
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	%	95,48	100	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/Insitusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	lembaga	57	55	Adanya ketidaksamaan kemampuan lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	Pelatihan terhadap lembaga disesuaikan dengan kondisi kebutuhan riil di lapangan	-
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kader	35	35	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan pengelolaan persampahan	%	55,5	50	Adanya pengurangan persentase pengelolaan persampahan	Masyarakat didorong untuk melakukan pengurangan sampah secara 3R	-
				Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	55,5	50	-	-	-
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten /Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Ton	10	20	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten / Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota.	Dokumen	5	5	-	-	-
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	1	1	-	-	-
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	12	12	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	3	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	56	54	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	jenis	3	3	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	101	101	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	macam	13	13	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	10	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	paket	2	2	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	7	7	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	50	50	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	64	64	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	layanan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	41	41	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	41	41	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	100	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	5	5	-	-	-
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	81	81	-	-	-
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang terlayani	dokumen	63000	63000	-	-	-
				Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	dokumen	12	9	-	-	-
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	45.000	45000	-	-	-
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pendaftaran penduduk dan peristiwa penting penduduk	kali	12	12	-	-	-
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	dokumen	12	12	-	-	-
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	90	90	-	-	-
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pencatatan sipil dan peristiwa penting penduduk	laporan	12	12	-	-	-
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	laporan	12	12	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas SIAK dan Pembantu REDES yang mengikuti Pembinaan dan Pengawasan	%	95	95	-	-	-
				Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	laporan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan	%	74	57	<ul style="list-style-type: none"> > Proses persetujuan perjanjian kerjasama dari pusat yang relative lama. > OPD pengguna merasa kurang membutuhkan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan. > Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, Pihak Kedua wajib menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program sehingga membutuhkan anggaran yang relatif besar dan proses yang cukup sulit sehingga ini membebani pihak kedua. 	<ul style="list-style-type: none"> > Memfasilitasi seluruh Proses kerja sama mulai pengajuan permohonan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Data Kependudukan siap untuk L53 diakses OPD Pengguna. > Mendatangi OPD pengguna dan memberikan sosialisasi secara langsung tentang manfaat dari kerja sama M52 	
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Frekuensi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan	kali	2	1	-	-	-
				Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	dokumen	14	13	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Operator yang dibina	%	100	100	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	12	12	-	-	-
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase terseleng garanya program penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	Bertambahnya Roda Dua yang dalam Kondisi Rusak Berat	Akan dilakukan Usulan Penghapusan Barang Inventaris Kantor	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterca paian perencanaan dan evalua si kinerja OPD	%	100	100	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyele saian laporan kinerja OPD tepat waktu	%	100	100	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembavaran gaji dan tunjangan ASN	Orang	40	40	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	Laporan	2	2	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan yang dipenuhi	%	0,25	0,25	-	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	60	-	-	-
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas bagi ASN	Orang	3	4	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan yang dipenuhi	%	100	100	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	Paket	7	7	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Paket	2	1	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	7	7	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Laporan	30	30	-	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Jenis Barang yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa layanan yang dipenuhi	%	100	100	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar tiap Bulan	Laporan	2	2	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100	100	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Unit	40	43	-	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	42	42	-	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang terpelihara	M2	1.000	1.000	-	-	-
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa	%	12,77	11,39	Jumlah Desa yang diintervensi dalam Penataan Desa hanya terfokus kepada Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Diupayakan untuk menambah kegiatan yang berhubungan dengan penataan desa (Fasilitasi Penataan Batas Desa)	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Desa	Desa	295	247	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Balai Desa Yang direhab	Desa	40	40	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	% Desa yang menyelenggarakan Kerjasama Desa	%	33,33	27,4	Kurangnya Perhatian Pemerintah dan Masyarakat luas dalam pengembangan kawasan perdesaa, Hal ini akan berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat perdesaan	Membangun BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) bersama. BUMDesa merupakan bentuk organisasi yang terdiri dari warga desa yang berfungsi sebagai pengelola usaha dan kegiatan ekonomi di desa. Dalam BUMDesa, masyarakat perdesaan dapat bekerja sama untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidupnya. Membangun BUMDesa, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah dapat memberikan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase Bumdes Maju	%	6,36	10,61		bantuan dalam hal permodalan dan penyediaan infrastruktur. Sedangkan masyarakat dan sektor swasta dapat membantu dengan memberikan dukungan berupa keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan usaha. Dengan membangun BUMDesa bersama, diharapkan kawasan perdesaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. BUMDesa mampu memberikan peluang kepada masyarakat perdesaan untuk menghasilkan pendapatan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkokoh keberlangsungan ekonomi kawasan desa.	
				Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah BUMDes Bersa ma yang terbentuk Jmlah BUMDes berkem bang menjadi maju	Bumdesma Bumdes	28 21	23 35	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Perdes / Permakades	Dokumen	3	3	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	2	2	-	-	-
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	%	50,87	59,82	-	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg dilaku kan Pembinaan & Pe ngawasan dim Penye lenggaraan Adm Desa	Desa	330	330	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	330	325	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang dibi na dalam pengelolaan keuangan Desa	Desa	330	330	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemi lihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa	2	4	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Desa	330	330	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manaie men Pemerintahan Desa	Dokumen	330	330	-	-	-
				Pelaksanaan Penuga san Urusan/ Kewena ngan Kab / Kota yang Dilaksa nakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupa ten/Kota yang Dilaksa nakan oleh Desa	Dokumen	7	14	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif Persentase Lembaga Adat Desa yang terbentuk	% %	61,53 5,39	56,66 5,39	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pem berdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	Jumlah LKD yg terbentuk berdasarkan Per UU	LKM	5373	5918			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah LAD terbentuk berdasarkan Per UU	LAD	18	18			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Jumlah Kelompok Binaan PKK	LKM / RT Kelompok	35 63	35 63			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1			
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Mandiri	%	10	44,39			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang tersedia Profil KKBPK	kecamatan	11	11			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	12	12			
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	12	12			
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah bulan laporan	bulan	12	12			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)	%	70,39	59,44	Angkar DO (Droup Out) Peserta KB cukup tinggi, Kurangnya Tenaga Penyuluh KB yang saat ini 1 : 17 yang artinya 1 Penyuluh KB membina 17 Desa yang standarnya 1 : 3 bahkan ada 7 Kecamatan yang tidak mempunyai Penyuluh KB, Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB melalui Aplikasi SIGA belum maksimal, 7 Kecamatan yang tidak ada Penyuluh KB	Mengadakan Pelayanan KB gratis khususnya MKJP, Memanfaatkan momen untuk mengadakan Pelayanan KB, Mengupayakan tambahan Penyuluh KB, Mengupayakan operator Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB melalui Aplikasi SIGA, Meningkatkan sosialisasi KB, Meningkatkan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat	
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	%	40	40			
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi	organisasi	10	10			
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media KIE yang digunakan	Media	4	4			
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kegiatan yang dilakukan	kegiatan	4	4			
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang difasilitasi	Balai Penyuluhan	26	26			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah bulan pelaporan yang dihasilkan	Bulan	12	12	-	-	-
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga PKB/ PLKB dan Kader IMP yang aktif	%	100	100	-	-	-
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	260	260	-	-	-
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang difasilitasi	orang	668	668	-	-	-
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes (Fasilitas Kesehatan) teregister yang difasilitasi	%	100	100	-	-	-
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang difasilitasi	Faskes	59	34	-	-	-
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	120 1026	120 1026	-	-	-
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana KB yang disediakan Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit	6	6	-	-	-
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah pembinaan pelayanan KB yang dilaksanakan	kecamatan	4	4	-	-	-
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	orang	20	20	-	-	-
				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	orang	150	150	-	-	-
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan berKB	%	100	100	-	-	-
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	Kampung KB	67	67	-	-	-
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	laporan	12	12	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	%	80	119,66	-	-	-
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan Aktif	%	100	80	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang dibeli	Paket	30	30	-	-	-
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang aktif	orang	2.514	2.466	-	-	-
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok PIK R yang aktif	Kelompok	54	45	-	-	-
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Aktif dalam Pembangunan Keluarga	%	100	100	-	-	-
				Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebijakan yang dihasilkan	Kebijakan	3	3	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batuan)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	80,01	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Batuan)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	66,10	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pragaan)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	85,42	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Pragaan)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	91,81	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bluto)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	90,34	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Bluto)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	82	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kaliangot)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	88,88	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Kaliangot)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	86,68	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Talangol)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	87,25	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Talangol)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	79,55	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pandian)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	91,3	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Pandian)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	60,75	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rubaru)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	95	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Rubaru)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	79,15	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Legung)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	96,88	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Legung)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	90,48	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dasuk)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	94,72	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Dasuk)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	87,68	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Manding)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	91,76	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Manding)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	72,96	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Moncek)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	89,30	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Moncek)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	77,75	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lenteng)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	82,82	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Lenteng)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	75,51	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batang-Batang)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	89,23	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Batang-Batang)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	67,19	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Saronggi)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	72,05	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Saronggi)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	72,59	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pamolokan)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	97,81	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Pamolokan)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	80,14	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dungkek)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	81,89	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Dungkek)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	75,31	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ambunten)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	83,92	-		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Ambunten)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	84,18	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pasongsongan)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	80,79	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Pasongsongan)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	91,73	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batu Putih)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	86,28	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Batu Putih)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	68,08	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gapura)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	89,92	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Gapura)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	65,86	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Guluk-Guluk)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	91,88	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Guluk-Guluk)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	59,18	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ganding)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	80,32	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Ganding)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	77,75	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Raas)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	75,58	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Raas)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	62,36	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Giligenting)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	64,57	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Giligenting)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	83,83	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Nonggunong)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	77,20	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Nonggunong)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	75,04	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gayam)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	65,03	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Gayam)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	69,42	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ariasa)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	85,61	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Arjasa)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	71,76	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kangayan)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	91,22	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Kangayan)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	68,49	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sapeken)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	71,94	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Sapeken)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	65,38	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Masalembu)	Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD	%	100	62,97	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas Masalembu)	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM Essensial Puskesmas	%	100	83,83	-	-	-
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	3	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	4	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	6	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	13	13	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	114	114	-	-	-
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	4	4	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	1	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Laporan	2	2	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	2	2	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	4	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2	2	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	110	110	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	5	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	12	12	-	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	117	117	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	Unit	2	2	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	111	111	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	4	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	Tagihan listrik bulan November yang tertagih di bulan Desember belum terbayarkan karena anggaran yang tersedia lebih kecil dari tagihannya	Akan dibayarkan di tahun berikutnya	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	69	69	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	35	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	32	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan	%	60	60	-	-	-
					Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan	Km/Jam	30	30	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan Perlengkapan Jalan	Item	5	5	-	-	-
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang diadakan	Unit	13	13	-	-	-
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terchabilitasi dan Terpelihara	Unit	4424	4424	-	-	-
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang diuji berkala	%	82,5	80	-	-	-
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Unit	4000	3771	-	-	-
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Dokumen	2000	2000	-	-	-
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Unit	13	13	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Laporan	30	30	-	-	-
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	6	6	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	37	37	-	-	-
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	-	-	-
				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Andalalin	Rekom	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	6	6	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi	Unit	255	245	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rata-rata Load Factor Angkutan Penyeberangan	%	60	60	-	-	-
					Persentase Prasarana Pelayaran yang dapat Berfungsi	%	75	75	-	-	-
				Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan	Rekom	1	1	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	Pencairan subsidi kepada PT. Sumekar belum bisa dilaksanakan untuk termin terakhir	Akan dibayarkan di tahun berikutnya	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Izin yang terfasilitasi	Rekom	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Laporan	1	1	-	-	-
				Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Proporsional	Unit	3	3	-	-	-
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	Unit	2	2	-	-	-
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	Unit	5	5	-	-	-
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	Laporan	12	12	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase izin yang terfasilitasi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	%	100	0	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter tidak terealisasi karena pembangunan fisik air strip di Masalembu belum selesai sehingga uji coba penerbangan tidak terlaksana	-	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Izin yang terfasilitasi	Rekom	1	0	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	Dokumen	1	0	-	-	-
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	92	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Paket	1	1	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	Jenis	4	4	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	Jenis Paket	35 2	35 2	- -	- -	- -
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	17	17	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Jumlah Rapat	250	250	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	25	25	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Unit	25	25	-	-	-
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik	%	85	80	-	-	-
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konten yang dikelola oleh perangkat daerah	Dok	65	65	Monitoring dan Evaluasi yang belum terlaksana secara optimal	Perlu dilakukan monev	-
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dok	40	40			
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dok	40	40			
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dok	85	85			
					Jumlah Layanan Hubungan Media	Media	30	30			
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dok	85	85			
					Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dok	40	40			
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik dari media massa, media sosial, dan pendapat umum	Dok	40	40	Makin berkembangnya teknologi media dan media sosial	Perlu nya kegiatan literasi digital	-
				Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	90	90				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi yang diproduksi	Konten	730	730	Makin meningkatnya volume informasi yang harus disampaikan	Perlunya monitoring media dan media sosial	-
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media informasi dan komunikasi yang dikelola	Media	5	5	Kebutuhan peralatan penunjang	Perlunya peralatan penunjang	-
				Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permintaan informasi yang dapat diselesaikan	%	80	80	Daftar Dokumen Informasi Publik yang belum lengkap	Monev Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi	-
				Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama publikasi dengan media	Media	30	30	Monitoring dan Evaluasi yang belum terlaksana secara optimal	Perlu dilakukan monev	-
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Prosentase sengketa informasi yang dapat diselesaikan	%	80	80	Monitoring dan Evaluasi yang belum terlaksana secara optimal	Perlu dilakukan monev	-
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	77	60	-	-	-
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama omain Pemerintah Kabupaten/Kota	Instansi	77	154	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Instansi	35	105	-	-	-
					Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Instansi	50	150	-	-	-
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Instansi	45	135	-	-	-
					Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Data	45	135	-	-	-
					Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dok	15	45	-	-	-
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dok	20	60	-	-	-
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Dok	20	60	-	-	-
					Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Instansi	35	105	-	-	-
					Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	20	60	-	-	-
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat daerah yang sudah mempunyai admin dalam melaksanakan one data Kabupaten	%	100	80	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terhubung layanan pemerintahan berbasis elektronik	%	100	75	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terhubung layanan pemerintah berbasis elektronik	%	100	80	-	-	-
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	Anggaran Gaji pegawai tidak terserap karena tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan Analisa jabatan secara menyeluruh	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	8	8	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	4	4	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	87	88	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang disediakan	%	90	90	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	%	90	90	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit	17	17	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	10	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Jasa layanan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	46	46	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	92	92	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	-	-	-
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi yang telah diawasi dan diperiksa	%	20	20	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan anggaran Kas	-
				Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Periksa dan diawasi	Unit Usaha	200	200	-	-	-
				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	100	100	-	-	-
				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Unit Usaha Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	100	100	-	-	-
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	6.5	6.5	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan anggaran Kas	-
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	10	10	-	-	-
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	10	10	-	-	-
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	10	10	-	-	-
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peserta yang lulus dengan predikat baik	%	80	80	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan anggaran Kas	-
				Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	orang	200	200	-	-	-
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	orang	200	200	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	6	6	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan anggaran Kas	-
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Koperasi	100	100	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya	%	7	7	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan angrgan Kas	-
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pemberdayaan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Unit Usaha	300	300	-	-	-
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	100	100	-	-	-
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	100	100	-	-	-
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	100	100	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang di kembangkan usahanya	%	5	5	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan angrgan Kas	-
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha kecil	Unit Usaha	100	100	-	-	-
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran. Sdm, serta desain dan teknologi	Unit Usaha	100	100	-	-	-
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	Pada kegiatan dan sub kegiatan rutin bersifat penyediaan sesuai dengan kebutuhan anggaran yang direncanakan	Dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran pada masing-masing sub kegiatan setiap tahunnya	-
				Pencanaan ,Penggangan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penaggangan dan ewalusi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	12	12	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranekat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peranekat Daerah	dokumen	3	3	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	4	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	laporan	60	60	-	-	-
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjan	ASN	72	72	Gaji dan Tunjangan ASN di sediakan	Penyediaan gaji dan tunjangan penyesuaian, anggaran merupakan kewenangan TAPD sesuai dengan jumlah kebutuhan ASN dan PPPK	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Layanan	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya	Jumlah stel pakaian dinas dan atribut yang disediakan	paket	98	97	-	-	-
				Administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	96	90	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	6	-	-	-
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	-	-	-
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	-	-	-
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	Terdapat rekening belanja yang tidak mencapai target yaitu belanja media/iklan/reklame yang sifatnya disediakan	Akan dilakukan perencanaan yang tepat terhadap belanja tersebut sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	-
				Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	136	136	-	-	-
				Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12	12	-	-	-
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	5	5	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	-	-	-
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1000	3215	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Belanja listrik dan jaringan internet disediakan setiap tahunnya	Belanja listrik dan internet tetap disesuaikan dengan tagihan bulanan terhadap belanjanya tersebut	-
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	17	17	-	-	-
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah	%	100	100	-	-	-
				penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	36	28	Penyediaan pajak kendaraan, BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan operasional	Untuk anggaran tahun selanjutnya akan dilakukan rasionalisasi terhadap kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	-
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	63	59	Peralatan yang dipelihara adalah PC, Printer dan AC pada masing-masing ruangan sejumlah 59 unit	Anggaran pemeliharaan peralatan pada tahun selanjutnya akan dilakukan penyesuaian kebutuhan pemeliharaan unit peralatan yang akan dipelihara	-
				Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	-	-	-
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	3,61	3,61	-	-	-
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	media	5	3	-	-	-
				Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	-	-	-
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	3,61	3,61	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	NIB	6,173	18.569	-	-	-
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	NIB	6,173	18.569	Penigkatan NIB yang diterbitkan sangat tinggi dua kali lipat dari target yang ditetapkan, semakin tinggi kesadaran pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	DPMPSTP selalu mendorong kepada pelaku usaha/masyarakat untuk selalu mengurus legalitas kegiatan usahanya melalui Pembinaan dan Pengawasan	-
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pelaku usaha	24	24	-	-	-
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	orang	11	15	Dari target 11 pengaduan pada tahun 2023, terealisasi 15 pengaduan yang masuk dan dilakukan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut	Setiap pengaduan yang masuk segera ditindaklanjuti terhadap permasalahan yang dilaporkan oleh tim pengaduan perizinan	-
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha berizin yang Beroperasi Sesuai dengan Izin Usaha	Pelaku usaha	6,173	18.569	Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik lebih banyak menyesuaikan dengan agenda kegiatan yang lain dan sumberdaya yang ada sangat terbatas	Akan dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan sumberdaya yang ada guna menunjang realisasi kegiatan DAK Non Fisik	-
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	Pelaku usaha	6,173	18.569	-	-	-
				Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	35	35	-	-	-
				koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	240	240	-	-	-
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan	101	85	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	87	87	-	-	-
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	%	100	100	-	-	-
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Data	4	4	-	-	-
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	10	2	Karena peruntukannya dialihkan pada alat dan mengurangi jumlah orang, Proses seleksi tidak diminati sehingga menggunakan proses penunjukan	Perencanaan program kegiatan harus disusun sesuai dengan program kegiatan	-
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor/wirausaha muda pemula/pemuda kader yang dibina	Orang	700	116	-	-	-
				Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	25	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Sainnya	Orang	700	40	-	-	-
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	75	75	-	-	-
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang diberdayakan/dibina	organisasi	21	21	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	6	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga	%	25	58	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	organisasi	1	1	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kejuaraan cabang olahraga prestasi yang diselenggarakan	Kali	1	7	-	-	-
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kejuaraan cabang olahraga tingkat propinsi yang diikuti	kejuaraan	1	1	-	-	-
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	15	15	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kali	10	10	-	-	-
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	5	5	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kali	5	5	-	-	-
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	2	2	-	-	-
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	1	7	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Lembaga Kepramukaan Yang Terakreditasi	%	5	0,18	Kwarcab belum melakukan akreditasi dari dana hibah yg diterima	Akan di minta proses akreditasi lembaga di perencanaan hibah tahun berikutnya	-
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kwaran	27	27	-	-	-
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Persediaan Data sektoral Terpadu	%	80	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Dok	150	372	-		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok	150	372	-		
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Dengan Baik	%	100	100	Kebutuhan peralatan APU Persandian	Perlunya peralatan APU Persandian	
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Perangkat Daerah	66	66	-		
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	72	72	-		
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	80	80	Bersifat penyediaan, anggaran terpakai sesuai kebutuhan, Karena tidak ada Pegawai yang melakukan Diklat Pim Stuktural	Perencanaan program kegiatan harus disusun sesuai dengan Analisa jabatan, Anggarannya dialihkan ke sub kegiatan lainnya	
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	7	4	-		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	-		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	-		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	8	8	-		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	43	-		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	-		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	-		
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan dokumen	Dokumen	1	1	-		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	1	-		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	93	92	-		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	43	0	-		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	Jenis	9	9	-		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	-		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	-		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	-		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit	2	2	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	2	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	45	45	-	-	-
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	20	-	-	-
				Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	20	20	-	-	-
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Objek	3	4	-	-	-
				Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	4	4	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Pembinaan Tradisi dan Nilai Budaya	%	45	45	Anggaran yang tidak terserap disesuaikan dengan kebutuhan	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan	-
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival dan Penampilan Seni Budaya	kali	30	30	-	-	-
				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mengikuti Proses Standarisasi	kali	11	6	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kali	22	30	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	%	70	70	-	-	-
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal	kali	5	5	-	-	-
				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	2500	2500	-	-	-
				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	6	6	-	-	-
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	%	70	70	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Objek	8	3	-	-	-
				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	3	7	-	-	-
				Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	8	8	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Permuseuman	%	65	65	Ada Kendala mendatangkan narasumber dan waktu pelaksanaan sudah mendekati akhir Tahun Anggaran 2023	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan program kegiatan	-
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang dikelola di kabupaten	obyek	3	3	-	-	-
				Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	3	6	-	-	-
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	3	6	-	-	-
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	3	2	-	-	-
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	95	95	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi kepegawaian yang terlaksana	%	42	28	-	-	-
				sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	pcs	72	71	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	%	88	88	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	30	30	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	%	80	35	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan kantor yang disediakan	macam/buah	12	12	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Macam/orang	7	7	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	macam/orang	32	32	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	macam/buah	6	6	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	22	21	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	92	76	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jumlah sarana dan prasarana Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	82	81	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang sediakan	unit	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa Penunjang kegiatan urusan pemerintah daerah selama 1 tahun	%	88	88	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	rek	7	7	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Sarana dan prasana perlengkapan serta peralatan dan Mesin yang dipelihara dalma 1 tahun	%	80	24	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mobil/ kendaraan Roda / kendaraan roda 2	15	14	-	-	-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	unit	66	30	-	-	-	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Sarana dan prasana perlengkapan serta peralatan dan Mesin yang dipelihara selama 1 tahun	unit	8	7	-	-	-	
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina	%	95	96,38	<ul style="list-style-type: none"> > Masih minimnya sarana dan prasarana perpustakaan di kepulauan. > minimnya sarana dan teknologi berbasis informasi. > terbatasnya koleksi buku. > Masih kurangnya tenaga SDM puskawan dan pengelola perpustakaan lembaga pendidikan, universitas dan desa. > masih kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya naskah kuno. > Minimnya katalog naskah kuno. 	<ul style="list-style-type: none"> > Melakukan obsevasi dan penilaian perpustakaan kabupaten ke PERPUSNAS. > Melakukan Pembinaan tenaga perpustakaan dengan Bintek. > Melakukan Pembinaan tenaga perpustakaan dengan Bintek. > Pemenuhan kebutuhan buku oleh pemustaka. 	-	-
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	lembaga	90	86	-	-	-	
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Lembaga yang dibina dan dikembangkan	lembaga	90	86	-	-	-	
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang dibina dan ditingkatkan	orang	90	56	-	-	-	
				Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang di kelola dan dikembangkan	explar	1500	2172	-	-	-	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan	pengunjung	10.500	7.964	-	-	-	
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar serta masyarakat	lembaga	90	68	-	-	-	
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pengembangan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	%	85	106%	Masih kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya naskah kuno, pemanfaatan terhadap naskah kuno dan minimnya katalog naskah kuno	Melakukan Sosialisasi dan pendekatan akan niali nari naskah kuno untuk disimpan di Perpustakaan ataupun dimuseum	-	
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan	naskah	6	6	-	-	-	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah peran serta masyarakat dalam pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno	orang	5	3	-	-	-	
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didavagunakan	Jumlah Bahan pustaka serta naskah kuno yang dilestraikan dan diahlimediakan	naskah	3	5	-	-	-	
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MENGELOLA ARSIP DENGAN BAIK	%	95	88	<ul style="list-style-type: none"> > Pencipta arsip belum menerapkan prosedur pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah (Unit Kearsipan III) ke unit kearsipan II sesuai NSPK sehingga menyebabkan tertumpuknya arsip pada Unit Kearsipan III sehingga bertambahnya arsip akan semakin berat beban arsiparis / pengelola dalam melakukan penataan arsip. > Kapasitas dan ketersediaan SDM pengelola kearsipan pada lembaga pencipta arsip masih rendah sehingga Tim kesulitan dalam melakukan pendampingan / supervisi penataan arsip mulai pembuatan daftar arsip hingga penyerahan arsip statis oleh Pencipta arsip sesuai NSPK. 	<ul style="list-style-type: none"> > Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada Unit Pencipta Arsip tentang Peringkat Daerah sebagai materi manajemen kearsipan, b. Merumuskan juknis tentang ketaatan pengelolaan arsip. > Menyelipkan persyaratan tertip arsip bagi Peringkat Daerah sebagai materi dalam pemeriksaan regular inspektorat, b. Lebih mengintensifkan peran LKD untuk melakukan pendampingan secara langsung guna menjadi supervisi dalam penataan arsip inaktif Peringkat Daerah. 	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis	pencipta arsip	31	75,5	-	-	-
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	pencipta arsip	31	63	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masih kurangnya Kesadaran akan Arsip dan Konsekwensinya. ➢ SDM Arsiparis masih kurang. 	Sistem informasi berbasis IT Arsip yang diwajibkan setiap OPD,b. Bagi Unit Pencipta Arsip yang tidak memiliki Arsiparis menunjuk petugas khusus sebagai Petugas Pengelola Arsip.	-
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pencipta Arsip yang telah mendapatkan Pengawasan Kearsipan Internal	pencipta arsip	31	25	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tertib pengelolaan arsip belum menjadi prioritas dalam merumuskan kebijakan. ➢ Masih Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya tertib arsip pada setiap sebagian Unit Pencipta Arsip yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada Unit Pencipta Arsip tentang manajemen kearsipan. ➢ Merumuskan juknis tentang ketaatan pengelolaan arsip. 	-
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Series	12	9	-	-	-
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Series	14	57	-	-	-
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola melalui Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Series	12	9	-	-	-
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsip Statis yang diserahkan oleh Unit Kearsipan (Unit Pencipta Arsip) ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	Series	14	9	-	-	-
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	11	11	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	60	60	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	4	4	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangan	Kegiatan	30	30	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	1	1	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	keg	5	5	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Tahun	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah obyek Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	obyek	3	3	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unt	2	2	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	1	1,54	-	Semakin intensifnya program pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penangkapan ikan dalam bentuk bantuan dan pelatihan terhadap nelayan;	-
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	Kelompok	60	60	-	-	-
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	130	160	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	%	17	-4,16	Pertumbuhan menurun tahun 2023 dikarenakan serangan penyakit pada komoditas udang vanamei sehingga produksi menurun	Melakukan pendampingan dalam rangka mencegah dan mengatasi penyakit ikan serta memperbaiki ekosistem budidaya	-
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi budidaya ikan	Ton	6.318	7.477,38	-	-	-
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana yang tersalurkan kepada kelompok budidaya	Pembudidaya	15	37	-	-	-
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang dibina	Pembudidaya	112	120	-	-	-
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	kelompok	22	37	-	-	-
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	12	12	-	-	-
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pertumbuhan produksi olahan perikanan	%	1,5	82,05	-	Melakukan peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan deversifikasi produk olahan perikanan	-
				Penyediaan dan Penyahuran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mendapatkan bantuan	Kelompok	20	20	-	-	-
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang disalurkan kepada kelompok	Kelompok	20	20	-	-	-
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	5	5	Karena perbedaan juknis DAK dan daerah, juknis DAK perform sdg juknis daerahnya kegiatan	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan program kegiatan	-
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Buah	3	3	-	-	-
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Buah	1	1	-	-	-
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Obyek	3	3	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	15	15	-	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dipelihara	Lokasi	3	3	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	4	-	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota	Lokasi	1	1	-	-	-
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Terselenggaranya Pemasaran Pariwisata di Dalam Negeri dan Luar Negeri	%	75	97,8	Sifatnya disediakan sesuai kebutuhan lapangan	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan program kegiatan	
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	12	12	-	-	-
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	4	-	-	-
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	4	4	-	-	Lakukan terobosan untuk pengelolaan area wisata dengan melibatkan pihak ketiga atau investor. Dengan catatan apabila Pemerintah Kabupaten tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pengoptimalan lokasi – lokasi pariwisata yang ada.
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	4	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	5	5	Karena perbedaan juknis DAK dan daerah, juknis DAK perform sdg juknis daerahnya kegiatan	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan program kegiatan	-
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang diberdayakan	Kali	1	1	-	-	-
				Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	5	5	-	-	-
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kali	3	3	-	-	-
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	50	50	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	40	41	-	-	-
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	kegiatan	1	1	-	-	-
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	100	100	Realisasi pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Peningkatan kinerja menyesuaikan jadwal anggaran kas	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	7	7	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2.640	2.640	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	2	2	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	3	3	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	12	12	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	6	6	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	3	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Dokumen	6	6	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	75	75	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	6	6	-	-	-	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	12	12	-	-	-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	jenis	3	3	-	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	5	5	-	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jenis	3	3	-	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	6	-	-	-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	30	30	-	-	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	2	-	-	-	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan				Adanya El Nino berdampak pada proses budidaya komoditas pertanian	Mitigasi penanganan anomali iklim mulai perencanaan hingga pelaksanaan budidaya di lahan	-	
					1. Tanaman Pangan :							
					- Padi	Ton.	193.025	194.290,79	-	Terjadinya Elnino berdampak pada mundurnya musim penghujan dan berkurangnya ketersediaan air	Penambahan pompa air dan perbaikan tata guna air di tingkat kelompok	-
					- Jagung	Ton.	448.573	446.709,65	-			-
					- Kedele	Ton.	96,62	134,76	-			-
					- Kacang Hijau	Ton.	22.439	21.151,37	-	Terjadinya Elnino berdampak pada mundurnya musim penghujan dan berkurangnya ketersediaan air	Penambahan pompa air dan perbaikan tata guna air di tingkat kelompok	-
					- Ubi Kayu	Ton.	158.779	146.089,70	-	Terjadinya Elnino berdampak pada mundurnya musim penghujan dan berkurangnya ketersediaan air	Penambahan pompa air dan perbaikan tata guna air di tingkat kelompok	-
					2. Hortikultura :	Kuintal	69.449	143.780	-			-
					- Bawang Merah					Petani memilih beralih ke komoditas tembakau karena iklimnya mendukung	Tata kelola perdagangan cabe agar harga tidak jatuh dan petani tidak rugi	-
					- Cabe Besar	Kuintal	9.950	9.020	-			-
					- Cabe Kecil	Kuintal	82.575	176.132	-			-
					3. Perkebunan :	Ton.	44.820	44.850	-			-
					- Kelapa							-
				- Cabe Jamu	Ton.	10.435	9.391,50	-	Adanya el-nino berdampak pada matinya pohon cabe jamu karena kekurangan air	Penanaman pohon baru	-	
				- Jambu Mete	Ton.	5.597	5.599	-			-	
				- Siwalan	Ton.	759,95	750,01	-	Terdapat pohon siwalan yang kurang produktif karena sudah tua	Penanaman pohon baru	-	
				- Tembakau	Ton.	5.960	6.823,24	-			-	
				4. Peternakan	Ton.	5.135	5.141,80	-			-	
				- Daging	Ton.	4.271	4.314,60	-			-	
				- Telur	Ton.			-			-	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	Klp	100	196	-	-	-	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan	2 (DAK-F) 1 (DAK-NF) 9 (DBHCHT)	2 1 9	-	-	-	
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan pendukung pertanian	Laporan	110	127	-	-	-	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	SDG pertanian dan peternakan yang terkelola	Unit	3	3	-	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	VUB	2	2	Kegiatan yang bisa dilakukan di tahun ini hanya sampai di tahap karakterisasi varietas SDG lokal	Penguatan kompetensi SDM untuk tindak	-
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak besar	%	0,5	0,51	-	-	-
				Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Ekor	50.000	27.881	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya kegiatan penandaan ternak dari Pusat yang mewajibkan ternak yang di-IB (Inseminasi Buatan) harus dipasangi cartag (anting telinga), sehingga banyak peternak yang menolak karena dianggap menyebabkan cacat dan harga sapi turun. ➢ Ketersediaan semen beku (straw) jenis Sapi Madura dari Lembaga Penyedia yang didistribusikan ke wilayah Kabupaten Sumenep sangat terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya relaksasi pada SOP kegiatan penandaan ternak. ➢ Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penyedia mengenai pengadaan semen beku (straw) untuk tahun berikutnya. 	-
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	%	77	99,6	Realisasi pencairan anggaran tidak sesuai jadwal disebabkan masalah non teknis /administrasi	Peningkatan koordinasi pihak terkait untuk percepatan penyelesaian administrasi	-
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang diperbaiki	Unit	30	30	-	-	-
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan	1	1	-	-	-
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang dibangun	Unit	225	224	Dipending karena permintaan dari pengusul	Koordinasi dengan pendamping	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara.	Unit	101	101	-	-	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara.	Unit	19	19	-	-	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara.	Unit	41	41	-	-	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara.	Unit Unit Unit	45 8 11	44 8 11	Dipending karena permintaan dari pengusul	Koordinasi dengan pendamping	-
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan di Wilayah Sumber Bibit (Wilsumbit) yang dikelola	Kecamatan	4	4	-	-	-
				Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Kecamatan	4	4	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penanganan kasus penyakit hewan	%	25	39,79	Keterbatasan jangkauan layanan kesehatan hewan	Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan di tempat layanan kesehatan hewan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan	Lokasi	20	20	-	-	-
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan	4	4	-	-	-
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah Kab/Kota	%	100	100	-	-	-
				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Sampel	150	150	-	-	-
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medic veteriner	Laporan	12	12	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	%	100	100	Penanganan OPT belum maksimal	Pelaksanaan SLPHT secara massif dan penyediaan saprodi sesuai dengan jenis OPT yang terjadi di lapangan	-
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah bencana pertanian yang dikendalikan	Ha	10	10	-	-	-
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	5	5	-	-	-
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	Jumlah Area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	Ha	500	500	-	-	-
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang difasilitasi	%	2	2	Fasilitasi perijinan usaha pertanian belum optimal	Penguatan koordinasi internal dalam memfasilitasi perijinan usaha pertanian	-
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dibina usahanya	Klp	5	5	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	2	2	-	-	-
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani lanjut	%	2	2	Pembinaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani belum optimal	Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya untuk mendukung pembinaan kelembagaan petani	-
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	Klp	100	100	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	25	25	-	-	-
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	61	61	-	-	-
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (DAK Fisik, DAK Non Fisik, Paik Rokok)	Unit Unit Unit	88 27 1	88 27 1	-	-	-
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan volume perdagangan di pasar	%	15	15	Anggaran penunjang yang tidak terserap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan anggaran Kas	-
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dikelola	Unit	47	47	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	2	2	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	45	45	-	-	-
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan Jumlah Bapokti Yang Harganya Stabil	%	80	80	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan angrgan Kas	-
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	-	-	-
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12	12	-	-	Pengaturan Sistem Pendistribusian Pupuk Secara Berkala sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	%	2	2	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan angrgan Kas	-
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaku usaha	2	2	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	pelaku usaha	2	2	-	-	-
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	15	15	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan angrgan Kas	-
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Dok	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP	UTTP	1500	2300	-	-	-
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	%	30	30	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan angrgan Kas	-
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	kali	2	2	-	-	-
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	2	2	-	-	-
				Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem informasi perdagangan	Dokumen	1	1	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Pembangunan Industri	%	100	100	Anggaran penunjang yang tidak teresap tidak sesuai perencanaan awal	Perencanaan program kegiatan harus disusun dan disesuaikan dengan ASB dan angrgan Kas	-
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	dok	5	5	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dok	2	2	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dok	2	2	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dok	1	1	-	-	-
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	%	82,5	0	Tidak terdapat pelaksanaan penempatan dan pemberangkatan tenaga transmigran pada tahun 2023	Pengampu urusan transmigrasi sudah bukan kewenangan Ketenagakerjaan	-
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	Kegiatan	3	0	-	-	-
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	2	0	-	-	-
31	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan Persentase OPD yang menindaklanjuti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi Persentase OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana Persentase Layanan Keprotokolanan yang terpenuhi	%	100 100 100 100	100 100 100 100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	%	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Yang Disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah kali pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	2	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Keuangan Setda yang dipenuhi	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	Orang	210	210	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Transaksi Keuangan yang terverifikasi	Dokumen	12	12	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kali Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Sinkronisasi dengan BPKAD Jumlah pelaksanaan Sinkronisasi dengan Bagian dan BPKAD	Dokumen	12	12	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang Disusun	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase Penyelesaian Administrasi Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	4	4	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang disusun	Dokumen	1	1	-	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi BMD setda yang dipenuhi	%	100	80	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan BMD Setda	Dokumen	2	2	-	-	-
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jenis Penatausahaan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Laporan	2	1	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan pengadministrasian Data kepegawaian di Lingkungan Setda yang dilaksanakan	Dokumen	7	7	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lokasi terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	Paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan/ Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang disediakan Jumlah Jenis Mamin Yang disediakan	Paket	11	11	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	Paket	3	3	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lokasi dipenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Dokumen	321	321	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu terpenuhinya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri	Laporan	600	600	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	Dokumen	4500	4500	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Setda yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	Unit	26	26	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang terpenuhi	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis tenaga outsourcing yang dipenuhi	Laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan Pemda yang dipelihara	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan (roda 4) yang dipelihara	Unit	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional (roda 4) yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional (roda 2) yang dipelihara	Unit	42	42	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	Unit	135	135	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Lokasi Gedung dan Bangunan yang terpelihara	Unit	8	8	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	%	100	55,56	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Orang/Bulan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan atribut KDH/WKDH	Paket	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan medical checkup untuk KDH/WKDH	Orang	4	0	-	-	-
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Orang/Bulan	2	2	-	-	-
				Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtangaan Setda yang difasilitasi	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kerumahtangaan KDH	Paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kerumahtangaan WKDH	Paket	3	3	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tanggan Setda	Paket	9	9	-	-	-
				Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi (OPD) yang dilaksanakan Persentase OPD yang difasilitasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Persentase OPD yang dibina yang mengikuti KIPP Persentase OPD yang dimonev kepatuhan terhadap SPP	%	100 100 100 100	100 83,33 100 92,73	-	-	-
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang disusun kebutuhan pegawai, formasi jabatan, kompetensi jabatan, kelas nilai jabatan Jumlah OPD yang akan disusun untuk di Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen OPD	180 51	180 51	-	-	-
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Pedoman Penyusunan kebijakan tentang pelayanan publik dana tata laksana Jumlah OPD yang menerapkan sistem kebijakan pelayanan publik sesuai dengan prosedur Jumlah inovasi OPD yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik	Dokumen OPD Laporan	14 51 4	14 51 4	-	-	-
					Jumlah Kepala OPD yang difasilitasi penyusunan perjanjian kinerja dengan bupati (sesuai OPD) Jumlah kali Perjanjian kinerja Bupati dan Kepala Perangkat Daerah dibukukan Jumlah Penyusunan dokumen bahan evaluasi SAKIP Kabupaten (sesuai ketentuan Menpan)	OPD Kali %	51 2 100	51 2 100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang didasiliptasi pelaksanaan peningkatan budaya kerja (sesuai jumlah OPD) Jumlah Roadmap RB dibukukan (Sesuai Jumlah OPD) Jumlah OPD menerima reward pelaksanaan SAKIP Jumlah OPD menerima reward pelaksanaan RB Jumlah OPD menerima reward peningkatan budaya kerja (sesuai OPD)	% % OPD OPD OPD	100 60 3 0 0	100 100 3 0 0	-	-	-
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang dilakukan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	55	51	-	-	-
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kali Kegiatan Pimpinan Daerah yang difasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	-	-	-
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis Fasilitasi Kegiatan Komunikasi Pimpinan Daerah yang dilakukan	Laporan	14	14	-	-	-
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Pemerintahan dan Pembangunan Jumlah Layanan Iklan dan Advetorial Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Laporan	12	12	-	-	-
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan % Kerjasama Daerah yang difasilitasi % Harmonisasi Produk Hukum Daerah % Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	%	97,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 442,86% 84,25% 94,83%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Indikator Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah tidak Tercapai 100% dikarenakan penyusunan Produk Hukum bergantung pada usulan dari Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan untuk Fasilitasi Bantuan Hukum Sifatnya disediakan. Sedangkan pada Indikator Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi tidak tercapai 100 % Karena Jumlah Penerima Bantuan Lembaga Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ada yang tidak direalisasikan karena belum memenuhi persyaratan administratif. Sedangkan untuk jumlah Penerima Bantuan Sosial ada yang tidak direalisasikan karena sudah meninggal dunia.	Penerima Bantuan Lembaga Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dan Penerima Bantuan Sosial akan terus dilakukan update data dengan melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan desa/ kelurahan.	-
				Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Laporan PPD Kabupaten tepat waktu	%	97,00%	100,00%	-	-	-
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah fasilitasi penataan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan	Fasilitasi	3	3	-	-	-
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang dibina Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pendampingan pengelolaan anggaran Jumlah Patok Batas yang akan dibangun Jumlah Kecamatan yang dibina optimalisasi pelaksanaan PATEN Jumlah Tugu Batas Kecamatan dipelihara Jumlah Pembakuan Rupa Bumi	Kecamatan Kelurahan Patok Kecamatan Tugu Pembakuan	27 4 80 27 31 0	27 4 80 27 31 0	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Pembuatan Papan Nama Jalan	Titik	21	21			
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4	4	-	-	-
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	%	100,00%	442,86%	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	Dokumen	21	93	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan keagamaan, Pendidikan, dan Kepemudaan, Kesehatan dan Kemasyarakatan	%	100,00%	93,68%	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Penerima Bantuan Lembaga Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Peserta Diklat Keagamaan Jumlah Penerima hibah uang (beasiswa santri)	Dokumen Penerima Penerima Peserta Penerima	11 137 1025 40 0	11 123 962 40 0	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan	Dokumen	3	3	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dilakukan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pendampingan Hukum dan Penyusunan Produk Hukum yang terselesaikan	%	100,00%	84,25%	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah fasilitasi Produk Hukum Daerah	Produk Hukum	699	589	-	-	-
				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Koordiansi hukum yang dilakukan Jumlah Perkara yang ditangani	Kasus	5	4	-	-	-
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Referensi Hukum	Produk Hukum	699	589	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<p>% Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah</p> <p>% Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam</p> <p>% perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan</p> <p>Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan</p>	%	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>	<p>55,23%</p> <p>100,00%</p> <p>108,33%</p> <p>125,20%</p>	<p>Pada Program Perekonomian dan pembangunan untuk indikator Persentase Pembinaan pengendalian Perekonomian Daerah Tidak Dapat Tercapai 100 %. Sebab Pada sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi untuk Pengelolaan BUMD dan BLUD untuk pelaksanaan 2x Forum BUMD terealisasi 1x Forum BUMD). Hal ini dikarenakan, Forum dimaksud sudah dilaksanakan oleh BUMD masing-masing.</p> <p>Selain itu, penyediaan Untuk Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Komisaris PT. Sumekar s.d 31 Desember 2023 tidak ada pendaftar sehingga tidak dapat direalisasikan. Sedangkan pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian terkait jumlah Laporan OPD Pengguna Dana Pajak Rokok dan Persentase Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok serta jumlah Laporan OPD Pengguna DBHCHT dan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sudah diimpahkan ke OPD Lain.</p>	<p>Untuk Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Komisaris PT. Sumekar yang tidak ada pendaftar sehingga tidak dapat direalisasikan, direncanakan lagi pada kegiatan tahun berikutnya</p>	
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan	%	100,00%	55,23%	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dibina	BUMD	5	5	-	-	-
					Jumlah laporan keuangan dan rencana kerja perusahaan	Laporan	10	5	-	-	-
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan OPD Pengguna Dana Pajak Rokok	Laporan	10	0	-	-	-
					Persentase Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok	%	75	0	-	-	-
					Jumlah Laporan OPD Pengguna DBHCHT	Laporan	2	0	-	-	-
					Jumlah Laporan TPID	Laporan	10	5	-	-	-
					Jumlah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal	Kali	10	0	-	-	-
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Monev pada Pelaku Ekonomi Mikro (Pembinaan UMKM)	Kali	50	80	-	-	-
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan	%	100,00%	108,33%	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan yang disusun	Dokumen	3	4	-	-	-
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah jenis Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan	Laporan	5	5	-	-	-
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan dan evaluasi Penyerapan Anggaran OPD (TEPRA)	Laporan	4	4	-	-	-
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	%	100,00%	125,20%	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket OPD melalui SPSE Persentase paket e-tendering dan e-purchasing terfasilitasi melalui SPSE dan Penawangan RUP oleh OPD	Paket %	75 85	138 100	-	-	-
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terfasilitasi di LPSE Persentase Paket e-tendering dan e-purchasing yang terfasilitasi	OPD %	50 90	57 100	-	-	-
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penanganan Permasalahan pengadaan barang dan jasa Jumlah Penyusunan Kebijakan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terfasilitasi Pendampingan Pengadaan Barang Jumlah Waktu Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dan Sanggah Jumlah waktu Pelayanan Konsultasi PBJ	Laporan Pedoman OPD Bulan Bulan	1 1 51 12 12	1 1 51 12 12	-	-	-
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	%	100,00%	100,00%	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah jenis pembinaan, pengawasan, serta pemanfaatan Pengelolaan sumber daya	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis pelaksanaan pembinaan usaha pertambangan umum	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah jenis penyalur yang dimonitoring Kuota BBM, Gas, dan Energi Baru Terbarukan	Dokumen	1	1	-	-	-
32	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	%	489	483	Sebagian pimpinan dan anggota DPRD memilih untuk tidak menggunakan layanan kesehatan medical check up yang di sediakan sekretariat DPRD, disamping itu sebagian besar anggota DPRD tidak memanfaatkan preferensi penyedia jasa medical check up yang telah ditunjuk yakni RS. dr. H. Moh. Anwar	Agar pelaksanaan medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumenep dapat berjalan optimal, maka Sekretariat DPRD Kabupaten SUMENEP melakukan kerjasama medical check up dg rs tipe a yakni RS dr Soetomo Surabaya. Hal ini sesuai dg harapan dan keinginan anggota DPRD yg menghendaki opsi penyedia layanan medical check up dari rumah sakit provinsi.	-
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	dokumen	18	18	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	4	-	-	-
				Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	-	-	-
				Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	109	109	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	65	65	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	44	44	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	paket	19	19	-	-	-
				Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Laporan	3	3	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	16	16	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	paket	47	47	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	dokumen	10	10	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	dokumen	5	5	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	6	6	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	14	14	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Laporan	28	28	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Pengadaan Mebel	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Laporan	28	28	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Laporan	28	28	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kali	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kali	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	kali	113	112	-	-	-
				Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paikannya	Laporan	41	40	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	stel	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan	62	62	-	-	-
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan	Laporan	106	101	-	-	-
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Laporan	50	50	-	-	-
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Laporan	6	6	-	-	-
				Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	50	45	-	-	-
				Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang disediakan	dokumen	21	21	-	-	-
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	dokumen	20	20	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan	dokumen	1	1	-	-	-
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	dokumen	299	287	Indikasi penurunan Indikator realisasi kinerja pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara umum dikarenakan adanya Intensitas dan frekuensi kegiatan konsultasi dan koordinasi DPRD Kabupaten Suemnep yang lebih sering dilaksanakan daripada frekuensi koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang mengalami penurunan ini khususnya pada kegiatan pengawasan dalam daerah DPRD. Kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih memilih kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah menyebabkan penurunan pada kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah termasuk didalamnya kegiatan pengawasan	Terkait dgn rendahnya serapan anggaran dan minimnya penggunaan perjalanan dinas dlm daerah pada kegiatan pengawasan di masing masing komisi DPRD. Maka pihak sekretariat DPRD khususnya bagian fasilitasi garwas untuk lebih intensif mengingatkan dan meningkatkan komunikasi dg pihak komisi DPRD agar kegiatan pengawasan dlm daerah utk lebih dioptimalkan, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yg merupakan salah satu pilar penyangga fungsi kedewanan bisa terwujud sesuai harapan masyarakat.	-
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	dokumen	15	15	-	-	-
				Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	dokumen	1	1	-	-	-
				Pembahasan Rancangan perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	8	8	-	-	-
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	dokumen	4	4	-	-	-
				Penyusunan Tata tertib	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	dokumen	1	1	-	-	-
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	dokumen	5	5	-	-	-
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	1	1	-	-	-
				Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Laporan	1	1	-	-	-
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Laporan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Laporan	1	1	-	-	-
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	Laporan	64	29	-	-	-
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	16	6	-	-	-
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	dokumen	16	7	-	-	-
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen	16	7	-	-	-
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian	orang	16	9	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	kali	96	119	-	-	-
				Bimtek DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	4	4	-	-	-
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	69	69	-	-	-
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	dokumen	4	4	-	-	-
				Penyediaan tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	dokumen	7	7	-	-	-
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	12	35	-	-	-
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	Laporan	53	53	-	-	-
				Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Laporan	50	50	-	-	-
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Laporan	3	3	-	-	-
				Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	-	-	-
				Pembahasan Kerja sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi	dokumen	48	48	-	-	-
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	dokumen	48	48	-	-	-
				Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	dokumen	17	17	-	-	-
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	5	5	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	12	12	-	-	-
33	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen	14	14	-	-	-
				Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu	Dokumen	3	3	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Laporan	3	3	-	-	-
				Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Laporan	4	4	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	Dokumen	3	3	-	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PNS/ Bulan	54	54	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	2	2	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Disiplin	ASN	54	54	-	-	-
				Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	Laporan	6	6	-	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	-	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	-	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	15	-	-	-
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120	-	-	-
				Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan yang dibeli	Laporan	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Laporan	3	3	-	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Laporan	3	3	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Laporan	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	29	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	38	-	-	-
				Sub kegiatan Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirhabilitasi	Unit	1	1	-	-	-
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	%	100	100	-	-	-
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	Dokumen	3	3	-	-	-
				Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	135	135	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	3	-	-	-
				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi Pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	51	51	-	-	-
				Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	-	-	-
				Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	14	14	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	13	13	-	-	-
				Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	1	1	-	-	-
				PROGRAM PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	4	4	-	-	-
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4	4	-	-	-
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4	4	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	3	3	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KEUANGAN	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	95	93	1. Kuantitas dan Kualitas SDM BPPKAD masih kurang sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja. 2. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep belum semua dilakukan pencatatan dengan baik dan belum semua dilengkapi dengan dokumen kepemilikan. 3. Sebagian Besar Desa di Kabupaten Sumenep belum terdaftar di SISMIOP. 4. Belum Terlaksananya TP2DD di Kabupaten Sumenep	1. Komitmen dan etos kerja ASN BPPKAD yang tinggi. 2. Melakukan pencatatan aset dengan baik dan melengkapi dokumen aset daerah secara bertahap. 3. Melakukan Kerjasama dengan TOPDAM V Brawijaya Malang untuk pengadaan Peta Desa dan Melakukan Pengukuran Tanah dan Konversi Desa Ke Digital. 4. Pembuatan Aplikasi E-PAD untuk Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan Non Tunai	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	14	14	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	86	215	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Jenis	4	4	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	stel	200	200	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	5	-	-	-
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	3	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Paket	10	10	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	20	20	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	100	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	4	6	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	12	12	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	55	54	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	Jenis	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	15	15	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	40	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	20	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	2	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	92	75	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rencana anggaran yang disusun	%	100	80	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Laporan	1	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Laporan	1	2	-	-	-
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	51	102	-	-	-
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	51	51	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Perbup Perda	1 1	1 1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup	1	1	-	-	-
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola	%	95	0,75	-	-	-
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan	6	4	-	-	-
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	183	135	-	-	-
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan	12	6	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	3	-	-	-
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	%	95	62	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD	35	35	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah	%	100	75	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen	8	8	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	3	3	-	-	-
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	35	35	-	-	-
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola	%	95	25	-	-	-
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	%	1	70	-	-	-
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	%	1	0	-	-	-
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	%	1	0	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	92	78	-	-	-
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	92	78	-	-	-
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standart Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	10	-	-	-
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	%	5	21	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	5	21	-	-	-
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	1	-	-	-
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	7	5	-	-	-
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	50	27	-	-	-
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	1	-	-	-
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	24	10	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5	0	-	-	-
35	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	99	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya Kelebihan Anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. ➢ Adanya sisa anggaran dikarenakan dalam perencanaannya terdapat kesalahan dalam perhitungan Jumlah Pegawai (mengalami pengurangan Jumlah Pegawai) dan perhitungan Penerimaan Gaji dan tunjangan ke 13 dan 14. ➢ Terdapat 1 PC All-in-One yg tidak terealisasi karena spek barang yang ada dipasaran (TKDN) harganya sudah melebihi dr. naru anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyusun Perencanaan Anggaran secara Tepat. ➢ Menyusun Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN secara Tepat. 	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	12	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	Laporan	5	5	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	7	7	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	10	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa	3	3			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	%	50	65,63	<ul style="list-style-type: none"> > Penurunan jumlah usulan Kenaikan pangkat akibat dari perubahan aturan, khususnya jabatan fungsional yaitu permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. > Banyak usulan Kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkat jabatan fungsional yang tidak memenuhi syarat. > Terdapat sisa anggaran dikarenakan anggaran untuk biaya hidup Peserta Tugas Belajar Dokter Spesialis yang disediakan selama masa pendidikan tidak dapat dibayarkan sekaligus, melainkan hanya dapat dibayarkan per tahun. > Karena terdapat beberapa ASN yang mengikuti Diklat secara Mandiri. > Kurangnya Koordinasi dengan Tim Pembina Jabatan Fungsional. > Banyaknya ASN yang mengajukan Permohonan Cuti. > Banyaknya Usulan Calon Penerima Tanda Jasa Pegawai yang diajukan oleh Perangkat Daerah. > Pegawai yang melakukan pelanggaran Disiplin mengalami Penurunan. > Pegawai yang mengajukan Izin Perceraian sebanyak 29 ASN. 	<ul style="list-style-type: none"> > Melakukan Sosialisasi Permenpan 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Persyaratan Dokumen Kenaikan Pangkat. > Bagi PNS fungsional (JFT) kenaikan pangkat syaratnya semua dokumen Scan ASLI. > Menyusun kembali perencanaan Anggaran Tugas Belajar Untuk biaya hidup per tahunnya. > Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai dengan Rumpun Jabatannya. > Melakukan Perubahan Target. > Memberikan Sosialisasi kepada ASN terkait Cuti Pegawai. > Melakukan Verifikasi terhadap Berkas Calon Penerima Tanda Jasa Pegawai. > Melakukan Pembinaan Disiplin kepada ASN agar tidak ada lagi yang melakukan Pelanggaran Disiplin. > Melakukan Konevling kepada ASN yang akan bercerai. 	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Formasi (CPNS dan PPPK) yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	-	-	-
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	1	-	-	-
				Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SK	2.000	1.131	-	-	-
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	Laporan	1	1	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Dokumen	125	171	-	-	-
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	20	24	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	278	70	-	-	-
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Orang	1	1	-	-	-
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	ASN	660	892	-	-	-
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	150	184	-	-	-
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	8.756	8.756	-	-	-
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	30	22	-	-	-
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Laporan	30	29	-	-	-
				Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1	1	-	-	-
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	%	42	42	-	-	-
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	Dokumen	2	2	-	-	-
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	2	2	-	-	-
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	1	1	-	-	-
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	1	1	-	-	-
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	-
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	Laporan	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	laporan	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	laporan	1	1	-	-	-
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	Kajian	12	12	-	-	-
				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	5	5	-	-	-
				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	6	6	-	-	-
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	Kajian	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	Laporan	2	2	-	-	-
				Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah laporan kegiatan inovasi dan penerapan teknologi yang disusun	laporan	1	1	-	-	-
				Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan	1	1	-	-	-
38	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	%	95	95	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	95	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	65	65	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	1	1	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	2	2	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mempunyai keterampilan dan keahlian	%	100	100	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	65	65	-	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	orang	65	65	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	35	35	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	%	95	95	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	15	15	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	20	20	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	10	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	dokumen	20	20	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	15	15	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	10	10	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	45	45	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang yang laik fungsi	%	98	100	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	paket	1	1	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	1	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang yang laik fungsi	%	95	95	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	3200	3200	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana yang laik fungsi	%	95	95	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	1	1	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	%	60	60	Kurang tersedianya cukup waktu untuk melakukan konsultasi / koordinasi ke BPKP terkait Pelaksanaan Audit Kinerja disebabkan tumpang tindihnya / padatnya jadwal tugas pengawasan, sehingga alokasi Anggaran untuk Perjalanan Dinas Biasa tidak terserap secara optimal.	Perlu dilakukan penyesuaian time schedule terhadap tugas mandatory sehingga waktu dapat disesuaikan dengan target anggaran kas.	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP >= BB	%	50	50	-	-	-
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	80	80	-	-	-
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	%	75	75	-	-	-
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	50	50	-	-	-
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	1	1	-	-	-
				Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	laporan	60	60	-	-	-
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	laporan	4	4	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	2	2	-	-	-
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah dan PDDT	%	75	75	-	-	-
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	10	10	-	-	-
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	15	15	-	-	-
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	70	70	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rumusan kebijakan teknis yang dihasilkan	laporan	20	20	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	laporan	10	10	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	%	10	10	-	-	-
				Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	%	75	75	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	12	-	-	-
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	laporan	15	15	-	-	-
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	laporan	20	20	-	-	-
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	laporan	24	24	-	-	-
39	KECAMATAN	KECAMATAN KOTA SUMENEP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	9	9	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	0	0	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	0	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	0	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	0	0	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	0	0	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	4	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	0	0	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	laporan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	50	50	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	56	56	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	9	9	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	9	9	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	8	8	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	13	13	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	5	5	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	72	72	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	9	9	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	69	69	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	3	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	unit	1288	1288	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	unit	3585	3585	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	38	38	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	0	0	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit	19	19	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	7	7	-	-	-
				Pengadaan Mebel (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	4	4	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	11	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	4	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	3	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	layanan	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	8	8	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	2	2	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	23	23	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	3	2	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	25	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6	6	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	11	11	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	unit	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	100%	78,91%	Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai secara optimal	Memantangkan perencanaan agar semua sub kegiatan program tercapai	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	14	14	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27	27	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	60	60	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	72	72	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	98	98	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	122	122	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	485	485	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4800	4800	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	13	13	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	294	294	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	5	5	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Laporan	48	48	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	21	21	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	3	3	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	95	79	Sempat tertundanya gaji dan tunjangan ASN bulan Oktober	Mengajukan tambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang mana gaji bulan Oktober bisa dicairkan pada bulan November	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, pennggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	%	100	99	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Laporan	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Laporan	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan seragam olahraga ASN	Stel	12	12	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	5	5	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	4	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	5	5	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	5	5	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Tagihan/Rekening	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bansunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Unit	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	Adanya penambahan anggaran PAK dari Bappeda sehingga anggaran tidak teralisasi/tidak terserap di sesuaikan dengan jumlah PNS yang ada dan adanya PNS yang pensiun	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah.	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	14	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Layanan	20	20	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	60	60	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Unit	6	6	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Unit	192	192	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	7	7	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	Jenis	5	5	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	200	200	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Lembar	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	240	240	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	Unit	3	3	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	36	36	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Layanan	24	24	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Rekening	40	40	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	88	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sub Kegiatan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak harus terserap 100%. ➢ Sub Kegiatan ini tdk terserap 100% karena adanya mutasi pegawai. ➢ Perdin Luar Daerah tidak terserap 100% karena hanya bersifat penyediaan. Tidak terserap 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah. ➢ Disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat penyediaan. 	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja	Dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	16	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Paket	30	30	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Paket	27	27	-	-	-
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Paket	15	15	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Paket	15	15	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Paket	15	15	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Paket	10	10	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket yang Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	600	600	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	Unit	3	3	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	Unit	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pempenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	110	110	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	7	7	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	88	Sub Kegiatan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak harus teresap 100%	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja	Dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	13	14	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Paket	20	20	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Paket	20	20	-	-	-
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Paket	15	15	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Paket	15	15	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Paket	15	15	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Paket	10	10	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket yang Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	600	600	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	Unit	3	3			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	Unit	7	7			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penuhi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	110	110	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	7	7	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7	7	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, Perubahan RKA, DPA Dan Perubahan DPA Yang Disusun Tepat Waktu	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	ASN	27	27	-	-	-
				Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	ASN	27	27			
				Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	ASN	27	27			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	dokumen	6	6	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Penyediaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan lainnya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan	stel	30	30	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Unit	192	192	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	jenis	192	192	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	jenis	152	152	-	-	-
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	jenis	786	786	-	-	-
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	paket	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	kali	318	318	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan mesin Yang Diadakan	unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Yang Diadakan	Unit	6	6	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan jasa yang disediakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Rekening	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	66	66	-	-	-
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan zininan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	Unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Unit	42	42	-	-	-
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/Dipelihara	M2	461	461	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	75	Ada salah satu sub kegiatan yang tidak tercapai secara optimal	Memantangkan perencanaan agar semua sub kegiatan program tercapai	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	orang	12	22	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Bulan	12	22	-	-	-
				Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dievaluasi	Jenis	12	22	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	5	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	Jenis	12	22	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	Jenis	12	22	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	12	12	-	-	-
				Penyediaan Komponem Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Koponem Instalasi listrik dan Bangunan yang dibutuhkan	jenis	12	12	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan dan peratan yang dibutuhkan	Jenis	12	12	-	-	-
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang dibutuhkan	Jenis	12	12	-	-	-
				Peringatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan yang dibutuhkan	Kegiatan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kegiatan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Kegiatan	12	12	-	-	-
				Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah psumber daya air dan listrik yang di butuhkan	Unit	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan	Jenis	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan yang dibutuhkan	Kegiatan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaran dinas yg diperlihara	Unit	8	8	-	-	-
				Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran dinas yg diperlihara	Unit	8	8	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	paket	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Bangunan yang dipelihara	paket	1	1	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	83,56	Karena ada beberapa sub kegiatan tidak terlaksana sesuai target	Melakukan PAK sesuai dengan kebutuhan	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	7	7	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kali	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	26	20	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	11	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	12	9	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	24	24	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	24	24	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	340	284	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	90	89	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6	6	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	Jenis	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Buku	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat	220	165	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	Barang	3	3	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Paket	2	2	-	-	-
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah Aset yang diadakan	Barang	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Laporan	36	27	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	24	18	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan	Laporan	12	9	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Barang	19	18	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Kendaraan	6	5	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Gedung	1	1	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	77,15	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 73,63 %karena ada kekosongan jabatan yaitu Camat, Sekcam, Kasi Kesra, Kasi Tapem dan Kasubbag Kepegawaian	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 73,63 %karena ada kekosongan jabatan yaitu Camat, Sekcam, Kasi Kesra, Kasi Tapem dan Kasubbag Kepegawaian	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kali	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	32	32	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	20	20	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	27	27	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	27	27	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	24756	24756	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	200	200	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	140	140	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	15588	15588	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	8400	8400	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundangundangan yang disediakan	Jenis	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	416	416	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	55	55	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	55	55	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	84	84	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	36	36	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	48	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	16	16	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	8	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	74,87	Jumlah Jabatan Kasi yang terisi hanya 1 sedangkan yang kosong 4 jabatan	Mengajukan Pengisian Jabatan pada Kasi yang kosong	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan perubahan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	14	14	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	15	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	16	16	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	72	72	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	240	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	7	7	-	-	-
				Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	paket	2	2	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Laporan	36	36	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	15	15	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	89,12	Adanya PNS yang Pensiun, Meninggal Dunia dan Mutasi sebanyak 2 Orang dan Sub Keabatan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak teresap maksimal	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	6	6	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SemesteranSKPD	Jumlah laporan keuangan/triwulan/semesteran yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	20	20	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	152	152	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Item Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Jenis	192	192	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	152	152	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang Disediakan	Jenis	12	12	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	disediakanjumlah barang cetak dan penggandaan yang	Lembar	20.000	20.000	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang- undangan yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	240	240	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	2	2	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	40	40	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	Unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	33	33	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	313	313	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	Adanya Mutasi/Promosi, Meninggal Dunia dan Pensiun	Melakukan PAK Pengurangan Pagu Anggaran	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	9	9	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	20	20	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	28	28	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	20	20	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	28	28	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	27240	27240	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	178	178	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	124	124	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15558	15558	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10800	10800	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	568	568	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	4	4	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	20	20	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	89,88	> Rencana awal tidak terlaksana, ada sarana masih bisa dipakai > Sub kebijakan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak terserap maksimal	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan keuangan	Dokumen	6	6	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun	Laporan	20	15	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	17	17	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laproan Keuangan Bulanan/Semesteran, SKPD dan Laporan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Laporan	14	14	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	23	23	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	57	57	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item/jenis komponen yang disediakan	paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis yang disediakan	paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	jenis	24	24	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	15	15	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	unit	34	34	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	unit	26	26	-	-	-
				Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	8	8	-	-	-
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	jenis	7	7	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan diterima selama 1 tahun	Surat	2.500	2.500	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	60	60	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan yang disediakan	laporan	112	112	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	22	22	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	unit	10	10	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan mesin yang dilakukan pemeliharaan	unit	6	6	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	6	6	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	95,16	Tidak Tercapai Karena pada salah satu sub kegiatan tidak terlaksana terkait gaji dan pengadaan barang	Perluinya menata ulang perencanaan dan penentuan target agar target dapat terealisasi	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dilaporkan	Dokumen	6	6	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	13	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	29	29	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Buah	29	29	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Paket	6	6	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	150	150	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	152	152	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	Jenis	16	16	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Buah	200	200	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Buah	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	240	240	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	Unit	10	10	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	12	11	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Neld	24	19	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Ntd	18	16	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa umum kantor yang disediakan	Akld	12	10	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Barang	40	39	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Olld	8	8	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	Knld	7	7	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Arli	3	3	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan kapasitas ASN	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Keg	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	Keg	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Keg	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Keg	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bln	14	14	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	bln	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	48	48	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	%	160	160	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	160	160	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	jenis	5	5	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Bln	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Keg	240	240	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang di sediakan	Bln	12	12	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	%	100	100	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di sediakan	Bln	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Bln	24	24	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bln	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan	Bln	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	%	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Bln	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	5	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kali	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	20	20	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	20	20	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	24260	24260	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	192	192	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	152	152	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	786	786	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	22800	22800	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundangundangan yang disediakan	Jenis	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	256	256	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	4	4	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	11	11	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60	60	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	42	42	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Unit	6	6	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	35	35	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	92.99	Adanya ASN yang menjalani Hukuman Sanksi Disiplin pegawai	Adanya Pembinaan lebih lanjut mengenai Kepegawaian	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	5	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	3	3	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	24	24	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	14	14	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Orang	3	3	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang Dipenuhi	Jenis	6	6	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	9	9	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	Paket	228	117	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	276	276	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	M'	9	9	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	6	6	-	-	-
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	Unit	3	3	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	Jenis	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	Kali	1000	754	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperoleh melalui jasa sewa	Unit	25	25	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan adminduk	Layanan	3	3	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	47	47	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Unit	8	8	-	-	-
				Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	Unit	16	10	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	19	10	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	4	4	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	20	20	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	24	24	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Layanan	13	13	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	stel	23	23	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Layanan	6	6	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	303	303	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	jenis	7968	7968	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	14998	14898	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	133	133	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	m	158	158	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik Daerah yang diadakan	Unit	9	9	-	-	-
				Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	3	3	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	7	7	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	rekening	60	60	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menvurat	jumlah jasa pengantar surat	kali	514	514	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan adminduk	Layanan	1115	1115	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	22	22	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	28	28	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	425	425	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	9	9	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	20	20	Adanya Pengurangan Jumlah PNS	Mengajukan Tambahan PNS	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	21	Adanya Mutasi/Promosi, Meninggal Dunia dan Pensiun	Melakukan PAK Pengurangan Pagu Anggaran	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	20	20	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	17	17	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	27240	27240	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	178	178	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	124	124	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15558	15558	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10800	10800	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	568	568	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	7	7	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	7	7	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	20	20	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	10	10	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	4	4	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	dokumen	14	14	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	22	22	Sub Kegiatan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak harus terserap 100%	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	Laporan	2	2	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	28	28	Sub Kegiatan ini tdk terserap 100% karena adanya mutasi pegawai	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	6	6	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Cetakan dan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	Tidak Terserap 100% karena disesuaikan dengan harga koran atas dasar zonasi	Sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	202	202	Tidak Terserap 100% karena bersifat penyediaan	Sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	10	10	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	Tidak Terserap 100% karena adanya efisiensi anggaran dalam bentuk penawaran barang melalui e Katalog	Sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	Tidak terserap 100%	Disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat penyediaan	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yg Disediakan	Laporan	24	24	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	35	35	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yg Dipelihara & dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	Tidak terserap 100%	Disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat penyediaan	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	29	29	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	99,56	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya 1 Sub Kegiatan yakni Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak mencapai target. ➢ Adanya PNS yang Pensiun sebanyak 1 Orang dan Sub Kegiatan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak terserap maksimal. ➢ Penentuan target dokumen yang terlalu tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penentuan Target Dokumen Arsip pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis perlu dilakukan dengan lebih cermat. ➢ Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah. ➢ Penentuan Target Dokumen Arsip pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis perlu dilakukan dengan lebih cermat. 	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	24	24	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	15	15	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	156	156	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	96	96	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2000	1970	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	12	12	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	8	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	Jenis	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	21	21	-	-	-
				Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	7	7	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	18	60	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan kepegawaian yang Disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	18	18	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum Yang Disediakan	jenis	6	4	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	5	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Layanan Jasa yang Disediakan	jenis	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	jenis	3	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	Adanya Mutasi/Promosi, Meninggal Dunia dan Pensiun	Melakukan PAK Pengurangan Pagu Anggaran	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	9	9	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	20	20	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	10	10	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	20	20	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	15	15	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	27240	27240	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	178	178	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	124	124	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15558	15558	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	10800	10800	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	568	568	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	4	4	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	7	7	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	12	12	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	87	Tidak Terlaksana Karena Adanya Pak Pada Salah Satu Sub Kegiatan	Perlunya Penyelarasan Perencanaan Sehingga Penerapannya On The Track	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	12	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Layanan	20	20	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	20	20	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	6	6	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	192	192	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	7	7	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	Jenis	5	5	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	Jenis	200	200	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	240	240	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Mebel	jumlah Mebel yang diadakan	Unit	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	36	34	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyerat yang disediakan	Jenis	12	10	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	24	24	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan	Jenis	5	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	30	30	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Unit	5	5	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	89,12	Adanya PNS yang Pensiun, Meninggal Dunia dan Mutasi sebanyak 2 Orang dan Sub Keblatan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak terserap maksimal	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Paket	27	27	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Paket	27	27	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	5	5	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Item Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Jenis	9	9	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	17	17	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang Disediakan	paket	5	5	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang- undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	126	124	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	unit	2	2	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	3	3	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan	1400	1400	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	Unit	1	1	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang di pelihara	Unit	14	14	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	73,23	Tidak Tercapai Dikarenakan Banyak Pegawai Yang Mutasi Dan Pensiin, Sehingga Pada Kegiatan Gaji Asn Tidak Terserap	Perlu nya Pemantapan Pada Perencanaan Dan Penguatan Jumlah Asn	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	11	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	0	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	kali	12	12	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	laporan	12	12	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	kali	12	12	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	jenis	20	20	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	stel	20	20	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	unit	6	6	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	unit	192	192	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	7	7	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	jenis	5	5	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	unit	200	160	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	12	12	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	240	240	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit	2	2	-	-	-
				Pengadaan Mebel	jumlah Mebel yang diadakan	unit	2	2	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	2	2	-	-	-
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah Aset yang diadakan	unit	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	layanan	36	32	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	24	24	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	40	38	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	unit	5	4	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	12	12	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	3	3	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	laporan	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Dokumen	12	12	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	2	2	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Dokumen	500	500	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	4	4	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat desa	Kali	4	4	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat desa	Dokumen	500	500	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	500	500	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Dokumen	500	500	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang di Laksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan ditngkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	2	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Laporan	2	2	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Dokumen	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Pelayanan yang dikeluarkan	Dokumen	1	1	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	93,39	Ada salah satu sub kegiatan yang tidak tercapai secara optimal	Memantangkan perencanaan agar semua sub kegiatan program tercapai	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	6	6	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Laporan	6	6	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Laporan	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Laporan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang di Laksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen yang Dikeluarkan	Kali	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Kali	12	12	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	laporan	500	500	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	laporan	500	500	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN NONGGUNONG		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	kegiatan	1	1	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tali	12	12	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Koordinasi	12	12	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	12	12	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keg	4	4	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Keg	4	4	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Keg	4	4	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Keg	4	4	-	-	-
		KECAMATAN GLIGENTING		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	4	4	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Kali	4	4	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Dokumen	60	60	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	500	500	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN GULUK-GULUK		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	98,12	Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai secara optimal	Memantangkan perencanaan agar semua sub kegiatan program tercapai	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan yang dilakukan	Kali	36	36	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Kali	36	36	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Rekomendasi PATEN	Dok	350	350	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	350	350	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kali	4	4	-	-	-
				Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Dokumen	60	60	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	80	80	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	350	350	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	Dokumen	350	350	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN PASONGSONGAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	12	12	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	2	2	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Kali	2	2	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi pelayanan yang dikeluarkan	Dokumen	1	1	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kali	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	kali	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	1	1	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	laporan	2	2	-	-	-
				Pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah laporan keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ditingkat desa dan kelurahan	laporan	3	3	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Pelaksanaan	12	12	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Desa	12	12	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	9	9	-	-	-
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	10	10	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	Kelompok	10	10	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	10	10	-	-	-
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang di fasilitasi	Keluarga	10	10	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Desa	20	20	-	-	-
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Desa	20	20	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Desa	8	8	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	9	9	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga,warga,dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Laporan Kelurga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Kali	12	12	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	91,84	Karena ada beberapa sub kegiatan tidak terlaksana sesuai target	melakukan PAK sesuai dengan kebutuhan	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pendampingan dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa	Kali	12	12	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Desa	12	12	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga kemasyarakatan	Kali	12	6	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	Kali	12	9	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	Kelompok/Lembaga	7	6	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	kali	14	14	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Desa	14	14	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Laporan	15	15	-	-	-
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Laporan Kelurga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Kali	4	4	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Laporan	14	14	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	14	14	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Laporan	12	12	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	15	15	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7	7	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	6	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	1	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Laporan	10	10	-	-	-
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	500	500	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	%	100	83,41	Karena ada beberapa sub kegiatan tidak terlaksana sesuai target	Melakukan PAK sesuai dengan kebutuhan	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan pembangunan desa Tingkat Kecamatan	Desa	15	10	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	10	10	-	-	-
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang berdaya dan meningkat kesejahteraan keluarganya tingkat kecamatan	Keluarga	45	20	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	80	80	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Laporan	4	4	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Laporan	12	12	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	12	12	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	51	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kali	10	10	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Desa	10	10	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	12	12	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang di fasilitasi	Lembaga	12	12	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	kali	10	8	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	kali	10	8	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	lembaga	9	9	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	lembaga	9	90	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	desa	9	9	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang di fasilitasi	desa	9	9	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi/ Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah desa yang melakukan musrenbandes	Desa	1	1	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio Lembaga Kemasyarakatan yang di Berdayakan	Desa	7	7	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang di fasilitasi	Desa	7	7	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	12	12	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	264	264	-	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	23	23	-	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	23	23	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	7	7	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM yang dilaksanakan	Dokumen	4	4	-	-	-
				Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	4	4	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	laporan	4	4	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	60	60	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Kali	12	12	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja	Keluarga	55	55	-	-	-
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja	Keluarga	55	55	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	desa	11	11	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	desa	11	11	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa yang diperdayakan	desa	11	11	-	-	-
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Kelompok PKK yang di bina	Desa	11	11	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kegiatan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang dan Musrenbangdes yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kegiatan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	desa	16	16	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	desa	16	16	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di kecamatan	kegiatan	6	6	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan di desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah yang mengikuti kegiatan	Kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Desa	1	1	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Desa	1	1	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	9	9	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	Kelompok	9	9	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	9	6	-	-	-
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang di fasilitasi	Keluarga	9	6	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN GAYAM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	99,9	Ada salah satu sub kegiatan yang tidak tercapai secara optimal	Memantangkan perencanaan agar semua sub kegiatan program tercapai	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Desa	10	10	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Keluarga	11	11	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	11	11	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	desa	8	8	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kegiatan	1	1	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Laporan	4	4	-	-	-
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	120	120	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi/ Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	9	9	-	-	-
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah desa yang melakukan musrenbandes	Desa	9	9	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio Lembaga Kemasyarakatan yang di Berdayakan	Lembaga	9	9	-	-	-
				Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah kelompok usaha yang difasilitasi	Kelompok/Lembaga	9	9	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang di fasilitasi	Kali	9	9	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Laporan	19	19	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	19	19	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Laporan	12	12	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	19	19	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	69,18	Adanya kegiatan rapat yang tidak dilaksanakan	Melaksanaakn Koedinas dengan Pihak terkait dalam pelaksanaan rapat	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	4	3	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	laporan	4	3	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	2	2	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	kali	6	6	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Keg	14	14	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	Bln	12	12	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	Keg	2	2	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	14	14	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	Kali	2	2	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	97,88	Karena ada sub kegiatan tidak terlaksana sesuai target	melakukan PAK sesuai dengan kebutuhan	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	2	2	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	Kali	12	9	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	Kali	2	2	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan	laporan	12	12	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	99,71	Karena ada sub kegiatan tidak terlaksana sesuai target	melakukan PAK sesuai dengan kebutuhan	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	13	12	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	11	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN TALANGO		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	2	2	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor Forum Ulama dan Umaroh yang dilaksanakan	Kali	2 Kali	2 Kali	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kerjasama penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	12	12	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kerjasama penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	12	12	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	kali	6	6	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	kali	13	13	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah yang mengikuti kegiatan	Kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Koordinasi	1	1	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	Rapat	1	1	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	5	5	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	97,15	Ada salah satu sub kegiatan yang tidak tercapai secara optimal	Memantangkan perencanaan agar semua sub kegiatan program tercapai	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	8	8	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	Laporan	6	6	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	Laporan	2	2	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kerjasama penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dgn Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	11	11	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jml Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dgn Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Laporan	3	3	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	3	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kali	12	12	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	2	2	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	5	5	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanaka	Kali	1	1	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanaka	Kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Sinergitas dengan kepolisian RI,TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Rakorketentraman dan ketertiban masyarakat di laksanakan	Laporan	12	12	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	Laporan	2	2	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	kali	1	1	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	8	8	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kegiatan	4	4	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Kali	6	6	-	-	-
				Sinergitas dengan kepolisian RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Rakorketenteraman dan ketertiban masyarakat di laksanakan	Kali	6	6	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor Forum Ulama dan Umaroh yang	Kali	1	1	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	5	5	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kali	8	8	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	30	30	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12	12	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN KALIANGET		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Laporan	13	13	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Orang	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	jenis	3	3	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	6	6	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	Kali	6	6	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	%	100	60	Anggaran tidak terealisasi secara maksimal/tidak dilaksanakan karena anggota DPRD tidak menghadiri pada kegiatan tersebut, hal ini disesuaikan dengan Nara Sumber yang hadir karena bentuk pembayarannya harus sesuai kehadiran.	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kali	12	7	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Kali	100	100	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rakor Forkopimcam Yang Dilaksanakan	Kegiatan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan	2	2	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	Kali	12	9	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat	%	100	56,17	Terealisasi 46,09 % karena Anggota DPRD Sumenep khususnya dapil V tidak bisa menghadiri undangan kami dikarenakan banyak kegiatan yang lain yang bersamaan	Mengirimkan surat undangan dan berkomunikasi langsung ke para Anggota DPRD Dapil V	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kali	13	13	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Laporan	4	4	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	3	3	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kali	12	12	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Laporan	14	14	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kegiatan	2	2	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	2	2	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	kegiatan	2	2	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen	15	15	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	75	Tidak tercapai karena pelaksanaan rapat dengan dewan tidak terlaksana	Perlunya koordinasi terkait pelaksanaan rapat yang melibatkan dewan	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kali	12	12	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah bimtek yg dilaksanakan	Bimtek	1	1	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	Rakor	12	9	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Bln	12	12	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Bln	12	12	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kali	14	14	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	99,87	Ada sub kegiatan yang tidak tercapai secara optimal	Memantangkan perencanaan agar semua sub kegiatan program tercapai	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan	3	3	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	3	3	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Laporan	8	8	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	80	80	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	Kurangnya Tingkat Kehadiran Narasumber	Memastikan Kehadiran Narasumber	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Laporan	14	14	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kegiatan	2	2	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	3	3	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Orang	45	45	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	Belanja Honorarium Narasumber tidak teresap maksimal	Kegiatan tetap dilaksanakan dengan narasumber yang hadir	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan	13	13	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Peningkatan pematapan wawasan kebangsaan dan sosialisasi layanan publik	%	100	50,78	Karena ada sub kegiatan tidak terlaksana sesuai target	Melakukan PAK sesuai dengan kebutuhan	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Kegiatan	2	1	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	150	150	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	9	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	Kurangnya Tingkat Kehadiran Narasumber	Memastikan Kehadiran Narasumber	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Laporan	14	14	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kegiatan	2	2	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	75	Tidak Terlaksana Karena Adanya Pak Pada Salah Satu Sub Kegiatan	Perlu nya Penyelarasan Perencanaan Sehingga Penerapannya On The Track	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kali	12	10	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Kali	100	0	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	60	Belanja Alat/Bahan tidak terserap maksimal	Belanja Alat/ Bahan untuk Keg. menggunakan bahan tahun sebelumnya guna efisiensi anggaran	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	100	60	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	60	60	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang di laksanakan	dokumen	12	12	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	25	Tidak Terlaksana Karena Adanya Pak Pada Salah Satu Sub Kegiatan	Perlu nya Penyelarasan Perencanaan Sehingga Penerapannya On The Track	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kali	12	3	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	kali	100	100	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	kali	12	0	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	12	12	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	dokumen	1	1	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	12	12	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	7	7	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	7	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	8	8	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Desa	8	8	-	-	-
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang didampingi	Desa	8	8	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	%	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	desa	0	0	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	desa	10	10	-	-	-
		KECAMATAN RUBURU		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur pemerintahan Desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	Dilakukan PAK	Dialihkan untuk Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua (GESITS)	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur pemerintahan Desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur pemerintahan Desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur pemerintahan Desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	1	1	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	1	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerja sama yang dilaksanakan	Desa	16	16	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang diberikan pendampingan pengelolaan DD dan ADD	Desa	16	16	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	jenis	1	1	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	jenis	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	jenis	1	1	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	93,51	Karena ada beberapa sub kegiatan tidak terlaksana sesuai target	melakukan PAK sesuai dengan kebutuhan	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	13	11	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	Desa	2	2	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	Desa	10	8	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Desa	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kali/Buah	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	10	10	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	36	36	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	kegiatan	2	2	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	8	8	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	8	8	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	8	8	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Desa	8	8	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	kegiatan	2	2	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasiltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbangcam	Desa	9	9	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dengan Kerja Samadengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja sama yang dilaksanakan	Kali	9	9	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang di berikan pendampingan pengelolaan ADD dan DD	Desa	9	9	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	97,18	Karena ada beberapa sub kegiatan tidak terlaksana sesuai target	Melakukan PAK sesuai dengan kebutuhan	-
				Fasiltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	5	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	19	19	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	4	-	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	19	19	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	19	19	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	19	19	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tingkat pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diberikan	%	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	1	1	-	-	-
				Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	dokumen	1	1	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	Desa	12	12	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	Desa	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	Desa	11	11	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Desa	12	12	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Desa	20	20	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Desa	20	20	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	Desa	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Desa	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	Desa	20	20	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	8	8	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Desa	8	8	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	Desa	8	8			
				Fasilitasi Kerja Sama Antaradesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Desa	8	8	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	Desa	8	8	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	100	99,56	Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai secara optimal	Memantangkan perencanaan agar semua sub kegiatan program tercapai	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Monev dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	8	8	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	12	12	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Diberikan Fasilitasi	Orang	12	12	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	Desa	12	12	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antaradesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	kali/buah	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	Desa	12	12	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	kegiatan	3	3	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	1	1	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Diberikan Fasilitasi	orang	14	14	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	Desa	14	14	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antaradesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	kali	8	8	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang diberikan pendampingan pengelolaan DD dan ADD	Desa	14	14	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	5	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	14	14			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	3	3			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	14	14	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	14	14	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	14	14	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	2	2	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15	15	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15	15			
		KECAMATAN PASONGSONGAN		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	70	70	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	10	10	-	-	-
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	10	10	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tingkat pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	88,57	Karena ada sub kegiatan tidak terlaksana sesuai target	Melakukan PAK sesuai dengan kebutuhan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Desa	15	5	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	30	30	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15	15	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15	15	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	15	15	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	5	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	4	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	4	4	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	4	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kali	12	12	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	Desa	2	2	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	Desa	12	12	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100	100	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	7	7	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kerja sama yang dilaksanakan	Dokumen	4	4	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	89	Tidak Terlaksana Karena Adanya Pak Pada Salah Satu Sub Kegiatan	Perlu nya Penyelarasan Perencanaan Sehingga Penerapannya On The Track	-
				Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	12	11	-	-	-
				Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Dokumen	1	1	-	-	-
				Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	desa	2	2	-	-	-
				Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	desa	10	10	-	-	-
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	96,27	Capaian kinerja pada program ini sudah terealisasi namun ada beberapa rincian belanja yang tidak terealisasi seperti ATK dan Honor narsum karena menyesuaikan dengan perbup dan pembelanjaan harga di E-Katalog	Untuk perencanaan selanjutnya pembelanjaan ATK dan Honor Narsum agar menyesuaikan dengan perbup dan harga E-Katalog	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	14	13	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	10	7	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	1	1	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	2	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	3	1	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	25	25	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket	1	1	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	2	2	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	40	40	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	38	38	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	300	100	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peggadaan yang di beli	Unit	6	6	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	6	6	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang	4	4	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	2000	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Di Pelihara	20	20	20	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	13	13	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	4	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1			
				PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	98,41	Capaian kinerja pada program ini sudah terealisasi namun ada beberapa rincian belanja yang tidak terealisasi seperti ATK dan Honor narsum karena menyesuaikan dengan perbup dan pembelanjaan harga di E-Katalog	Untuk perencanaan selanjutnya pembelanjaan ATK dan Honor Narsum agar menyesuaikan dengan perbup dan harga E-Katalog	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	98,41	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	16	16	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	800	800	-	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	1200	700	-	-	-
				PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam PILKADA/PILEG/PILPRES	%	100	99,99	Capaian kinerja pada program ini sudah terealisasi namun ada beberapa rincian belanja yang tidak terealisasi seperti ATK dan Honor narsum karena menyesuaikan dengan perbup dan pembelanjaan harga di E-Katalog	Untuk perencanaan selanjutnya pembelanjaan ATK dan Honor Narsum agar menyesuaikan dengan perbup dan harga E-Katalog	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%	100	99,99	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	860	860	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Yang Terdaftar dan Teregister	%	100	100	Capaian kinerja pada program ini sudah terealisasi namun ada beberapa rincian belanja yang tidak terealisasi seperti ATK dan Honor narsum karena menyesuaikan dengan perbup dan pembelanjaan harga di E-Katalog	Untuk perencanaan selanjutnya pembelanjaan ATK dan Honor Narsum agar menyesuaikan dengan perbup dan harga E-Katalog	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	600	600	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	4	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	%	100	94,62	Capaian kinerja pada program ini sudah terealisasi namun ada beberapa rincian belanja yang tidak terealisasi seperti ATK dan Honor narsum karena menyesuaikan dengan perbup dan pembelanjaan harga di E-Katalog	Untuk perencanaan selanjutnya pembelanjaan ATK dan Honor Narsum agar menyesuaikan dengan perbup dan harga E-Katalog	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	%	100	94,62	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	800	750	-	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	725	725	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Yang Terjadi di Wilayah	%	100	100	Pada program ini, untuk capaian kerjanya sudah terealisasi sesuai target, akan tetapi pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan bantuan dana hibah kepada KODIM tidak terealisasi dan pada sub kegiatan FORKOPIMDA, anggarannya tidak terealisasi secara maksimal	Dalam perencanaan selanjutnya untuk dipertimbangkan kembali	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	20	20	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	800	800	-	-	-

3.3. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kebijakan Strategis yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.9. Kebijakan Strategis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pemberlakuan Sistem Remunerasi. (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Sebagai dasar Pemberian Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
2	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerjasama dengan	Surat Bapanas (Badan Pangan Nasional) No. 1007/TS.02.02/B/10/2023	a. Menyediakan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	BULOG dan Badan Usaha Pangan. (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)	Tanggal 9 Oktober 2023 perihal GPM Serentak dalam Rangka Hari Pangan Sedunia	terjangkau untuk masyarakat. b. Mengendalikan harga pangan untuk menekan inflasi terutama beras,
3	Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2023 2. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/127/KEP/435.013/2023 3. SK Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Nomor 188/50/KEP/435.109/2023 4. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tentang SOP Pengawasan Pupuk Bersubsidi Nomor 067/28/KEP/435.109/2023	a. Melakukan pendataan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi pada Lini III dan IV sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; b. Membuat rencana kerja pengawasan pupuk bersubsidi sesuai dengan hasil pendataan pelaksanaan kegiatan; c. Melakukan pemetaan wilayah pengawasan pupuk bersubsidi dan melaksanakan pengawasan pupuk bersubsidi secara berkala; d. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi tersebut.
4	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. (Satuan Polisi Pamong Praja)	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2	Untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 800)	
5	Pengawasan dan penertiban terhadap pungli. (Dinas Pendidikan)	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor 420.08/627/435.101.1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024	Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
6	Sekolah Pelaksana Pendidikan Diniyah. (Dinas Pendidikan)	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor 420/6.1/435.101.1/2023 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Pendidikan Diniyah Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023	Mengatur pelaksanaan wajib diniyah yang harus dilaksanakan di Kabupaten Sumenep
	Melakukan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 (Badan Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 dalam Rangka Penangan Piutang Pajak Daerah Dan Dampak ekonomi Akibat Wabah Corona Virus di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022	Menyelesaikan Piutang pada Pajak Daerah PBB-P2.
7	Menyusun pedoman standar satuan harga untuk upah tenaga kerja serta harga satuan bahan. (Sekretariat Daerah)	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Upah Tenaga Kerja dan Bahan Untuk Tahun Anggaran 2024	Pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024; pedoman untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
8	Menyusun pedoman analisa standar belanja suatu kegiatan. (Sekretariat Daerah)	Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023	Untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dengan demikian, OPD memiliki standar yang sama.
9	Menyusun pedoman standar harga belanja fisik untuk pekerjaan konstruksi. (Sekretariat Daerah)	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Fisik	Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan fisik dalam rangka pengendalian anggaran dan terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan fisik dalam rangka pengendalian anggaran dan terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.
10	Penggunaan pakaian batik tulis dengan corak khas Kabupaten Sumenep sebagai pakaian dinas ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumenep. (Sekretariat Daerah)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Sumenep	Melestarikan batik khas Sumenep serta pemberdayaan UMKM

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
11	Meningkatkan Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Layanan Jemput Bola Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perekaman KTP elektronik melalui kegiatan jemput bola ➤ Motivasi dan gerakan perekaman biometric bagi aparat sipil negara dan keluarganya ➤ Mensyaratkan perekaman biometric sebelum penerbitan KIA ➤ Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan akta kelahiran melalui MPP ➤ Mengembangkan aplikasi penerbitan akta kelahiran online ➤ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat akta kematian ➤ Mengembangkan pola pelayanan penerbitan akta kematian dengan bekerjasama dengan kelurahan/desa ➤ Mensosialisasikan manfaat KIA

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			➤ Mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

3.4. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumenep merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2022, yang secara resmi disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi yaitu pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan pemerintahan daerah. LKPJ berisi tentang laporan atas implementasi Kebijakan Pembangunan dan Keuangan yang sudah ditetapkan, maupun disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD yang dituangkan dalam dokumen RKPD, KUA PPAS dan APBD Tahun 2023.

LKPJ disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran yaitu 2023. Dengan disusunnya LKPJ, masyarakat diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan, berikut dengan hasil-hasil yang dicapai dan didukung dengan data-data yang riil, Update dan layak dipercaya.

Adapun beberapa catatan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep yang harus tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap hasil rekomendasi yang diberikan pada tahun anggaran 2022 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.10. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	<p>Segera lakukan regrouping sekolah yang jumlah siswanya tidak memenuhi standar minimal jumlah siswa. Sebagai contoh kecil hasil investigasi riil di lapangan ada sekolah yang terletak di Desa Batu Putih Desa Bun Barat dan Desa Basoka yang ternyata jumlah siswanya masih sangat minim sekali</p>	<p>Telah diterbitkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/37/435.013/2024 tentang Lokasi Penggabungan Sekolah Dasar Negeri. Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Anggaran Rp.359.828.700,00 Realisasi Rp.358.908.502,00</p>	<p>Sebanyak 17 Sekolah Dasar Negeri diregrouping dengan alasan penduduk minim dan berdekatan dengan sekolah dasar yang lain</p>
	<p>Perlu adanya pengawasan dan penertiban serta Tindakan tegas terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan liar (pungli) pada saat penerimaan siswa baru dimulai dari Tingkat Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)</p>	<p>Telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor 420.08/627/435.101.1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024, yang didalamnya diatur larangan serta pemberian sanksi bagi seluruh lembaga pendidikan di setiap jenjang dalam pelaksanaan PPDB. Diantaranya larangan untuk menambah jumlah pagu dana rombongan belajar, pembebanan biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan atau pemberkasan, penyuaapan, percaloan dan sejenisnya yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, serta melakukan Penerimaan pendaftaran diluar ketentuan</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi Peserta Didik Anggaran Rp. 2.823.887.900,00 Realisasi Rp.1.664.104.700,00</p>	<p>Dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap praktik pungutan liar pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2	Bahwa untuk menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan yang baik dan untuk meningkatkan kualitas serta pelayanan perbaikan jalan kepulauan di Kabupaten Sumenep. Maka Pansus merekomendasikan penggunaan Teknologi Aspal Buton (Asbuton) ;	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep menyambut baik dan mengapresiasi positif rekomendasi Pansus untuk penggunaan Teknologi Aspal Buton (Asbuton) di kepulauan. Namun dapat kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk mengoptimalkan kualitas pembangunan/pemeliharaan jalan dengan terbuka dan tidak terbatas pada konstruksi jalan tertentu	Untuk wilayah kepulauan khususnya Arjasa dan Kangayan, kami upayakan penggunaan material Hotmix sedangkan untuk wilayah kepulauan yang lain kita menggunakan material Coldmix. Dan kami terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terkait upaya menjaga kualitas pembangunan/pemeliharaan jalan yang efisien dan berkualitas untuk diterapkan di kepulauan.
	Lakukan pemetaan kondisi jalan yang perlu diperbaiki antara yang rusak ringan, sedang maupun berat. Sehingga setelah diketahui kondisinya untuk segera dilakukan perencanaan perbaikan/pemeliharaan jalan tersebut. (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Pemetaan kondisi jalan sudah dilaksanakan secara periodik setiap tahun melalui kegiatan Survey Kondisi Jalan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi ruas jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Sumenep pada tahun tersebut. Di tahun 2023 telah dianggarkan sub kegiatan survey kondisi jalan/jembatan sebesar Rp 300.000.000,-	Update terhadap data jalan dan kondisi jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk ruas jalan mana yang akan mendapat perbaikan /pemeliharaan jalan pada Tahun berikutnya. Tentunya dikombinasikan dengan pertimbangan teknis lainnya serta prioritas pembangunan.
3	Lakukan terobosan untuk pengelolaan area wisata dengan melibatkan pihak ketiga atau investor. Dengan catatan apabila Pemerintah Kabupaten tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pengoptimalan lokasi – lokasi pariwisata yang ada. (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)	Pemerintah Daerah telah mengadakan kegiatan Investaphoria bertempat di Surabaya yang dihadiri para investor, pengusaha pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta perwakilan dari beberapa Konjen diantaranya Jepang, Australia, Taiwan dan Singapura. Dalam acara tersebut diperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Sumenep sekaligus mengajak para investor untuk ikut berinvestasi dan meningkatkan pariwisata di Sumenep	Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata meningkat sehingga turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4	Pengaturan Sistem Pendistribusian Pupuk Secara Berkala sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	Pengaturan Sistem Pendistribusian Pupuk Secara Berkala sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat melalui monitoring, evaluasi dan analisa terhadap alokasi pupuk serta ketersediaan stok Tahun 2023 terhadap pengadaan, penebusan dan penyaluran yang dilakukan oleh Distributor maupun Kios Pengecer untuk memastikan tidak terjadinya kelangkaan pupuk, yang didukung dengan Subkegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pagu Anggaran Rp. 15.281.760	Sebagai kontrol dalam terbentuknya sistem administrasi yang baik pada pengelolaan pupuk bersubsidi dalam hal pelaksanaan, penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi baik dalam wilayah Distributor maupun Kios Pengecer.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Di antara pranata dan asas negara kesatuan Republik Indonesia yang diabadikan dalam UUD 1945, asas pemerintahan sendiri dan asas pemerintahan bersama mempunyai arti tersendiri. Di antaranya, hakikat otonomi daerah adalah hak masyarakat untuk mengatur keluarganya sendiri secara bebas. Kebebasan pengaturan merupakan bagian dari sistem distribusi kekuasaan, yang dilaksanakan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Sebagai cara pemerintah mengalihkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, desentralisasi kekuasaan selalu ditekankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas Pembantuan adalah bahwa pemerintah yang lebih tinggi mempercayakan kepada unit pemerintah yang lebih rendah untuk menangani urusan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi, dan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang di tingkat yang sama.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian

tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan, dan ayat (2) Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101).

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Sumenep menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 10.777.003.500,00, dengan capaian realisasi keuangan 90,82%. Anggaran Tugas Pembantuan tersebut dikelola oleh 2 Perangkat Daerah, adapun rincian dan capaian pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan,** Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 menerima pelimpahan dalam bentuk tugas pembantuan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, untuk Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 2.211.410.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan produksi garam masyarakat. Hal ini mengingat bahwa Madura, khususnya Kabupaten Sumenep, sebagai salah satu penghasil garam nasional.

Alokasi anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak dapat terealisasi karena terjadi Pemblokiran Pagu Anggaran, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perikanan	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.211.410.000	0,00	0,00	SP DIPA-032.07.4.059496 /2023
Total			2.211.410.000	0,00	0,00	

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 6 September 2023 Nomor B.4566/DJPRL.1/TU.310/IX/2023 perihal Blokir Alokasi Anggaran TP PUGaR Tahun 2023, bahwa usulan penggunaan Anggaran Belanja Tambahan KKP Tahun 2023 tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukan yang diperbolehkan, sehingga diberlakukan blokir *Automatic Adjustment*.

2. Urusan Bidang Pertanian, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep untuk pelaksanaan program : 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Berkualitas, 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan total alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 4.890.779.000,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur pertanian seperti Pengelolaan Jaringan Irigasi, embung dan dalam rangka memfasilitasi prasarana pasca panen hortikultura untuk mewujudkan

penumbuhan/pengembangan UMKM pada pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Disamping itu, untuk kegiatan fasilitasi penyebaran pupuk dan pestisida yang diberikan kepada masyarakat.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Alokasi dan Realisasi anggaran Pelaksanaan Program Urusan Pertanian Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Berkualitas	4.433.229.000	4.218.197.880	95,15	SP DIPA-018.08.4.059 185/2023
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	457.550.000	457.550.000	100	SP DIPA-018.04.4.059 1/2023
Total			4.890.779.000	4.675.747.880	95,60	

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya

Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintahan desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa

dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya

Transfer Dana Desa yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk 330 desa yang tersebar di 27 Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebesar Rp. 359.620.929.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 359.620.929.000,-.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PMK 201 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2023.
- c. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
- d. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumenep.
- e. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/570/KEP/435.013/2021 tentang Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

- f. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 82).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023.
- h. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023.

Alokasi anggaran serta realisasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumenep
Tahun 2023

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Kecamatan Kota Sumenep			
1. Kolor	1.459.525.000	1.459.525.000	100%
2. Pabian	1.128.557.000	1.128.557.000	100%
3. Marengan Daya	812.314.000	812.314.000	100%
4. Kacongan	963.405.000	963.405.000	100%
5. Paberasan	1.383.350.000	1.383.350.000	100%
6. Parsanga	1.413.791.000	1.413.791.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
7. Bangkal	903.330.000	903.330.000	100%
8. Kebunan	1.395.711.000	1.395.711.000	100%
9. Pamolokan	1.614.012.000	1.614.012.000	100%
10. Pangarangan	1.162.030.000	1.162.030.000	100%
11. Pandian	1.377.991.000	1.377.991.000	100%
12. Kebunagung	1.133.304.000	1.133.304.000	100%
Kecamatan Kalianget			
1. Pinggirpapas	1.703.520.000	1.703.520.000	100%
2. Karanganyar	1.078.109.000	1.078.109.000	100%
3. Marengan Laok	1.279.202.000	1.279.202.000	100%
4. Kertasada	1.180.540.000	1.180.540.000	100%
5. Kalimook	1.214.200.000	1.214.200.000	100%
6. Kalianget Barat	1.578.342.000	1.578.342.000	100%
7. Kalianget Timur	1.687.248.000	1.687.248.000	100%
Kecamatan Manding			
1. Kasengan	1.360.582.000	1.360.582.000	100%
2. Lalangon	1.102.176.000	1.102.176.000	100%
3. Tenonan	991.376.000	991.376.000	100%
4. Lanjuk	899.080.000	899.080.000	100%
5. Gadding	1.100.355.000	1.100.355.000	100%
6. Giring	1.183.380.000	1.183.380.000	100%
7. Gunung Kembar	880.812.000	880.812.000	100%
8. Jaba'an	804.212.000	804.212.000	100%
9. Manding Laok	1.076.171.000	1.076.171.000	100%
10. Manding Timur	878.127.000	878.127.000	100%
11. Manding Daya	849.439.000	849.439.000	100%
Kecamatan Talango			

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
1. Talango	1.487.158.000	1.487.158.000	100%
2. Padike	1.047.747.000	1.047.747.000	100%
3. Cabbiya	894.423.000	894.423.000	100%
4. Essang	1.106.232.000	1.106.232.000	100%
5. Kombang	1.063.021.000	1.063.021.000	100%
6. Poteran	933.998.000	933.998.000	100%
7. Palasa	1.776.592.000	1.776.592.000	100%
8. Gapurana	1.239.481.000	1.239.481.000	100%
Kecamatan Bluto			
1. Guluk Manjung	922.893.000	922.893.000	100%
2. Kapedi	1.697.799.000	1.697.799.000	100%
3. Pakandangan Barat	1.065.835.000	1.065.835.000	100%
4. Pakandangan Tengah	1.076.178.000	1.076.178.000	100%
5. Pakandangan Sangra	1.016.314.000	1.016.314.000	100%
6. Aeng Dake	1.127.783.000	1.127.783.000	100%
7. Aeng Baja Kenek	963.703.000	963.703.000	100%
8. Bluto	717.770.000	717.770.000	100%
9. Lobuk	1.175.152.000	1.175.152.000	100%
10. Bumbungan	796.744.000	796.744.000	100%
11. Masaran	810.714.000	810.714.000	100%
12. Palongan	1.121.493.000	1.121.493.000	100%
13. Aeng Baja Raja	761.117.000	761.117.000	100%
14. Karang Campaka	693.015.000	693.015.000	100%
15. Sera Barat	1.005.448.000	1.005.448.000	100%
16. Sera Tengah	651.061.000	651.061.000	100%
17. Sera Timur	812.490.000	812.490.000	100%
18. Gingging	772.140.000	772.140.000	100%
19. Errabu	672.447.000	672.447.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
20. Gilang	669.020.000	669.020.000	100%
Kecamatan Saronggi			
1. Pagar Batu	1.143.492.000	1.143.492.000	100%
2. Tanjung	1.191.605.000	1.191.605.000	100%
3. Kebundadap Timur	932.279.000	932.279.000	100%
4. Langsar	990.231.000	990.231.000	100%
5. Kebundadap Barat	829.583.000	829.583.000	100%
6. Saroka	822.316.000	822.316.000	100%
7. Tanamerah	1.164.223.000	1.164.223.000	100%
8. Nambakor	796.472.000	796.472.000	100%
9. Saronggi	830.985.000	830.985.000	100%
10. Moangan	878.862.000	878.862.000	100%
11. Juluk	1.038.152.000	1.038.152.000	100%
12. Aengtongtong	775.685.000	775.685.000	100%
13. Talang	1.549.331.000	1.549.331.000	100%
14. Kambingan Timur	991.185.000	991.185.000	100%
Kecamatan Lenteng			
1. Moncek Barat	753.058.000	753.058.000	100%
2. Moncek Tengah	1.014.830.000	1.014.830.000	100%
3. Moncek Timur	846.758.000	846.758.000	100%
4. Banaresep Timur	1.158.728.000	1.158.728.000	100%
5. Tarogan	815.270.000	815.270.000	100%
6. Kambingan Barat	1.130.344.000	1.130.344.000	100%
7. Poreh	1.044.939.000	1.044.939.000	100%
8. Lenteng Timur	1.660.048.000	1.660.048.000	100%
9. Lembung Timur	1.039.389.000	1.039.389.000	100%
10. Lenteng Barat	2.030.957.000	2.030.957.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
11. Banaresep Barat	1.046.873.000	1.046.873.000	100%
12. Billapora Rebba	1.376.338.000	1.376.338.000	100%
13. Lembung Barat	861.794.000	861.794.000	100%
14. Ellak Laok	997.195.000	997.195.000	100%
15. Ellak Daya	1.485.236.000	1.485.236.000	100%
16. Daramista	912.918.000	912.918.000	100%
17. Jambu	854.580.000	854.580.000	100%
18. Cangkreg	1.004.979.000	1.004.979.000	100%
19. Meddelan	871.062.000	871.062.000	100%
20. Sendir	711.885.000	711.885.000	100%
Kecamatan Giligenting			
1. Galis	932.666.000	932.666.000	100%
2. Gedugan	1.008.112.000	1.008.112.000	100%
3. Bringsang	820.284.000	820.284.000	100%
4. Aenganyar	1.024.670.000	1.024.670.000	100%
5. Lombang	1.033.686.000	1.033.686.000	100%
6. Jate	890.660.000	890.660.000	100%
7. Banbaru	945.257.000	945.257.000	100%
8. Banmaleng	1.226.310.000	1.226.310.000	100%
Kecamatan Guluk-Guluk			
1. Bakeong	1.378.203.000	1.378.203.000	100%
2. Payudan Dundang	957.769.000	957.769.000	100%
3. Pordapor	1.060.151.000	1.060.151.000	100%
4. Guluk-Guluk	2.357.933.000	2.357.933.000	100%
5. Ketawang Laok	889.021.000	889.021.000	100%
6. Pananggungan	741.714.000	741.714.000	100%
7. Bragung	1.854.801.000	1.854.801.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
8. Tambuko	836.666.000	836.666.000	100%
9. Payudan Nangger	891.617.000	891.617.000	100%
10. Payudan Daleman	885.357.000	885.357.000	100%
11. Payudan Karangsokon	913.651.000	913.651.000	100%
12. Batuampar	1.640.962.000	1.640.962.000	100%
Kecamatan Ganding			
1. Bataal Barat	760.566.000	760.566.000	100%
2. Bataal Timur	960.536.000	960.536.000	100%
3. Rombiya Barat	954.506.000	954.506.000	100%
4. Rombiya Timur	1.104.209.000	1.104.209.000	100%
5. Talaga	1.125.133.000	1.125.133.000	100%
6. Billapora Barat	984.255.000	984.255.000	100%
7. Billapora Timur	775.961.000	775.961.000	100%
8. Ganding	1.274.993.000	1.274.993.000	100%
9. Gadu Timur	971.840.000	971.840.000	100%
10. Gadu Barat	1.352.833.000	1.352.833.000	100%
11. Ketawang Larangan	1.232.108.000	1.232.108.000	100%
12. Ketawang Parebaan	865.749.000	865.749.000	100%
13. Ketawang Daleman	810.547.000	810.547.000	100%
14. Ketawang Karay	1.494.321.000	1.494.321.000	100%
Kecamatan Pragaan			
1. Kaduara Timur	1.204.394.000	1.204.394.000	100%
2. Sendang	800.682.000	800.682.000	100%
3. Rombasan	740.403.000	740.403.000	100%
4. Sentol Laok	831.405.000	831.405.000	100%
5. Larangan Perreng	1.444.613.000	1.444.613.000	100%
6. Sentol Daya	1.333.011.000	1.333.011.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
7. Pakamban Daya	1.115.076.000	1.115.076.000	100%
8. Pakamban Laok	903.408.000	903.408.000	100%
9. Jaddung	1.809.112.000	1.809.112.000	100%
10. Pragaan Laok	1.531.899.000	1.531.899.000	100%
11. Pragaan Daya	2.465.538.000	2.465.538.000	100%
12. Prenduan	1.986.925.000	1.986.925.000	100%
13. Aeng Panas	1.101.488.000	1.101.488.000	100%
14. Karduluk	2.727.364.000	2.727.364.000	100%
Kecamatan Ambunten			
1. Ambunten Barat	998.459.000	998.459.000	100%
2. Ambunten Tengah	1.738.081.000	1.738.081.000	100%
3. Ambunten Timur	1.205.902.000	1.205.902.000	100%
4. Tambaagung Barat	909.725.000	909.725.000	100%
5. Tambaagung Tengah	1.155.038.000	1.155.038.000	100%
6. Tambaagung Ares	857.211.000	857.211.000	100%
7. Sogian	1.183.876.000	1.183.876.000	100%
8. Tambaagung Timur	1.058.278.000	1.058.278.000	100%
9. Bukabu	838.971.000	838.971.000	100%
10. Campor Barat	792.539.000	792.539.000	100%
11. Keles	790.830.000	790.830.000	100%
12. Campor Timur	738.432.000	738.432.000	100%
13. Belluk Ares	872.079.000	872.079.000	100%
14. Belluk Kenek	877.087.000	877.087.000	100%
15. Belluk Raja	897.218.000	897.218.000	100%
Kecamatan Pasongsongan			
1. Montorna	1.703.995.000	1.703.995.000	100%
2. Prancak	1.161.376.000	1.161.376.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Campaka	1.638.770.000	1.638.770.000	100%
4. Rajun	947.870.000	947.870.000	100%
5. Lebeng Timur	1.023.186.000	1.023.186.000	100%
6. Lebeng Barat	1.164.888.000	1.164.888.000	100%
7. Soddara	1.186.462.000	1.186.462.000	100%
8. Pasongsongan	1.596.702.000	1.596.702.000	100%
9. Padangdangan	1.121.526.000	1.121.526.000	100%
10. Panaongan	1.177.672.000	1.177.672.000	100%
Kecamatan Dasuk			
1. Slopeng	800.361.000	800.361.000	100%
2. Semaan	831.323.000	831.323.000	100%
3. Batubellah Barat	946.216.000	946.216.000	100%
4. Batubellah Timur	1.014.517.000	1.014.517.000	100%
5. Kecer	865.061.000	865.061.000	100%
6. Bates	815.525.000	815.525.000	100%
7. Bringin	1.299.897.000	1.299.897.000	100%
8. Jelbudan	984.171.000	984.171.000	100%
9. Kerta Barat	758.143.000	758.143.000	100%
10. Kerta Timur	1.049.230.000	1.049.230.000	100%
11. Nyapar	1.331.134.000	1.331.134.000	100%
12. Dasuk Barat	771.735.000	771.735.000	100%
13. Dasuk Timur	690.213.000	690.213.000	100%
14. Dasuk Laok	985.894.000	985.894.000	100%
15. Mantajun	1.125.292.000	1.125.292.000	100%
Kecamatan Rubaru			
1. Mandala	1.260.724.000	1.260.724.000	100%
2. Pakondang	1.172.019.000	1.172.019.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Matanair	1.358.061.000	1.358.061.000	100%
4. Tambaksari	865.027.000	865.027.000	100%
5. Banasare	942.652.000	942.652.000	100%
6. Bunbarat	1.024.509.000	1.024.509.000	100%
7. Karang Nangka	1.090.625.000	1.090.625.000	100%
8. Basoka	1.262.120.000	1.262.120.000	100%
9. Duko	1.410.549.000	1.410.549.000	100%
10. Rubaru	1.182.156.000	1.182.156.000	100%
11. Kalebengan	1.118.741.000	1.118.741.000	100%
Kecamatan Batang-Batang			
1. Kolpo	1.140.862.000	1.140.862.000	100%
2. Tamidung	1.095.344.000	1.095.344.000	100%
3. Batang-Batang Laok	1.083.542.000	1.083.542.000	100%
4. Batang-Batang Daya	1.271.638.000	1.271.638.000	100%
5. Totosan	947.007.000	947.007.000	100%
6. Banuaju Barat	801.132.000	801.132.000	100%
7. Banuaju Timur	1.014.077.000	1.014.077.000	100%
8. Jenangger	1.013.528.000	1.013.528.000	100%
9. Nyabakan Timur	1.256.769.000	1.256.769.000	100%
10. Nyabakan Barat	1.588.799.000	1.588.799.000	100%
11. Jangkong	903.123.000	903.123.000	100%
12. Legung Barat	1.242.890.000	1.242.890.000	100%
13. Legung Timur	1.294.360.000	1.294.360.000	100%
14. Dapenda	1.264.372.000	1.264.372.000	100%
15. Bilangan	701.905.000	701.905.000	100%
16. Lombang	721.095.000	721.095.000	100%
Kecamatan Batuputih			

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
1. Aengmerah	1.187.535.000	1.187.535.000	100%
2. Tangedan	776.974.000	776.974.000	100%
3. Juruan Laok	1.290.941.000	1.290.941.000	100%
4. Juruan Daya	1.108.948.000	1.108.948.000	100%
5. Badur	787.568.000	787.568.000	100%
6. Gedang-Gedang	939.413.000	939.413.000	100%
7. Batuputih Kenek	977.961.000	977.961.000	100%
8. Batuputih Laok	1.052.877.000	1.052.877.000	100%
9. Batuputih Daya	1.077.837.000	1.077.837.000	100%
10. Bantelan	1.020.484.000	1.020.484.000	100%
11. Larangan Barma	1.187.369.000	1.187.369.000	100%
12. Larangan Kerta	781.865.000	781.865.000	100%
13. Bulla'an	1.599.909.000	1.599.909.000	100%
14. Sergang	789.651.000	789.651.000	100%
Kecamatan Dungkek			
1. Candi	812.014.000	812.014.000	100%
2. Jadung	885.200.000	885.200.000	100%
3. Romben Barat	928.330.000	928.330.000	100%
4. Romben Rana	965.877.000	965.877.000	100%
5. Romben Guna	955.305.000	955.305.000	100%
6. Taman Sare	867.287.000	867.287.000	100%
7. Bicabbi	1.004.727.000	1.004.727.000	100%
8. Dungkek	1.051.773.000	1.051.773.000	100%
9. Bunpenang	1.019.829.000	1.019.829.000	100%
10. Bungin-Bungin	615.909.000	615.909.000	100%
11. Lapa Taman	1.042.590.000	1.042.590.000	100%
12. Lapa Laok	780.144.000	780.144.000	100%
13. Lapa Daya	830.162.000	830.162.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
14. Bancamara	864.712.000	864.712.000	100%
15. Banra'as	931.869.000	931.869.000	100%
Kecamatan Gapura			
1. Grujugan	1.289.202.000	1.289.202.000	100%
2. Longos	1.421.488.000	1.421.488.000	100%
3. Andulang	1.215.179.000	1.215.179.000	100%
4. Gapura Timur	1.004.670.000	1.004.670.000	100%
5. Mandala	824.994.000	824.994.000	100%
6. Gersik Putih	906.858.000	906.858.000	100%
7. Gapura Tengah	992.861.000	992.861.000	100%
8. Gapura Barat	948.785.000	948.785.000	100%
9. Panagan	732.580.000	732.580.000	100%
10. Palo'lo'an	891.437.000	891.437.000	100%
11. Banjar Timur	685.115.000	685.115.000	100%
12. Banjar Barat	1.128.464.000	1.128.464.000	100%
13. Batudinding	873.217.000	873.217.000	100%
14. Baban	868.223.000	868.223.000	100%
15. Karangbudi	941.011.000	941.011.000	100%
16. Braji	922.044.000	922.044.000	100%
17. Poja	891.510.000	891.510.000	100%
Kecamatan Gayam			
1. Pancor	1.302.122.000	1.302.122.000	100%
2. Prambanan	1.160.248.000	1.160.248.000	100%
3. Gendang Timur	1.110.136.000	1.110.136.000	100%
4. Karang Tengah	835.563.000	835.563.000	100%
5. Jambuir	1.059.884.000	1.059.884.000	100%
6. Gayam	1.090.571.000	1.090.571.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
7. Kalowang	988.492.000	988.492.000	100%
8. Nyamplong	859.750.000	859.750.000	100%
9. Gendang Barat	1.058.037.000	1.058.037.000	100%
10. Tarebung	927.371.000	927.371.000	100%
Kecamatan Nonggunong			
1. Nonggunong	816.794.000	816.794.000	100%
2. Sumber	753.982.000	753.982.000	100%
3. Tanah Merah	778.590.000	778.590.000	100%
4. Sokaramme Timur	881.625.000	881.625.000	100%
5. Sokaramme Paseser	1.224.336.000	1.224.336.000	100%
6. Talaga	831.652.000	831.652.000	100%
7. Rosong	746.440.000	746.440.000	100%
8. Sonok	1.143.082.000	1.143.082.000	100%
Kecamatan Ra'as			
1. Ketupat	1.115.925.000	1.115.925.000	100%
2. Jungkat	1.016.162.000	1.016.162.000	100%
3. Kropoh	1.118.334.000	1.118.334.000	100%
4. Karangnangka	963.399.000	963.399.000	100%
5. Alas Malang	867.715.000	867.715.000	100%
6. Poteran	827.229.000	827.229.000	100%
7. Brakas	1.471.241.000	1.471.241.000	100%
8. Tonduk	1.704.830.000	1.704.830.000	100%
9. Guwa-Guwa	1.136.122.000	1.136.122.000	100%
Kecamatan Masalembu			
1. Sukajeruk	1.184.829.000	1.184.829.000	100%
2. Masalima	1.670.102.000	1.670.102.000	100%
3. Masakambing	861.633.000	861.633.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
4. Kramian	1.557.663.000	1.557.663.000	100%
Kecamatan Arjasa			
1. Pajanangger	1.132.415.000	1.132.415.000	100%
2. Sawah Sumur	1.141.064.000	1.141.064.000	100%
3. Paseraman	1.226.849.000	1.226.849.000	100%
4. Gelaman	1.791.437.000	1.791.437.000	100%
5. Buddi	961.864.000	961.864.000	100%
6. Kolo-Kolo	1.156.530.000	1.156.530.000	100%
7. Angkatan	1.062.825.000	1.062.825.000	100%
8. Kalisangka	903.667.000	903.667.000	100%
9. Bilis-Bilis	925.912.000	925.912.000	100%
10. Laok Jang-Jang	1.027.292.000	1.027.292.000	100%
11. Sumberangka	884.615.000	884.615.000	100%
12. Duko	987.641.000	987.641.000	100%
13. Kalikatak	903.967.000	903.967.000	100%
14. Arjasa	1.036.857.000	1.036.857.000	100%
15. Kalinganyar	814.872.000	814.872.000	100%
16. Angon-Angon	1.108.058.000	1.108.058.000	100%
17. Sambakati	950.298.000	950.298.000	100%
18. Pandeman	1.050.567.000	1.050.567.000	100%
19. Pabean	693.290.000	693.290.000	100%
Kecamatan Sapeken			
1. Sepanjang	2.169.596.000	2.169.596.000	100%
2. Tanjung Kiaok	1.850.135.000	1.850.135.000	100%
3. Sakala	953.446.000	953.446.000	100%
4. Pagerungan Besar	1.833.238.000	1.833.238.000	100%
5. Pagerungan Kecil	2.170.011.000	2.170.011.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
6. Saseel	1.428.832.000	1.428.832.000	100%
7. Sapeken	2.043.696.000	2.043.696.000	100%
8. Sabunten	1.375.520.000	1.375.520.000	100%
9. Paliat	1.194.357.000	1.194.357.000	100%
10. Sadulang	1.200.682.000	1.200.682.000	100%
11. Saur Saebus	1.386.046.000	1.386.046.000	100%
Kecamatan Batuan			
1. Patean	883.391.000	883.391.000	100%
2. Babbalan	1.205.645.000	1.205.645.000	100%
3. Gedungan	931.479.000	931.479.000	100%
4. Gunggung	1.096.425.000	1.096.425.000	100%
5. Batuan	1.021.095.000	1.021.095.000	100%
6. Torbang	990.510.000	990.510.000	100%
7. Galugur	707.113.000	707.113.000	100%
Kecamatan Kangayan			
1. Saobi	1.135.762.000	1.135.762.000	100%
2. Kangayan	1.347.567.000	1.347.567.000	100%
3. Torjek	1.216.575.000	1.216.575.000	100%
4. Cangkramaan	850.139.000	850.139.000	100%
5. Tembayanan	791.544.000	791.544.000	100%
6. Batuputih	941.664.000	941.664.000	100%
7. Daandung	1.151.192.000	1.151.192.000	100%
8. Timur Jang-Jang	1.134.174.000	1.134.174.000	100%
9. Jukong-Jukong	1.006.101.000	1.006.101.000	100%
Jumlah	359.620.929.000	359.620.929.000	100%

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD. Pada tahun 2023 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di 330 Pemerintah Desa yang tersebar di 27 Kecamatan wilayah daratan dan kepulauan dengan mekanisme melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke (Rekening Kas Desa), adalah sebesar Rp. 131.683.768.430,- dan terealisasi sebesar Rp. 131.683.768.430,00.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
- b. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/570/KEP/435.013/2021 tentang Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- c. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 100 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023.

Alokasi anggaran serta realisasi Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah Desa, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Sumenep Tahun 2022

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Kecamatan Kota Sumenep			
1. Kolor	415.191.000	415.191.000	100%
2. Pabian	390.484.000	390.484.000	100%
3. Marengan Daya	375.098.000	375.098.000	100%
4. Kacong	375.848.000	375.848.000	100%
5. Paberasan	390.141.000	390.141.000	100%
6. Parsanga	365.766.000	365.766.000	100%
7. Bangkal	350.512.000	350.512.000	100%
8. Kebunan	365.455.000	365.455.000	100%
9. Pamolokan	390.847.000	390.847.000	100%
10. Pangarangan	365.158.000	365.158.000	100%
11. Pandian	365.267.000	365.267.000	100%
12. Kebunagung	350.549.000	350.549.000	100%
Kecamatan Kalianget			
1. Pinggirpapas	366.987.000	366.987.000	100%
2. Karanganyar	390.488.000	390.488.000	100%
3. Marengan Laok	391.630.000	391.630.000	100%
4. Kertasada	390.035.000	390.035.000	100%
5. Kalimook	367.118.000	367.118.000	100%
6. Kalianget Barat	393.007.000	393.007.000	100%
7. Kalianget Timur	392.200.000	392.200.000	100%
Kecamatan Manding			
1. Kasengan	366.249.000	366.249.000	100%
2. Lalangon	336.659.000	336.659.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Tenonan	391.824.000	391.824.000	100%
4. Lanjuk	377.117.000	377.117.000	100%
5. Gadding	467.683.000	467.683.000	100%
6. Giring	440.612.000	440.612.000	100%
7. Gunung Kembar	376.152.000	376.152.000	100%
8. Jaba'an	425.004.000	425.004.000	100%
9. Manding Laok	390.609.000	390.609.000	100%
10. Manding Timur	402.861.000	402.861.000	100%
11. Manding Daya	337.058.000	337.058.000	100%
Kecamatan Talango			
1. Talango	441.319.000	441.319.000	100%
2. Padike	465.312.000	465.312.000	100%
3. Cabbiya	426.909.000	426.909.000	100%
4. Essang	465.463.000	465.463.000	100%
5. Kombang	442.440.000	442.440.000	100%
6. Poteran	491.902.000	491.902.000	100%
7. Palasa	491.717.000	491.717.000	100%
8. Gapurana	639.153.000	639.153.000	100%
Kecamatan Bluto			
1. Guluk Manjung	327.815.000	327.815.000	100%
2. Kapedi	448.377.000	448.377.000	100%
3. Pakandangan Barat	417.776.000	417.776.000	100%
4. Pakandangan Tengah	337.982.000	337.982.000	100%
5. Pakandangan Sangra	354.442.000	354.442.000	100%
6. Aeng Dake	392.841.000	392.841.000	100%
7. Aeng Baja Kenek	369.512.000	369.512.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
8. Bluto	351.017.000	351.017.000	100%
9. Lobuk	392.129.000	392.129.000	100%
10. Bumbungan	353.147.000	353.147.000	100%
11. Masaran	313.595.000	313.595.000	100%
12. Palongan	328.328.000	328.328.000	100%
13. Aeng Baja Raja	312.380.000	312.380.000	100%
14. Karang Campaka	312.584.000	312.584.000	100%
15. Sera Barat	362.670.000	362.670.000	100%
16. Sera Tengah	312.095.000	312.095.000	100%
17. Sera Timur	337.114.000	337.114.000	100%
18. Gingging	338.242.000	338.242.000	100%
19. Errabu	312.271.000	312.271.000	100%
20. Gilang	312.274.000	312.274.000	100%
Kecamatan Saronggi			
1. Pagar Batu	393.412.000	393.412.000	100%
2. Tanjung	393.017.000	393.017.000	100%
3. Kebundadap Timur	391.905.000	391.905.000	100%
4. Langsar	489.781.000	489.781.000	100%
5. Kebundadap Barat	311.731.000	311.731.000	100%
6. Saroka	375.254.000	375.254.000	100%
7. Tanamerah	417.243.000	417.243.000	100%
8. Nambakor	338.588.000	338.588.000	100%
9. Saronggi	376.524.000	376.524.000	100%
10. Moangan	312.733.000	312.733.000	100%
11. Juluk	352.113.000	352.113.000	100%
12. Aengtongtong	337.838.000	337.838.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
13. Talang	443.603.000	443.603.000	100%
14. Kambingan Timur	312.310.000	312.310.000	100%
Kecamatan Lenteng			
1. Moncek Barat	313.280.000	313.280.000	100%
2. Moncek Tengah	352.613.000	352.613.000	100%
3. Moncek Timur	353.603.000	353.603.000	100%
4. Banaresep Timur	443.683.000	443.683.000	100%
5. Tarogan	311.963.000	311.963.000	100%
6. Kambingan Barat	312.953.000	312.953.000	100%
7. Poreh	391.361.000	391.361.000	100%
8. Lenteng Timur	440.380.000	440.380.000	100%
9. Lembung Timur	392.478.000	392.478.000	100%
10. Lenteng Barat	543.537.000	543.537.000	100%
11. Banaresep Barat	312.998.000	312.998.000	100%
12. Billapora Rebba	418.801.000	418.801.000	100%
13. Lembung Barat	327.765.000	327.765.000	100%
14. Ellak Laok	440.327.000	440.327.000	100%
15. Ellak Daya	415.988.000	415.988.000	100%
16. Daramista	375.854.000	375.854.000	100%
17. Jambu	336.394.000	336.394.000	100%
18. Cangkreng	351.878.000	351.878.000	100%
19. Meddelan	377.451.000	377.451.000	100%
20. Sendir	336.512.000	336.512.000	100%
Kecamatan Giligenting			
1. Galis	443.996.000	443.996.000	100%
2. Gedugan	466.947.000	466.947.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Bringsang	362.290.000	362.290.000	100%
4. Aenganyar	441.146.000	441.146.000	100%
5. Lombang	442.662.000	442.662.000	100%
6. Jate	377.386.000	377.386.000	100%
7. Banbaru	351.900.000	351.900.000	100%
8. Banmaleng	391.048.000	391.048.000	100%
Kecamatan Guluk-Guluk			
1. Bakeong	495.501.000	495.501.000	100%
2. Payudan Dundang	380.483.000	380.483.000	100%
3. Pordapor	378.964.000	378.964.000	100%
4. Guluk-Guluk	647.812.000	647.812.000	100%
5. Ketawang Laok	402.535.000	402.535.000	100%
6. Pananggungan	312.470.000	312.470.000	100%
7. Bragung	472.930.000	472.930.000	100%
8. Tambuko	353.629.000	353.629.000	100%
9. Payudan Nangger	378.411.000	378.411.000	100%
10. Payudan Daleman	394.726.000	394.726.000	100%
11. Payudan Karangson	379.187.000	379.187.000	100%
12. Batuampar	570.995.000	570.995.000	100%
Kecamatan Ganding			
1. Bataal Barat	361.543.000	361.543.000	100%
2. Bataal Timur	385.652.000	385.652.000	100%
3. Rombiya Barat	387.339.000	387.339.000	100%
4. Rombiya Timur	475.550.000	475.550.000	100%
5. Talaga	426.696.000	426.696.000	100%
6. Billapora Barat	361.852.000	361.852.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
7. Billapora Timur	387.474.000	387.474.000	100%
8. Ganding	468.204.000	468.204.000	100%
9. Gadu Timur	466.339.000	466.339.000	100%
10. Gadu Barat	467.996.000	467.996.000	100%
11. Ketawang Larangan	377.695.000	377.695.000	100%
12. Ketawang Parebaan	312.050.000	312.050.000	100%
13. Ketawang Daleman	377.890.000	377.890.000	100%
14. Ketawang Karay	416.665.000	416.665.000	100%
Kecamatan Pragaan			
1. Kaduara Timur	378.071.000	378.071.000	100%
2. Sendang	336.995.000	336.995.000	100%
3. Rombasan	311.927.000	311.927.000	100%
4. Sentol Laok	312.365.000	312.365.000	100%
5. Larangan Perreng	442.237.000	442.237.000	100%
6. Sentol Daya	395.567.000	395.567.000	100%
7. Pakamban Daya	467.443.000	467.443.000	100%
8. Pakamban Laok	376.953.000	376.953.000	100%
9. Jaddung	422.034.000	422.034.000	100%
10. Pragaan Laok	444.393.000	444.393.000	100%
11. Pragaan Daya	447.882.000	447.882.000	100%
12. Prenduan	442.418.000	442.418.000	100%
13. Aeng Panas	392.350.000	392.350.000	100%
14. Karduluk	618.747.000	618.747.000	100%
Kecamatan Ambunten			
1. Ambunten Barat	392.337.000	392.337.000	100%
2. Ambunten Tengah	492.508.000	492.508.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Ambunten Timur	366.551.000	366.551.000	100%
4. Tambaagung Barat	338.669.000	338.669.000	100%
5. Tambaagung Tengah	369.753.000	369.753.000	100%
6. Tambaagung Ares	354.861.000	354.861.000	100%
7. Sogian	352.289.000	352.289.000	100%
8. Tambaagung Timur	377.196.000	377.196.000	100%
9. Bukabu	336.900.000	336.900.000	100%
10. Campor Barat	351.242.000	351.242.000	100%
11. Keles	363.032.000	363.032.000	100%
12. Campor Timur	311.885.000	311.885.000	100%
13. Belluk Ares	337.390.000	337.390.000	100%
14. Belluk Kenek	338.173.000	338.173.000	100%
15. Belluk Raja	391.463.000	391.463.000	100%
Kecamatan Pasongsongan			
1. Montorna	496.825.000	496.825.000	100%
2. Prancak	497.774.000	497.774.000	100%
3. Campaka	445.357.000	445.357.000	100%
4. Rajun	392.432.000	392.432.000	100%
5. Lebeng Timur	492.394.000	492.394.000	100%
6. Lebeng Barat	468.053.000	468.053.000	100%
7. Soddara	493.938.000	493.938.000	100%
8. Pasongsongan	444.280.000	444.280.000	100%
9. Padangdangan	440.285.000	440.285.000	100%
10. Panaongan	465.707.000	465.707.000	100%
Kecamatan Dasuk			
1. Slopeng	375.585.000	375.585.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
2. Semaan	361.658.000	361.658.000	100%
3. Batubellah Barat	363.133.000	363.133.000	100%
4. Batubellah Timur	337.225.000	337.225.000	100%
5. Kecer	363.107.000	363.107.000	100%
6. Bates	337.328.000	337.328.000	100%
7. Bringin	392.498.000	392.498.000	100%
8. Jelbudan	392.226.000	392.226.000	100%
9. Kerta Barat	360.809.000	360.809.000	100%
10. Kerta Timur	361.583.000	361.583.000	100%
11. Nyapar	352.272.000	352.272.000	100%
12. Dasuk Barat	336.988.000	336.988.000	100%
13. Dasuk Timur	336.821.000	336.821.000	100%
14. Dasuk Laok	352.455.000	352.455.000	100%
15. Mantajun	440.831.000	440.831.000	100%
Kecamatan Rubaru			
1. Mandala	396.551.000	396.551.000	100%
2. Pakondang	370.327.000	370.327.000	100%
3. Matanair	369.830.000	369.830.000	100%
4. Tambaksari	378.250.000	378.250.000	100%
5. Banasare	353.082.000	353.082.000	100%
6. Bunbarat	353.026.000	353.026.000	100%
7. Karang Nangka	370.252.000	370.252.000	100%
8. Basoka	396.053.000	396.053.000	100%
9. Duko	366.410.000	366.410.000	100%
10. Rubaru	393.936.000	393.936.000	100%
11. Kalebengan	353.630.000	353.630.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Kecamatan Batang-Batang			
1. Kolpo	442.628.000	442.628.000	100%
2. Tamidung	468.699.000	468.699.000	100%
3. Batang-Batang Laok	466.317.000	466.317.000	100%
4. Batang-Batang Daya	616.980.000	616.980.000	100%
5. Totosan	376.924.000	376.924.000	100%
6. Banuaju Barat	401.891.000	401.891.000	100%
7. Banuaju Timur	400.878.000	400.878.000	100%
8. Jenangger	426.899.000	426.899.000	100%
9. Nyabakan Timur	443.591.000	443.591.000	100%
10. Nyabakan Barat	445.221.000	445.221.000	100%
11. Jangkong	362.487.000	362.487.000	100%
12. Legung Barat	401.627.000	401.627.000	100%
13. Legung Timur	489.946.000	489.946.000	100%
14. Dapenda	516.200.000	516.200.000	100%
15. Bilangan	336.764.000	336.764.000	100%
16. Lombang	362.099.000	362.099.000	100%
Kecamatan Batuputih			
1. Aengmerah	468.024.000	468.024.000	100%
2. Tangedan	361.889.000	361.889.000	100%
3. Juruan Laok	491.672.000	491.672.000	100%
4. Juruan Daya	442.078.000	442.078.000	100%
5. Badur	387.197.000	387.197.000	100%
6. Gedang-Gedang	417.722.000	417.722.000	100%
7. Batuputih Kenek	415.851.000	415.851.000	100%
8. Batuputih Laok	489.954.000	489.954.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
9. Batuputih Daya	441.358.000	441.358.000	100%
10. Bantelan	377.740.000	377.740.000	100%
11. Larangan Barma	419.730.000	419.730.000	100%
12. Larangan Kerta	386.486.000	386.486.000	100%
13. Bulla'an	419.177.000	419.177.000	100%
14. Sergang	402.328.000	402.328.000	100%
Kecamatan Dungkek			
1. Candi	425.457.000	425.457.000	100%
2. Jadung	415.535.000	415.535.000	100%
3. Romben Barat	386.933.000	386.933.000	100%
4. Romben Rana	336.199.000	336.199.000	100%
5. Romben Guna	415.919.000	415.919.000	100%
6. Taman Sare	351.540.000	351.540.000	100%
7. Bicabbi	400.529.000	400.529.000	100%
8. Dungkek	415.215.000	415.215.000	100%
9. Bunpenang	336.873.000	336.873.000	100%
10. Bungin-Bungin	312.041.000	312.041.000	100%
11. Lapa Taman	377.036.000	377.036.000	100%
12. Lapa Laok	376.420.000	376.420.000	100%
13. Lapa Daya	336.654.000	336.654.000	100%
14. Bancamara	464.118.000	464.118.000	100%
15. Banra'as	439.469.000	439.469.000	100%
Kecamatan Gapura			
1. Grujugan	390.817.000	390.817.000	100%
2. Longos	441.625.000	441.625.000	100%
3. Andulang	415.552.000	415.552.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
4. Gapura Timur	376.045.000	376.045.000	100%
5. Mandala	311.540.000	311.540.000	100%
6. Gersik Putih	337.090.000	337.090.000	100%
7. Gapura Tengah	337.099.000	337.099.000	100%
8. Gapura Barat	415.296.000	415.296.000	100%
9. Panagan	312.003.000	312.003.000	100%
10. Palo'lo'an	352.140.000	352.140.000	100%
11. Banjar Timur	311.818.000	311.818.000	100%
12. Banjar Barat	352.309.000	352.309.000	100%
13. Batudinding	337.017.000	337.017.000	100%
14. Baban	350.871.000	350.871.000	100%
15. Karangbudi	352.299.000	352.299.000	100%
16. Braji	336.784.000	336.784.000	100%
17. Poja	337.136.000	337.136.000	100%
Kecamatan Gayam			
1. Pancor	518.668.000	518.668.000	100%
2. Prambanan	542.111.000	542.111.000	100%
3. Gendang Timur	388.342.000	388.342.000	100%
4. Karang Tengah	337.838.000	337.838.000	100%
5. Jambuir	338.641.000	338.641.000	100%
6. Gayam	368.408.000	368.408.000	100%
7. Kalowang	540.445.000	540.445.000	100%
8. Nyamplong	337.319.000	337.319.000	100%
9. Gendang Barat	453.871.000	453.871.000	100%
10. Tarebung	402.654.000	402.654.000	100%
Kecamatan Nonggunong			

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
1. Nonggunong	337.648.000	337.648.000	100%
2. Sumber	312.334.000	312.334.000	100%
3. Tanah Merah	312.699.000	312.699.000	100%
4. Sokaramme Timur	362.896.000	362.896.000	100%
5. Sokaramme Paseser	417.245.000	417.245.000	100%
6. Talaga	312.604.000	312.604.000	100%
7. Rosong	312.494.000	312.494.000	100%
8. Sonok	514.470.000	514.470.000	100%
Kecamatan Ra'as			
1. Ketupat	393.180.000	393.180.000	100%
2. Jungkat	312.708.000	312.708.000	100%
3. Kropoh	394.053.000	394.053.000	100%
4. Karangnangka	392.349.000	392.349.000	100%
5. Alas Malang	353.592.000	353.592.000	100%
6. Poteran	401.450.000	401.450.000	100%
7. Brakas	490.419.000	490.419.000	100%
8. Tonduk	397.857.000	397.857.000	100%
9. Guwa-Guwa	391.306.000	391.306.000	100%
Kecamatan Masalembu			
1. Sukajeruk	369.218.000	369.218.000	100%
2. Masalima	370.136.000	370.136.000	100%
3. Masakambing	313.282.000	313.282.000	100%
4. Kramian	367.020.000	367.020.000	100%
Kecamatan Arjasa			
1. Pajanangger	592.249.000	592.249.000	100%
2. Sawah Sumur	453.336.000	453.336.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Paseraman	542.075.000	542.075.000	100%
4. Gelaman	519.858.000	519.858.000	100%
5. Buddi	392.202.000	392.202.000	100%
6. Kolo-Kolo	592.670.000	592.670.000	100%
7. Angkatan	514.956.000	514.956.000	100%
8. Kalisangka	514.188.000	514.188.000	100%
9. Bilis-Bilis	539.394.000	539.394.000	100%
10. Laok Jang-Jang	440.159.000	440.159.000	100%
11. Sumbernangka	336.540.000	336.540.000	100%
12. Duko	514.797.000	514.797.000	100%
13. Kalikatak	537.913.000	537.913.000	100%
14. Arjasa	514.232.000	514.232.000	100%
15. Kalinganyar	474.959.000	474.959.000	100%
16. Angon-Angon	514.674.000	514.674.000	100%
17. Sambakati	514.316.000	514.316.000	100%
18. Pandeman	376.503.000	376.503.000	100%
19. Pabean	410.476.000	410.476.000	100%
Kecamatan Sapeken			
1. Sepanjang	450.464.000	450.464.000	100%
2. Tanjung Kiaok	394.191.000	394.191.000	100%
3. Sakala	403.578.000	403.578.000	100%
4. Pagerungan Besar	443.541.000	443.541.000	100%
5. Pagerungan Kecil	394.414.000	394.414.000	100%
6. Saseel	395.326.000	395.326.000	100%
7. Sapeken	571.566.000	571.566.000	100%
8. Sabunten	395.326.000	395.326.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
9. Paliat	407.138.000	407.138.000	100%
10. Sadulang	442.079.000	442.079.000	100%
11. Saur Saebus	468.679.000	468.679.000	100%
Kecamatan Batuan			
1. Patean	336.257.000	336.257.000	100%
2. Babbalan	336.683.000	336.683.000	100%
3. Gedungan	311.438.430	311.438.430	100%
4. Gunggung	336.862.000	336.862.000	100%
5. Batuan	391.239.000	391.239.000	100%
6. Torbang	385.455.000	385.455.000	100%
7. Galugur	336.379.000	336.379.000	100%
Kecamatan Kangayan			
1. Saobi	516.413.000	516.413.000	100%
2. Kangayan	495.437.000	495.437.000	100%
3. Torjek	470.806.000	470.806.000	100%
4. Cangkramaan	338.471.000	338.471.000	100%
5. Tembayan	313.322.000	313.322.000	100%
6. Batuputih	339.008.000	339.008.000	100%
7. Daandung	393.194.000	393.194.000	100%
8. Timur Jang-Jang	427.274.000	427.274.000	100%
9. Jukong-Jukong	363.947.000	363.947.000	100%
Jumlah	131.683.768.430	131.683.768.430	100%

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang berikan kepada

pemerintahan tingkat bawahnya, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPD sebagai pelaksana program kegiatan.

1. Permasalahan dan upaya penyelesaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

Permasalahan :

- Terjadi Pemblokiran Pagu Anggaran oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Upaya Penyelesaian :

- Telah dilakukan Komunikasi dengan Ditjen Pengelolaan Ruang dan Laut (Eselon I KKP), sehingga terbit Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 6 September 2023 Nomor B.4566/DJPRL.1/TU.310/IX/2023 perihal Blokir Alokasi Anggaran TP PUGaR Tahun 2023.

2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Permasalahan :

- Harga satuan yang tidak sama dengan harga satuan di daerah.

Upaya Penyelesaian

- Telah dilakukan penyesuaian harga satuan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan APBD Kabupaten Sumenep.

BAB V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2023 memiliki makna penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta tugas pembantuan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang berisikan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023 yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU); kebijakan pemerintah kabupaten; kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah; penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang; penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2023 sebesar 5,35%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,11%, dengan pertumbuhan tertinggi pada usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,47%.

Persentase penduduk miskin tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Jika di tahun 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep adalah 18,76 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 206.200 jiwa, maka di tahun 2023 berkurang menjadi 18,70% dengan jumlah penduduk miskin 206.100 jiwa.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan, jika pada tahun sebelumnya IPM Kabupaten Sumenep sebesar

68,49, maka di tahun 2023 menjadi 69,13. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan manusia.

Di sisi tata Kelola pemerintahan, capaian MCP (Monitoring Center For Prevention) Kabupaten Sumenep tahun 2023 sebesar 94,31% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 93,38%, sedangkan untuk Survei Penilaian Integritas, Kabupaten Sumenep meraih nilai 78,74% di tahun 2023 dengan predikat “terjaga”.

Selanjutnya beberapa keberhasilan pada tahun 2023 juga telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditorehkan dalam bentuk penghargaan – penghargaan dari berbagai pihak antara lain :

1. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atas keberhasilan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat dari Kementerian Dalam Negeri
2. Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023: kategori pemerintahan terpadu dengan konsep pentahelix, dari Tv One atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menerapkan konsep pentahelix dalam tata Kelola pemerintahan
3. Penghargaan Penurunan Stunting, dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas keberhasilannya menurunkan angka stunting sebesar 7,4%
4. Penghargaan Ketahanan Pangan, dari Gubernur Jawa Timur atas keberhasilannya meningkatkan produksi dan produktivitas bawang merah dengan memanfaatkan lahan marginal dataran tinggi
5. Penghargaan Top Digital Award 2023, dari majalah ITWorks atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memanfaatkan aplikasi digital untuk pelayanan public
6. Penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo, atas keberhasilan dalam pengembangan dan pembangunan potensi kelautan di Kabupaten Sumenep
7. Penghargaan Swasti Saba Padapa 2023 dari Kementerian Kesehatan RI atas keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten Sehat 2023

8. Penghargaan PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas partisipasi dan dukungan anggaran serta prasarana dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
9. Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Frambusia, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas keberhasilan Kabupaten Sumenep menjadi salah satu kabupaten atau kota di Indonesia yang dinyatakan bebas Frambusia
10. Penghargaan Pembina Koperasi Andalan dari Dewan Koperasi Indonesia atas kerja keras pemerintah daerah dan pelaku koperasi di Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan koperasi
11. Penghargaan Tokoh Penggerak Ekosistem Kendaraan Listrik dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) atas upaya untuk mendorong masyarakat supaya menggunakan kendaraan listrik, sebagai salah satu solusi atas pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan
12. Penghargaan Pengembang Warisan Budaya atas upaya memperkenalkan Kabupaten Sumenep sebagai Kota Keris
13. Penghargaan dari B Universe diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam kategori utama sebagai Inisiatif Pemerintah Daerah Inspiratif dan kategori Transformasi Digital Terintegrasi, yakni program SikaPal.

Atas keberhasilan yang dicapai di tahun 2023, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai mitra yang selama ini terus menjalin sinergitas hubungan yang harmonis serta memberikan motivasi, kritik yang membangun kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami haturkan pada segenap komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Sumenep atas partisipasi dan dukungan yang diberikan untuk ikut bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumenep.

Namun demikian, kami menyadari masih terdapat hambatan dan kekurangan yang ditemui selama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2023. Oleh karenanya melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka kesempatan yang selebar - lebarnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan di tahun berikutnya.

Demikian penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita semua untuk mewujudkan “SUMENEP UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA”.